

# Membangun Harmoni Global

SINERGI BUDAYA, KEBANGSAAN, &  
EKONOMI KREATIF NUSANTARA

**BEST  
SELLER**

Aidatul Fitriyah-Bulan Lestari Yasinta Simatupang-  
Etika Filashofia-Gregorian Jerahmeel-Khairullah Taj-Nadine  
Fakhira Putri Ravanti-Rasyiq Arif Buamona-Siti Ariani Safarina-  
Yunia Amelia

**Membangun Harmoni Global:  
Sinergi Budaya, Kebangsaan, dan Ekonomi  
Kreatif Nusantara**

Aidatul Fitriyah  
Bulan Lestari Yasinta Simatupang  
Etika Filashofia  
Gregorian Jerahmeel  
Khairullah Taj  
Nadine Fakhira Putri Ravanti  
Rasyiq Arif Buamona  
Siti Ariani Safarina  
Yunia Amelia

**Penerbit oleh**



**Tahun 2025**

# **Membangun Harmoni Global:**

## **Sinergi Budaya, Kebangsaan, dan Ekonomi Kreatif Nusantara**

Penulis:

Aidatul Fitriyah, Bulan Lestari Yasinta Simatupang, Etika Filashofia,  
Gregorian Jerahmeel, Khairullah Taj, Nadine Fakhira Putri Ravanti, Rasyiq  
Arif Buamona, Siti Ariani Safarina, Yunia Amelia

ISBN: -

Penata Letak : Khairullah Taj, Nadine Fakhira Putri Ravanti, Rasyiq Arif  
Buamona, Siti Ariani Safarina  
Editor : Dewi Setyaningsih  
Desain Sampul : Dewi Setyaningsih  
Cetakan : Pertama, November 2025  
Penerbit : **Zahira Media**  
Alamat : Ruko Mega Legenda Perluasan Blok G2-19 Kota Batam  
Telepon : 0857-6009-6621 (Kantor)  
E-mail : [Zahiramedia81220@gmail.com](mailto:Zahiramedia81220@gmail.com)  
Situs Website : <http://zahiramedia.com>

**ANGGOTA IKAPI KEPRI**

**No. 13/KEPRI/2024**

Hak cipta dilindungi oleh hukum

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini  
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,  
tanpa ijin tertulis dari penerbit

***All Rights Reserved***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *“Membangun Harmoni Global: Sinergi Budaya, Kebangsaan, dan Ekonomi Kreatif Nusantara”* ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya ini lahir dari refleksi panjang atas perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan kaya budaya, di tengah arus globalisasi yang menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi tanpa kehilangan jati diri. Dalam konteks diplomasi modern yang semakin bergeser dari kekuatan militer ke kekuatan lunak (*soft power*), budaya menjadi medium yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan, memperkuat citra, dan menjalin kerja sama antarbangsa. Melalui buku ini, penulis berupaya menghadirkan pandangan baru tentang bagaimana diplomasi budaya dapat dioptimalkan melalui sinergi dengan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi digital, sehingga mampu menjadikan Indonesia sebagai aktor global yang berpengaruh sekaligus berkarakter.

Lebih dari sekadar analisis teoritis, buku ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan dan praktik diplomasi budaya yang lebih inklusif, strategis, dan berkelanjutan. Penulis menyadari bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga energi yang menuntun masa depan bangsa. Karena itu, melalui penguatan diplomasi budaya, pengembangan ekonomi kreatif, dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting dalam membangun harmoni global yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan gotong royong. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak akademisi, praktisi, dan rekan sejawat yang telah memberikan inspirasi, dukungan, dan masukan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat menjadi pijakan untuk menumbuhkan kesadaran baru bahwa kekuatan sejati Indonesia bukan hanya terletak pada sumber daya alamnya, melainkan pada kearifan budaya dan semangat kebangsaan yang menggerakkan harmoni tanpa batas.

**Penulis**

## SINOPSIS

Buku “*Membangun Harmoni Global: Sinergi Budaya, Kebangsaan, dan Ekonomi Kreatif Nusantara*” menguraikan peran penting diplomasi budaya dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam era digital dan multipolar, kekuatan suatu bangsa tidak lagi ditentukan semata oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pengaruh melalui budaya sebagai bentuk *soft power* yang menumbuhkan daya tarik, kepercayaan, dan kerja sama. Melalui pembahasan yang mendalam tentang diplomasi budaya digital, penelitian berbasis data, dan studi kasus implementatif, buku ini menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana Indonesia dapat mengubah kekayaan budayanya menjadi kekuatan strategis di ranah global.

Lebih jauh, buku ini menyoroti bagaimana elemen-elemen budaya seperti batik, gamelan, dan kuliner tradisional tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang berdaya saing global. Dengan membandingkan praktik diplomasi budaya Indonesia dengan model keberhasilan Jepang dan Korea Selatan, buku ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan budaya, ekonomi kreatif, dan strategi komunikasi digital. Selain menampilkan keberhasilan Indonesia dalam pengakuan budaya takbenda oleh UNESCO, penulis juga mengkaji kesenjangan konseptual dan strategis dalam diplomasi budaya yang selama ini bersifat simbolis dan belum terukur secara empiris.

Pada akhirnya, “*Membangun Harmoni Global*” bukan sekadar kajian akademik, tetapi juga seruan reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan budaya sebagai poros pembangunan dan diplomasi masa depan. Buku ini menegaskan bahwa harmoni global hanya dapat terwujud apabila diplomasi budaya dijalankan secara inklusif, berbasis nilai, dan didukung oleh inovasi digital serta partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan yang kritis dan solutif, karya ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan, melainkan kekuatan hidup yang mampu menjembatani perbedaan, memperkuat identitas nasional, dan membawa Indonesia berperan aktif dalam membangun dunia yang damai, setara, dan berkeadaban.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SINOPSIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>A. MEMBANGUN HARMONI GLOBAL: SINERGI BUDAYA, KEBANGSAAN, DAN EKONOMI KREATIF NUSANTARA ....</b>	<b>1</b>
<b>Bulan Lestari Yasinta Simatupang</b>	
1. Diplomasi Budaya Digital: Landasan Soft Power Indonesia .....	1
2. Diplomasi Budaya: Evolusi dan Kritik Konseptual .....	2
3. Praktik dan Kajian Diplomasi Budaya Indonesia: Evaluasi Kritis ..	3
4. Persepsi Global terhadap Budaya Indonesia di Media Sosial .....	4
5. Peran Sentral Diaspora dalam Penyebaran Budaya .....	5
6. Kesenjangan antara Budaya Permukaan dan Budaya Dalam .....	6
7. Budaya dan Digitalisasi .....	7
<b>B. MENJALIN BUDAYA MENJADI KEKUATAN: BATIK, GAMELAN, DAN DIPLOMASI KULINER INDONESIA DI ERA MULTIPOLAR .....</b>	<b>8</b>
<b>Rasyiq Arif Buamona</b>	
1. Gelombang Globalisasi Digital .....	8
2. Diplomasi Budaya .....	11
3. Kekuatan Lunak .....	11
4. Diplomasi Kebudayaan Indonesia .....	12
5. Babak Baru .....	13
6. Diplomasi Kebudayaan Indonesia dan Peluang Optimalisasinya .	14
7. Batik, Gamelan, dan Masakan Nusantara Sebagai Trisula Unsur Budaya .....	15
8. Tantangan dan Risiko .....	16
9. Diplomasi .....	18

**C. MEMANFAATKAN BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI SOFT POWER: MENINGKATKAN PENGARUH DIPLOMATIK INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI..... 18**

**Aidatul Fitriyah**

1.Globalisasi Budaya Nusantara .....	18
2.Ciri-Ciri Budaya Nusantara .....	21
3.Dampak Budaya Nusantara sebagai Soft Power dalam Memperkuat Hubungan Internasional .....	24
4.Potensi Budaya Nusantara .....	30

**D. EKONOMI KREATIF**

**NUSANTARA GOES GLOBAL: PETA JALAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UKM KREATIF INDONESIA MENGGUNAKAN AGILE PROJECTPENGELOLAAN .....31**

**Gregorian Jerahmeel**

1.Ekonomi Kreatif Indonesia .....	31
2.Tinjauan Umum Penggabungan Literatur .....	33
3.Pengembangan Bisnis di Startup: BD sebagai Strategi Pertumbuhan Terstruktur .....	36
4.Aplikasi dalam Konteks Kreatif, Startup, dan UKM .....	37
5.Kerangka Kerja yang Diusulkan .....	38
6.Peluang dan Fleksibilitas .....	41
7.Implikasi & Rekomendasi Bagi UKM .....	44
8.UMKM Kreatif di Pasar Global .....	45

**E. STRATEGI FISKAL UNTUK EKONOMI KREATIF GLOBAL: PERAN LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL LEMBAGA DAN NEGARA BERKEMBANG .....45**

**Yunia Amelia**

1.Ekonomi Creative .....	45
2.Mendefinisikan Ekonomi Kreatif di Era Digital .....	47
3.Komitmen Bersama .....	48
4.Memperkuat Dimensi Analitis dengan Data Empiris .....	54
5.Strategi Kreatif Era Digital .....	55

6. Melampaui Pembiayaan: Kebijakan Fiskal sebagai Infrastruktur Sistemik .....	56
7. Temuan Baru dan Tantangan yang Muncul .....	57
8. Refleksi Penutup: Dari Dukungan Fiskal Menuju Kedaulatan Fiskal .....	58
<b>F. KREATIVITAS: MASA DEPAN ENERGI TERBARUKAN UNTUK MENDORONG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA PADA TAHUN 2030 .....</b>	<b>59</b>
<b>Siti Ariani Safarina</b>	
1. Pendahuluan .....	59
2. Kreativitas sebagai Sumber Daya dalam Ekonomi Pengetahuan ..	60
3. Disrupsi dan Inovasi Berkelanjutan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	61
4. Agenda Ekonomi Kreatif di Indonesia .....	61
5. Metodologi .....	63
6. Pengembangan Strategi .....	77
7. Visi ideal untuk masa depan .....	80
8. Manusia adalah Penggerak Utama .....	82
<b>G. MEMAJUKAN NASIONALISME DAN DIPLOMASI PENDIDIKAN MELALUI BEASISWA GLOBAL .....</b>	<b>82</b>
<b>Nadine Fakhira Putri Ravanti</b>	
1. Semua Bisa .....	82
2. Relevansi Budaya dan Politik .....	85
3. Tingkatan Paparan Nasionalisme yang Berbeda Antara Sesi Pra-Keberangkatan Beasiswa Pemerintah dan Beasiswa Swasta .....	85
4. Urgensi Penguatan Nasionalisme dalam Diplomasi Pendidikan Melalui Kemitraan Beasiswa Luar Negeri .....	89
5. Pentingnya Kesadaran Dalam Melestarikan Identitas Indonesia ..	90
<b>H. KEKUASAAN PERPAJAKAN DAN PRINSIP KONSTITUSIONAL: MEMPERKUAT PATRIOTISME NASIONAL MELALUI KEPATUHAN PAJAK .....</b>	<b>92</b>
<b>Khairullah Taj</b>	
1. Perpajakan Konstitusional dan Loyalitas Publik Perpajakan sebagai Kekuasaan Konstitusional .....	93



2. Patriotisme Fiskal: Kepatuhan Pajak sebagai Kewajiban Nasional .....	94
3. Identitas Nasional dan Partisipasi Warga Negara .....	95
4. Kekuasaan Perpajakan dalam Praktik: Konteks Turki Landasan Hukum dan Kelembagaan .....	95
5. Analisis dan Pembahasan .....	96
6. Legitimasi Konstitusional dan Aturan Hukum dalam Perpajakan .....	96
7. Keadilan dan Transparansi dalam Praktik Perpajakan Turki .....	97
8. Kepatuhan Pajak sebagai Keterlibatan Masyarakat dan Tugas Nasional .....	97
9. Akuntabilitas Kelembagaan dan Upaya Hukum .....	98
10. Refleksi Konstitusional Komparatif .....	99
11. Akhir Konstitusional Komparatif .....	99
12. Implikasi Praktis dan Arah Masa Depan .....	100
<b>I. PERMAINAN PAPAN BALAP KATA: MEREVITALISASI AKSARA TRADISIONAL SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN NASIONAL .....</b>	<b>102</b>
<b>Etika Filashofia</b>	
1. Perkenalan Budaya dan Tradisi .....	102
2. Sistem Penulisan Bahasa Jawa: Aksara Jawa dan Arab Pegon ...	104
3. Permainan Papan sebagai Media Pendidikan .....	106
4. Aksara Jawa dan Kebangkitan Nasionalisme .....	107
5. Balap Kata: Permainan Papan Edukasi Aksara Jawa .....	108
6. Cara Bermain Balap Kata .....	111
7. Implementasi Permainan Papan Balap Kata dalam Revitalisasi Aksara Tradisional .....	112
8. Implementasi Teknologi Digital .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>

## **A. MEMBANGUN HARMONI GLOBAL: SINERGI BUDAYA, KEBANGSAAN, DAN EKONOMI KREATIF NUSANTARA**

### **1. Diplomasi Budaya Digital: Landasan Soft Power Indonesia**

Diplomasi telah mengalami transformasi fundamental yang didorong oleh globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan pergeseran perilaku audiens internasional. Diplomasi tradisional, yang dicirikan oleh eksklusivitas dan elitisme, semakin tergantikan oleh model diplomasi publik yang terbuka, inklusif, dan melibatkan komunikasi lintas komunitas. Dalam diplomasi publik, diplomasi budaya berperan strategis sebagai salah satu alat utama untuk mengembangkan soft power—yang didefinisikan sebagai kapasitas untuk memengaruhi orang lain tanpa menggunakan paksaan—melalui daya tarik budaya, nilai-nilai bersama, dan hubungan kelembagaan. Dalam dunia yang terfragmentasi secara politik namun saling terhubung secara digital, budaya tidak lagi sekadar objek representasi tetapi juga berfungsi sebagai medan pertempuran untuk kontestasi naratif dalam diplomasi global.

Indonesia, sebagai bangsa yang dikenal karena multikulturalisme dan warisan budayanya yang kaya, memiliki potensi signifikan untuk memanfaatkan diplomasi budaya sebagai instrumen strategis guna meningkatkan citra dan pengaruh internasionalnya. Namun demikian, potensi diplomasi budaya di Indonesia sebagian besar masih belum teraktualisasikan dalam kerangka kebijakan luar negeri yang terstruktur, sistematis, dan evaluatif. Mayoritas upaya diplomasi budaya Indonesia masih berpusat pada upacara, pameran, atau pertunjukan fisik yang bersifat sementara dan kurang terdigitalisasi. Pada kenyataannya, lanskap diplomasi global telah mengalami transformasi substansial, dengan aktivitas diplomatik yang kini semakin banyak dilakukan melalui platform digital, algoritma, dan opini publik daring.

Meskipun Indonesia semakin aktif menggunakan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan budayanya, studi akademis yang mengkaji efektivitas pendekatan ini masih sangat terbatas. Literatur tentang diplomasi budaya Indonesia cenderung normatif dan kurang didukung oleh evaluasi berbasis data mengenai dampak komunikasi budaya digital terhadap persepsi dan penerimaan global. Sebagian besar penelitian hanya berasumsi bahwa promosi budaya di media sosial secara otomatis menghasilkan soft power, tanpa mengukur sejauh mana narasi budaya Indonesia diserap, dikomentari, atau diperdebatkan di ruang digital global. Kesenjangan penelitian yang ada menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih empiris, kuantitatif, dan berbasis teknologi untuk mengkaji diplomasi budaya digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan penelitian yang ada dengan mengusulkan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan analisis sentimen konten media sosial dengan analisis jaringan sosial (SNA) untuk menggambarkan penerimaan budaya Indonesia dan mengidentifikasi jaringan aktor digital yang terlibat dalam penyebaran narasi budaya. Penggunaan pendekatan metode campuran ini merupakan inovasi metodologis yang belum

banyak digunakan dalam kajian diplomasi budaya di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menggabungkan studi kasus inisiatif diplomasi budaya Indonesia di panggung internasional untuk memfasilitasi integrasi analisis kuantitatif dan kualitatif secara komprehensif.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada integrasi konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kerangka kerja digital empiris, sementara kontribusi praktisnya adalah penyediaan rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat digunakan oleh aktor negara dan non-negara untuk mengoptimalkan diplomasi budaya Indonesia. Di tengah meningkatnya polarisasi global dan persaingan naratif antarnegara, diplomasi budaya digital bukan lagi pilihan pelengkap, melainkan kebutuhan strategis yang mendesak. Penelitian ini disusun dalam lima bagian. Bagian kedua mengkaji literatur tentang konsep diplomasi budaya, soft power, dan digitalisasi hubungan internasional. Bagian ketiga menjelaskan pendekatan metodologis yang digunakan, termasuk teknik analisis sentimen dan jaringan sosial. Bagian keempat menyajikan hasil penelitian, baik kuantitatif maupun studi kasus. Bagian kelima berisi diskusi kritis dan implikasi kebijakan, sementara bagian terakhir merangkum temuan utama dan menawarkan arahan untuk penelitian lebih lanjut.

## **2. Diplomasi Budaya: Evolusi dan Kritik Konseptual**

Secara historis, diplomasi budaya telah menjadi bagian dari praktik diplomasi publik, yang didefinisikan sebagai upaya suatu negara untuk memengaruhi opini publik asing melalui komunikasi budaya, pendidikan, media, dan pertukaran masyarakat sipil. Diplomasi budaya menempatkan budaya sebagai instrumen strategis untuk menciptakan saling pengertian dan membangun kepercayaan antarnegara. Dalam formulasi klasiknya, diplomasi budaya seringkali bersifat satu arah, di mana negara menyampaikan konten budaya kepada khalayak asing sebagai representasi identitas nasional. Namun, pendekatan klasik ini telah dikritik karena bersifat simbolis, elitis, dan kurang partisipatif. Model transaksional dalam diplomasi budaya mulai ditinggalkan dan digantikan oleh pendekatan diplomasi publik relasional dan berjejaring, yang menekankan dialog dua arah, kolaborasi lintas budaya, dan pemanfaatan jaringan masyarakat sipil. Ini berarti bahwa diplomasi budaya bukan lagi sekadar representasi, melainkan pembentukan hubungan jangka panjang berdasarkan nilai-nilai bersama. Pentingnya saling ketergantungan yang kompleks dalam hubungan internasional, di mana aktor non-negara dan isu-isu non-tradisional seperti budaya memainkan peran yang semakin dominan. Oleh karena itu, diplomasi budaya harus dipahami dalam kerangka hubungan horizontal multi-aktor dan lintas batas.

### **Digitalisasi Diplomasi: Potensi, Paradoks, dan Polarisasi**

Kemunculan diplomasi digital atau diplomasi siber telah membawa dimensi baru dalam praktik hubungan internasional. Diplomasi tidak lagi hanya dilakukan oleh diplomat profesional, tetapi juga oleh aktor non-negara seperti influencer, diaspora, seniman, dan masyarakat sipil yang aktif di ruang digital. Platform digital membuka peluang bagi negara-negara untuk

menyebarkan narasi budaya secara luas, cepat, dan terukur. Beberapa studi menegaskan bahwa digitalisasi telah merevolusi diplomasi publik melalui pendekatan diplomasi berbasis keterlibatan, yang menekankan keterlibatan langsung dengan audiens asing melalui platform daring seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Digitalisasi juga memfasilitasi penceritaan budaya yang autentik dan kontekstual, sesuai dengan preferensi audiens global. Terdapat pula paradoks yang inheren. Pertama, diplomasi budaya digital rentan terhadap disinformasi, kebisingan, dan kelelahan konten di tengah banjir informasi global. Kedua, algoritma media sosial tidak netral karena bekerja berdasarkan logika komersial dan popularitas, bukan nilai edukasional atau kualitas diplomatik. Ketiga, terdapat fragmentasi audiens akibat filter gelembung dan ruang gema, yang menyebabkan pesan diplomasi budaya tidak tersebar merata secara global.

### **3. Praktik dan Kajian Diplomasi Budaya Indonesia: Evaluasi Kritis**

Indonesia telah melakukan berbagai bentuk diplomasi budaya melalui pertunjukan seni, pameran, kuliner, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dan program pertukaran. Namun, sebagian besar inisiatif diplomasi budaya masih bersifat simbolis, sporadis, dan kurang terdigitalisasi. Diplomasi budaya Indonesia belum didukung oleh sistem evaluasi kinerja berbasis data digital. Tidak ada indikator standar untuk mengukur persepsi atau sentimen global terhadap budaya Indonesia di media sosial. Hal ini diperparah oleh kurangnya integrasi diplomasi budaya ke dalam strategi komunikasi luar negeri secara keseluruhan. Literatur sebelumnya juga belum banyak memanfaatkan perangkat digital seperti analisis sentimen, pemodelan topik, atau analisis jaringan sosial untuk mengevaluasi persepsi publik terhadap representasi budaya Indonesia. Padahal, pendekatan ini penting untuk mengukur efektivitas narasi budaya secara langsung.

Ketika suatu fenomena sosial membutuhkan penjelasan mendalam serta pengukuran yang tepat. Dalam konteks penelitian ini, diplomasi budaya dipahami sebagai bentuk komunikasi antarbudaya yang strategis, sementara media digital berfungsi sebagai ruang produksi dan distribusi narasi budaya yang dinamis dan tersebar secara transnasional. Data utama dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu konten digital dan dokumen kelembagaan. Konten digital dikumpulkan dari platform media sosial X dengan fokus pada akun resmi pemerintah (misalnya @Kemlu\_RI, akun Kedutaan Besar Republik Indonesia, Rumah Budaya Indonesia) serta akun publik yang diidentifikasi aktif menyebarkan konten budaya Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak pengikisan web dan pemanfaatan API resmi dari platform digital terkait. Studi ini memanfaatkan data dokumenter dari arsip kegiatan diplomasi budaya, laporan tahunan Kementerian Luar Negeri, serta dokumentasi kegiatan festival dan program pertukaran budaya.

Analisis data dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, analisis sentimen digunakan untuk mengevaluasi persepsi publik global terhadap

budaya Indonesia. Dengan menggunakan perangkat lunak Python serta pustaka seperti NLTK dan TextBlob, konten digital dikategorikan menjadi sentimen positif, negatif, dan netral. Teknik ini memungkinkan pengukuran opini publik berdasarkan respons tekstual secara luas dan sistematis. Meskipun teknik analisis sentimen efektif dalam menangkap pola umum, para peneliti menyadari keterbatasannya dalam mengenali nuansa lokal, konteks sarkasme, atau ironi budaya, sehingga hasil kuantitatif ini dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif untuk mempertahankan kedalaman analisis. Kedua, analisis jaringan sosial (SNA) digunakan untuk memetakan arsitektur distribusi narasi budaya Indonesia di ruang digital. SNA membantu mengidentifikasi aktor-aktor kunci dalam jaringan, seperti pemengaruh budaya, akun pemerintah, komunitas diaspora, serta mengukur kekuatan hubungan dan distribusi konten antar aktor. Pendekatan SNA sangat relevan dalam menganalisis diplomasi digital, karena jaringan tidak hanya merupakan saluran komunikasi teknis, tetapi juga arena relasional tempat kekuatan budaya dinegosiasikan.

Untuk memperkaya dan menguji analisis, dilakukan studi kasus diplomasi budaya Indonesia yang memiliki jangkauan digital luas dan melibatkan lintas batas. Studi kasus ini dipilih secara purposif untuk menyoroti variasi strategi diplomasi budaya digital serta efektivitasnya dalam menjangkau khalayak mancanegara. Kemudian dilakukan analisis tematik kualitatif terhadap narasi budaya yang muncul dalam konten visual dan narasi teks, seperti deskripsi video, keterangan gambar, dan interaksi pengguna. Analisis tematik kualitatif membantu mengungkap makna simbolik, konstruksi identitas nasional, dan representasi budaya yang terbentuk dalam komunikasi publik. Identifikasi tema induktif, pengkodean, dan interpretasi kontekstual. Pendekatan multisumber (triangulasi) digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Namun, pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini tidak lepas dari keterbatasannya. Pertama, data dari media sosial sangat bergantung pada akses teknis yang disediakan oleh platform digital, dan tidak semua data terbuka atau bebas dari bias algoritmik. Kedua, analisis sentimen memiliki keterbatasan dalam menangkap makna budaya Indonesia yang tersirat atau khas, terutama dalam konteks bahasa atau idiom lokal. Ketiga, karena studi ini berfokus pada representasi daring, persepsi yang terbentuk di luar ruang digital—seperti dalam diplomasi budaya langsung berbasis komunitas—bukanlah fokus utama dalam studi ini. Keterbatasan ini diakui secara transparan agar pembaca memahami cakupan analisis dan arah interpretasi yang ditawarkan.

#### **4. Persepsi Global terhadap Budaya Indonesia di Media Sosial**

Analisis sentimen terhadap 2.502 twit dari akun-akun di platform X selama periode Januari 2024 hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa 62,3% dari keseluruhan percakapan publik mengekspresikan sentimen positif, 27,1% netral, dan 10,6% menunjukkan sentimen negatif terkait budaya Indonesia. Pola ini menunjukkan bahwa, secara umum, citra budaya Indonesia yang disebarluaskan secara digital telah diterima dengan baik oleh khalayak global. Tema-tema dominan dalam sentimen positif berkaitan dengan ekspresi budaya visual dan aksesibel, seperti batik, kuliner tradisional (rendang, sate, nasi

goreng), dan seni termasuk gamelan dan tari Saman. Keragaman respons di platform X menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi budaya digital dipengaruhi tidak hanya oleh frekuensi unggahan konten tetapi juga oleh kapasitas narasi untuk menumbuhkan koneksi emosional dan merangsang memori keterlibatan budaya global.

Analisis sentimen juga mengungkap kelemahan substansial dalam penyampaian budaya Indonesia secara daring. Sentimen negatif terutama ditemukan pada konten yang menampilkan budaya masyarakat adat yang kompleks tanpa narasi pendukung yang memadai. Komentar seperti "Apakah ini masih relevan di era modern?" atau "Mengapa tidak ada penjelasan?" merupakan indikator kesenjangan pemahaman budaya. Diplomasi budaya cenderung gagal ketika tidak disertai narasi strategis yang mampu menjembatani makna budaya lokal ke dalam kerangka pemahaman global. Lebih lanjut, keberadaan sentimen negatif juga mencerminkan keterbatasan pendekatan satu arah dalam penyampaian konten budaya. Dalam konteks diplomasi publik, komunikasi yang sukses bukan hanya tentang penyampaian informasi, tetapi juga membangun ruang untuk dialog dan refleksi bersama. Secara konseptual, hal ini menggarisbawahi pentingnya membedakan antara diplomasi budaya berbasis pameran dan diplomasi budaya berbasis keterlibatan. Konten yang viral atau mendapatkan interaksi substansial belum tentu memiliki signifikansi jangka panjang jika gagal meningkatkan pemahaman lintas budaya. Oleh karena itu, upaya ke depan dalam mempersiapkan konten budaya harus mempertimbangkan penerjemahan budaya dan kepekaan audiens, mendorong pemahaman hubungan lintas budaya yang berkelanjutan.

## **5. Peran Sentral Diaspora dalam Penyebaran Budaya**

Temuan analisis jaringan sosial terhadap 250 akun utama di platform X selama periode Januari 2024 hingga Mei 2025 menunjukkan bahwa diaspora Indonesia memegang peran krusial dalam ekosistem diplomasi budaya digital. Lebih dari sekadar kanal penyebaran, diaspora berperan sebagai kurator dan penafsir budaya. Dalam banyak kasus, diaspora tidak hanya meneruskan konten dari pemerintah, tetapi justru mereproduksi narasi dengan pendekatan naratif yang lebih intim dan kontekstual. Diplomasi yang dilakukan diaspora bersifat relasional dan horizontal. Bukan promosi sepihak, melainkan pertukaran nilai yang dilandasi kesetaraan emosional dan pengalaman. Sebagaimana dijelaskan Manor (2019), diplomasi relasional berbasis media sosial mengutamakan dialog, keintiman, dan partisipasi, yang secara fundamental berbeda dengan logika hubungan masyarakat.

Diaspora juga berperan sebagai perantara budaya dalam konteks kolaborasi lintas batas. Beberapa akun diaspora bahkan memediasi kerja sama antara lembaga budaya Indonesia dan lembaga asing, mulai dari penyelenggaraan festival hibrida, pelatihan daring seni tradisional, hingga produksi konten multibahasa. Peran ini menunjukkan dimensi diplomasi budaya berbasis komunitas yang menempatkan individu sebagai aktor strategis dalam perluasan kekuatan lunak. Hal ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari diplomasi budaya berbasis negara-bangsa menuju diplomasi budaya berbasis komunitas global. Namun, perlu dicatat bahwa jangkauan

diaspora tidak selalu terintegrasi dalam kerangka strategis diplomasi nasional. Ketidadaan sistem pendukung dari negara, seperti platform digital kolaboratif atau insentif distribusi konten, menyebabkan potensi diaspora bersifat sporadis dan tak terukur.

Faktanya, efektivitas diplomasi digital membutuhkan penyelarasan strategis antar-aktor serta penguatan kapasitas teknologi dan naratif. Tanpanya, kekuatan diaspora akan terus berada di posisi marginal meskipun memiliki pengaruh nyata yang signifikan.

## **6. Kesenjangan antara Budaya Permukaan dan Budaya Dalam**

Temuan tematik dalam riset ini menunjukkan bahwa mayoritas konten budaya Indonesia yang tersebar luas di ruang digital, terutama pada platform X selama periode 2024–2025, masih sangat dominan menampilkan dimensi budaya permukaan—aspek-aspek budaya yang kasat mata dan mudah dikonsumsi secara visual, seperti busana adat, kuliner ikonik, dan seni pertunjukan. Meskipun konten ini efektif dalam menarik perhatian publik global dan memicu respons positif, dominasi simbol budaya yang estetik ini menimbulkan persoalan konseptual yang signifikan. Representasi semacam ini cenderung konsumtif dan kurang memberi ruang bagi dimensi nilai, keyakinan, dan sistem makna yang inheren dalam budaya Indonesia.

Budaya mendalam mencakup unsur-unsur budaya yang tidak langsung terlihat seperti nilai-nilai sosial, etika, norma perilaku, dan cara hidup kolektif. Sayangnya, aspek-aspek ini hampir tidak ada dalam diplomasi budaya digital Indonesia. Nilai-nilai fundamental seperti semangat gotong royong, prinsip harmoni sosial dalam adat Jawa atau Bali, dan konsep keseimbangan antara manusia dan alam sebagaimana diabadikan dalam filosofi Tri Hita Karana, belum secara konsisten diangkat dalam narasi digital. Padahal, dalam konteks diplomasi budaya, pengenalan budaya mendalam berpotensi lebih efektif dalam membangun pemahaman lintas budaya yang mendalam dan langgeng. Ketidadaan narasi nilai ini memiliki implikasi serius, di mana budaya Indonesia cenderung diperlakukan sebagai produk eksotis yang dipromosikan melalui estetika, alih-alih sebagai sistem pengetahuan yang hidup. Ketika diplomasi budaya jatuh ke dalam perangkap visualisasi tanpa substansi. Konten viral seperti peragaan busana batik atau video kuliner seringkali berjalan tanpa narasi historis, filosofis, atau sosiologis yang mendalam, sehingga penonton mancanegara hanya melihat permukaan budaya tanpa pernah menggali makna terdalamnya. Hal ini tidak hanya melemahkan dampak jangka panjang diplomasi budaya, tetapi juga menempatkan budaya Indonesia pada posisi yang mudah dikomersialkan secara global.

Ketimpangan antara budaya permukaan dan budaya dalam juga menunjukkan ketidaksiapan strategi komunikasi budaya Indonesia dalam menghadapi kompleksitas ruang digital global. Negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan, misalnya, telah berhasil memadukan estetika budaya dengan nilai-nilai mendalam seperti kehormatan (*bushido*), etika kolektif, atau filosofi kerja keras, yang perlahan membentuk persepsi global yang kuat. Indonesia, di sisi lain, masih belum berhasil menafsirkan ulang nilai-nilai luhur seperti musyawarah, toleransi, dan hubungan spiritual dengan alam ke

dalam bahasa digital yang beresonansi internasional. Akibatnya, diplomasi budaya Indonesia lebih dipandang sebagai proses penyebaran simbol, alih-alih proses pertukaran makna. Diplomasi budaya yang efektif adalah diplomasi yang mampu mendorong perubahan persepsi melalui narasi dan keterlibatan reflektif, bukan sekadar penyajian visual. Tanpa pergeseran strategi menuju narasi yang mengangkat budaya dalam, diplomasi budaya digital Indonesia hanya akan berfungsi sebagai etalase budaya, bukan jembatan antar peradaban.

## **7. Budaya dan Digitalisasi**

Budaya Indonesia di era digital telah mengalami perluasan jangkauan yang signifikan melalui pemanfaatan media sosial dan keterlibatan diaspora. Melalui analisis sentimen dan eksplorasi jejaring sosial digital, studi ini mengungkapkan bahwa persepsi global terhadap budaya Indonesia umumnya positif, terutama pada konten yang menampilkan elemen visual seperti batik, kuliner, dan pertunjukan seni. Namun, di balik pencapaian tersebut, diplomasi budaya digital Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan konseptual dan strategis yang krusial. Pertama, temuan menunjukkan bahwa konten yang diproduksi dan disebarluaskan cenderung berfokus pada budaya permukaan, yang mudah diterima namun kurang menyentuh aspek nilai, falsafah hidup, dan narasi kolektif masyarakat Indonesia. Ketimpangan ini mengindikasikan ketiadaan strategi naratif yang mampu menjembatani makna budaya lokal ke dalam bahasa global yang reflektif dan transformatif. Kedua, peran diaspora terbukti sangat strategis, tidak hanya sebagai penghubung antara budaya Indonesia dan khalayak internasional, tetapi juga sebagai produsen narasi yang lebih humanis dan kontekstual. Namun, peran ini belum sepenuhnya didukung oleh kerangka kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya penataan ulang strategi diplomasi budaya digital Indonesia. Negara ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan promosi satu arah dan simbolis. Sebaliknya, diperlukan ekosistem diplomasi yang inklusif dan berbasis data, serta membuka ruang kolaborasi dengan aktor non-negara seperti diaspora, komunitas budaya, dan lembaga pendidikan. Pemerintah juga perlu mengembangkan kapasitas digital lembaga budaya untuk merancang konten berbasis budaya yang mendalam, yang mengutamakan nilai-nilai seperti solidaritas, keberlanjutan, dan kearifan lokal dalam kerangka global. Sebagai rekomendasi kebijakan, studi ini menyarankan pembentukan unit khusus di bawah Kementerian Luar Negeri atau Badan Ekonomi Kreatif yang secara khusus mengelola diplomasi budaya digital berbasis data. Unit ini bertugas memfasilitasi kemitraan dengan diaspora, mengkurasi narasi lintas platform, dan mengembangkan indikator kinerja yang mencakup dimensi kualitas interaksi, bukan hanya kuantitas jangkauan. Selain itu, perlu diinisiasi program pelatihan penceritaan digital budaya bagi para pegiat budaya Indonesia di luar negeri agar representasi budaya Indonesia lebih inklusif dan bermakna.

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memberikan dampak jangka panjang diplomasi budaya digital terhadap penguatan kekuatan lunak Indonesia di berbagai kawasan dunia. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada representasi aspek atau respons sesaat, tetapi belum cukup menjelaskan bagaimana paparan budaya digital dapat berkontribusi pada



perubahan persepsi jangka panjang, memperkuat hubungan bilateral, atau bahkan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi multilateral. Oleh karena itu, pendekatan longitudinal yang mengamati evolusi persepsi global terhadap budaya Indonesia dalam kurun waktu tertentu akan menjadi kontribusi penting bagi wacana diplomasi publik global.

Selain itu, integrasi antara diplomasi budaya dan ekonomi kreatif juga perlu dikaji lebih lanjut. Saat ini, keduanya masih berjalan di jalur yang berbeda, meskipun kolaborasi antara keduanya dapat memperkuat narasi budaya sebagai komoditas simbolis sekaligus produk bernilai ekonomi. Misalnya, bagaimana ekspor budaya berupa musik, film, kuliner, dan fesyen dapat difasilitasi melalui jalur koneksi, atau bagaimana peran rumah budaya Indonesia dapat dioptimalkan sebagai pusat inkubasi produk kreatif lokal di kancah internasional. Pendekatan ini juga memungkinkan diplomasi budaya berperan dalam pembangunan ekonomi berbasis budaya yang berkelanjutan, sebagaimana yang telah dikembangkan oleh negara-negara seperti Korea Selatan melalui model diplomasi Hallyu.

Untuk menjawab kompleksitas ini, pendekatan interdisipliner menjadi kunci. Kombinasi analisis data besar untuk melacak distribusi dan penerimaan konten budaya, antropologi digital untuk memahami praktik representasi dan konsumsi budaya dalam ruang-ruang yang berani, dan komunikasi lintas budaya untuk merancang strategi penyampaian pesan yang peka terhadap khalayak global, akan membentuk landasan teoretis dan metodologis bagi model diplomasi budaya Indonesia yang lebih adaptif dan berdaya saing global. Penelitian semacam ini juga penting untuk menghindari jebakan diplomasi yang hanya bersifat estetik dan formalistik, serta mendorong terciptanya budaya diplomatik yang reflektif, partisipatif, dan berdampak.

## **B. MENJALIN BUDAYA MENJADI KEKUATAN: BATIK, GAMELAN, DAN DIPLOMASI KULINER INDONESIA DI ERA MULTIPOLAR**

### **1. Gelombang Globalisasi Digital**

Gelombang besar globalisasi dan digitalisasi yang telah melanda dunia dalam beberapa dekade terakhir telah membuka peluang baru bagi Indonesia, sebagai negara berkembang, untuk memproyeksikan pengaruhnya di panggung global. Namun perkembangan ini juga disertai dengan kesadaran bahwa sistem internasional kontemporer bukanlah unipolar—didominasi oleh satu kekuatan besar—melainkan multipolar, dengan banyak aktor berlomba-lomba untuk memajukan kepentingan mereka sendiri, yang seringkali berbeda. Untuk menavigasi kompleksitas ini, Indonesia harus memperluas pengaruhnya melalui cara-cara damai dan tanpa paksaan. Dalam konteks ini, diplomasi budaya menghadirkan opsi yang sangat menjanjikan: kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa dapat dimobilisasi tidak hanya sebagai warisan yang berharga, tetapi sebagai bentuk kekuatan lunak yang mampu menjembatani

kesenjangan, memperdalam kerja sama, dan meningkatkan reputasi global negara tersebut.

Diplomasi budaya merupakan komponen inti diplomasi publik suatu negara, yang mengandalkan daya tarik budaya untuk membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan meletakkan fondasi bagi kerja sama berkelanjutan dengan negara lain. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan aset budaya yang telah diakui secara luas dan mencerminkan keberagaman etnis dan daerah di Indonesia. Batik, misalnya, telah lama menjadi simbol nasional dan ditetapkan dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO pada 2 Oktober 2009. Demikian pula, kekayaan tradisi kuliner Indonesia—yang disajikan melalui festival kuliner internasional—menawarkan wadah ideal untuk memamerkan keragaman cita rasa nusantara yang luar biasa, masing-masing dengan kekhasan daerahnya. Musik gamelan juga dapat menjadi ekspor budaya yang ikonik di forum-forum internasional.

Meskipun kaya akan sumber daya budaya, Indonesia belum muncul sebagai aktor utama yang secara sistematis menggunakan budaya sebagai instrumen soft power. Di Asia, baik Jepang maupun Korea Selatan telah memantapkan diri sebagai ahli diplomasi budaya melalui program-program jangka panjang yang didukung pemerintah. Jejak budaya global Jepang dibangun di sekitar manga dan anime: "manga", kata dalam bahasa Jepang untuk komik, pertama kali muncul di media cetak pada tahun 1989 untuk menggambarkan buku Shiji Ada Yukikai, dan popularitasnya di seluruh dunia mendorong Tokyo untuk mendirikan Sekolah Seni Kartun dan Komik, yang didedikasikan untuk melatih seniman baru dan meningkatkan produksi manga. Selain manga dan anime, musik "J-Pop" dan drama televisi Jepang merupakan bagian dari inisiatif Cool Japan, yang resmi diluncurkan pada tahun 2010. Sejak 2005, sushi juga telah digunakan sebagai alat soft power, dipromosikan di luar negeri oleh lembaga nirlaba khusus yang mendukung koki, bahan-bahan, dan restoran Jepang. Korea Selatan juga telah giat memajukan diplomasi budayanya—yang dikenal sebagai Gelombang Korea atau Hallyu—untuk membentuk kembali citra globalnya, memacu pertumbuhan ekonomi, dan mengamankan pengakuan internasional. Drama televisi, film, musik, tari modern, kuliner, kursus bahasa, gim video, dan produk kecantikan Korea semuanya merupakan aspek dari fenomena Hallyu. Piala Dunia FIFA 2002—yang diselenggarakan bersama oleh Jepang dan Korea Selatan—merupakan titik balik; drama Korea memasuki pasar Indonesia, dan pada 2011, K-Pop telah mencapai jangkauan dunia.

Yang terpenting, keberhasilan Korea Selatan mencerminkan perencanaan yang cermat dan sinergi yang kuat antara badan pemerintah dan aktor non-negara. Pusat Kebudayaan Korea (KCC), yang beroperasi di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, mempromosikan budaya Korea di luar negeri dan memfasilitasi pertukaran budaya. Pusat ini merupakan bagian dari Layanan Kebudayaan dan Informasi Korea (KOCIS) yang lebih luas, sebuah divisi pemerintah yang didirikan pada Desember 1971 untuk menyebarkan budaya Korea secara global. Di antara berbagai kegiatannya, KCC telah menyelenggarakan pameran dan lokakarya Hanbok (pakaian

tradisional Korea), sehingga memperdalam keakraban internasional dengan warisan Korea.

Sebagai perbandingan, diplomasi budaya Indonesia masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti pencitraan merek yang lemah, promosi yang terbatas, dan keterlambatan penyusunan kebijakan telah menghambat kemampuan negara untuk memanfaatkan budaya secara efektif sebagai alat kekuatan lunak. Sebaliknya, Jepang dan Korea Selatan telah menjalankan strategi nasional jangka panjang, menyelaraskan program budaya dengan tujuan kebijakan luar negeri yang lebih luas. Saat ini, ekspor budaya Jepang dan Korea meresap ke dalam kehidupan sehari-hari di seluruh dunia, membentuk persepsi positif terhadap negara mereka, dan memengaruhi pilihan destinasi bagi wisatawan dan pelajar asing. Keakraban tersebut mendorong preferensi, menciptakan dukungan laten untuk kerja sama dan penyelarasan kebijakan dengan negara-negara tersebut.

Memang, budaya adalah salah satu dimensi yang digunakan untuk menghitung indeks kekuatan lunak suatu negara—bersama dengan perdagangan, kapasitas digital, pertukaran pendidikan, jangkauan global, dan kekuatan kelembagaan. Dimensi budaya mencakup tiga kategori: ekspor budaya, pariwisata internasional, dan Situs Warisan Dunia. Menurut laporan IMF 2024, Indonesia berada di antara yang terlemah dalam kekuatan lunak (Grup 1), sedangkan Jepang dan Korea Selatan sama-sama masuk dalam Grup 4, kelompok negara-negara dengan kekuatan lunak yang kuat. Dengan demikian, posisi Indonesia mencerminkan sejauh mana diplomasi budayanya, hingga saat ini, kurang dimanfaatkan. Namun Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara tetangganya di Asia—dan bahkan dengan merek-merek budaya populer Amerika yang telah lama berdiri—dengan memanfaatkan potensi budayanya sendiri yang sangat besar. Dalam gastronomi, negara kepulauan ini menawarkan beragam hidangan dan profil rasa yang tak tertandingi; dalam tekstil dan mode, Batik menyajikan kekayaan motif daerah; Dalam musik, instrumen seperti gamelan dapat menjadi dasar pencitraan merek yang khas.

Untuk mentransformasi aset-aset budaya ini menjadi instrumen soft power yang efektif, diperlukan perbaikan komprehensif di seluruh rantai nilai, mulai dari konsepsi awal hingga diseminasi global. Dengan latar belakang ini, studi ini akan mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil Pemerintah Indonesia untuk memadukan Batik, Gamelan, dan tradisi kuliner Indonesia ke dalam strategi soft power-nya, sehingga memposisikan bangsa sebagai kekuatan budaya yang berpengaruh dalam sistem internasional multipolar. Dengan demikian, diplomasi budaya Indonesia dapat menjadi lebih terarah, terukur, dan selaras secara strategis. Artikel ini disusun sebagai berikut. Kami memulai dengan pendahuluan dan tinjauan pustaka, diikuti dengan ikhtisar singkat kerangka kerja soft power yang memandu analisis kami. Selanjutnya, kami menjelaskan metodologi yang digunakan, menyajikan analisis dan pembahasan kami, dan menyimpulkan dengan temuan-temuan kunci dan rekomendasi kebijakan.

## **2. Diplomasi Budaya**

Dalam bukunya *Cultural Diplomacy and the United States Government: A Survey*, Milton C. Cummings mendefinisikan diplomasi budaya sebagai pertukaran gagasan, informasi, seni, dan ekspresi budaya lainnya antarbangsa dan masyarakatnya dengan tujuan menumbuhkan saling pengertian. Namun, Cummings juga mengakui bahwa proses ini tidak selalu berlangsung secara timbal balik; proses ini dapat berlangsung searah. Diplomasi budaya—yang dicirikan oleh pertukaran ekspresi kreatif yang menyenangkan—merupakan salah satu alat paling efektif dalam diplomasi. Sebagai contoh *soft power*, diplomasi budaya bergantung pada daya tarik dan persuasi melalui budaya, nilai-nilai, dan gagasan, sangat berbeda dengan *hard power* yang mengandalkan kekuatan militer secara koersif (Schneider, 2005). Schneider lebih lanjut menekankan pentingnya memahami konteks dan karakteristik audiens negara sasaran, karena setiap negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap tawaran budaya yang ditawarkan. Perhatian terhadap perbedaan ini penting untuk diplomasi budaya yang efektif, yang dapat berbentuk pameran, pertukaran, dan pertunjukan.

Pentingnya memahami negara sasaran, dengan mencatat bahwa diplomasi budaya—seperti diplomasi pada umumnya—dapat membentuk preferensi dan opini suatu negara, bahkan memengaruhi tindakannya. Melissen menambahkan dimensi penting lainnya: sebagai cabang dari diplomasi publik, diplomasi budaya tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga masyarakat sipil. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi diplomasi budaya.

## **3. Kekuatan Lunak**

*Soft power* suatu negara terutama bertumpu pada tiga sumber daya: budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negeri. Meskipun sumber daya ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk matang, secara tidak langsung mereka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesepakatan dan kebijakan yang diinginkan.

Negara yang menerapkan *soft power* memperoleh keuntungan ketika mitranya berada di bawah pengaruhnya. Secara politis, negara-negara lebih cenderung mengadopsi preferensi aktor yang nilai-nilainya mereka kagumi dan percayai. Pengaruh tersebut kemudian menghasilkan persetujuan terhadap norma-norma tertentu dan keanggotaan dalam lembaga-lembaga internasional pilihan, yang sejalan dengan tujuan negara *soft power*.

#### **4. Diplomasi Kebudayaan Indonesia**

Budaya sebagai instrumen soft power untuk memperkuat citra nasional dan meningkatkan hubungan internasional. Secara teoritis, diplomasi budaya membangun saling pengertian dan kerja sama antarnegara dengan memanfaatkan identitas dan nilai-nilai budaya suatu negara. Di era globalisasi, diplomasi budaya menjadi semakin strategis, berfungsi sebagai upaya yang disengaja untuk membentuk narasi positif tentang identitas nasional. Studi ini menggarisbawahi keragaman budaya Indonesia yang melimpah sebagai sumber daya yang ampuh untuk soft power, tetapi juga memperingatkan tantangan seperti bias budaya mayoritas dan kesulitan dalam membentuk narasi inklusif yang secara adil mewakili semua kelompok budaya. Untuk membangun citra yang harmonis dan toleran, kebijakan harus melibatkan pemerintah, diaspora, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya yang terkoordinasi. Diplomasi budaya sangat penting untuk memperkuat hubungan internasional dan mendukung agenda multilateral di tengah ketegangan geopolitik dan pandemi COVID-19. Sebagai tuan rumah KTT G20 2022, Indonesia menerapkan diplomasi budaya—melalui pertunjukan seni, pameran, dan forum pemangku kepentingan—untuk meredakan perpecahan di antara negara-negara anggota, khususnya terkait konflik Rusia-Ukraina. Para penulis juga menunjukkan bagaimana inisiatif-inisiatif budaya ini memfasilitasi pemulihan ekonomi pascapandemi dan memperkuat pariwisata, yang menunjukkan bahwa diplomasi budaya dapat memperkuat solidaritas global dan memajukan tujuan-tujuan G20 di masa krisis.

Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam diplomasi ekonomi dan budaya Indonesia. Mereka mengamati bahwa kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi praktik diplomasi, menjadikan media sosial sebagai alat kunci bagi diplomasi publik. Melalui platform ini, pemerintah dapat menyebarluaskan konten budaya secara cepat dan interaktif, melibatkan khalayak global secara langsung, dan memperkuat pesan diplomatik untuk mempercepat hasil yang diinginkan. Membandingkan diplomasi digital Indonesia dengan Amerika Serikat—yang sering dianggap sebagai pelopor dalam e-diplomasi—studi ini mengidentifikasi inersia birokrasi Indonesia, kekhawatiran atas efektivitas dan keamanan informasi, serta kebutuhan akan strategi komunikasi yang lebih canggih sebagai tantangan utama.

Meskipun studi-studi ini memberikan wawasan berharga, studi-studi ini juga mengungkap sebuah celah: kesenjangan antara cetak biru kebijakan Indonesia dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tindakan kebijakan yang dapat ditempuh Indonesia—dengan mengambil pelajaran dari dua praktisi soft power terkemuka di Asia—agar dapat lebih efektif memadukan Batik, Gamelan, dan tradisi kuliner Indonesia ke dalam perangkat soft power-nya, sehingga meningkatkan pengaruh budayanya dalam sistem internasional multipolar saat ini.

## 5. Babak Baru

Berakhirnya Perang Dingin menandai babak baru dalam sistem internasional. Dunia, yang pernah diwarnai persaingan bipolar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, bergeser menjadi tatanan unipolar di bawah dominasi AS. Transformasi ini juga mengubah lanskap diplomasi antarnegara: pendekatan "kekuatan keras" yang tradisional dan koersif digantikan oleh "politik rendah", di mana pengaruh diberikan melalui daya tarik dan persuasi—yaitu, kekuatan lunak—yang salah satu elemen utamanya adalah budaya. Seiring negara-negara beralih dari instrumen militer ke pendekatan lunak dalam hubungan luar negeri mereka, aktor-aktor terkemuka baru muncul di panggung dunia. Entitas seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan telah mencapai pengaruh yang luas melalui inisiatif diplomasi budaya yang berkelanjutan. Seperti negara-negara Asia lainnya, Indonesia memiliki kekayaan aset budaya yang, jika dimobilisasi secara optimal, dapat menghasilkan pengaruh yang sebanding. Untuk mewujudkan potensi ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah konkret—dimulai dengan merenungkan dan belajar dari keberhasilan Korea Selatan dan Jepang—dan menyempurnakan kebijakan diplomasi budayanya untuk memanfaatkan budaya sebagai komponen inti dari strategi soft power-nya.

### Pelajaran dari Jepang dan Korea Selatan

Jepang telah lama terkenal dengan animasinya (anime), yang memvisualisasikan tradisi komiknya (manga). Istilah "manga" pertama kali muncul pada tahun 1989 untuk menggambarkan buku Shiji Ada Yukikai. Menyadari popularitas manga yang semakin mendunia, pemerintah Jepang mendirikan Sekolah Seni Kartun dan Komik, yang didedikasikan untuk melatih seniman dan meningkatkan produksi manga. Selain manga dan anime, musik "J-Pop" dan drama televisi Jepang juga digunakan sebagai alat diplomasi budaya di bawah inisiatif Cool Japan, yang resmi diluncurkan pada tahun 2010. Di ranah kuliner, sejak tahun 2005 Jepang telah mempromosikan sushi sebagai instrumen soft power, didukung oleh sebuah organisasi nirlaba yang bertugas memasarkan restoran, bahan-bahan, dan teknik memasak Jepang ke luar negeri.

Demikian pula, pemerintah Korea Selatan telah aktif menggunakan budaya sebagai alat diplomatik sekaligus instrumen soft power. Diplomasi budaya Korea didorong oleh keinginan untuk menampilkan citra nasional yang modern dan berbudaya, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengamankan pengakuan global. Disebut sebagai Gelombang Korea—atau Hallyu—inisiatif ini mencakup program televisi, serial drama, film, musik, tari kontemporer, kuliner, pengajaran bahasa, permainan video, dan produk kecantikan (Jang & Paik dalam Islamiyah dkk., 2020). Fenomena Hallyu mendapatkan momentumnya selama Piala Dunia FIFA 2002, yang diselenggarakan bersama oleh Jepang dan Korea Selatan; setelah itu, drama Korea memasuki pasar Indonesia, diikuti oleh ekspansi global musik pop Korea (K-Pop) sejak tahun 2011 dan seterusnya.

Keberhasilan diplomasi budaya Korea Selatan mencerminkan perencanaan yang cermat dan sinergi aktif antara lembaga pemerintah dan aktor non-negara. Pusat Kebudayaan Korea (KCC), sebuah lembaga nirlaba di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, mempromosikan budaya Korea dan memfasilitasi pertukaran budaya di luar negeri. KCC merupakan bagian dari Layanan Kebudayaan dan Informasi Korea (KOCIS), yang didirikan pada Desember 1971 untuk menjadi badan penjangkauan budaya global Korea Selatan. Di antara berbagai inisiatif KCC adalah promosi hanbok, pakaian tradisional Korea.

## **6. Diplomasi Kebudayaan Indonesia dan Peluang Optimalisasinya**

Sejak 2004, Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan diplomasi budaya, terutama melalui upaya untuk mengamankan pengakuan warisan budaya takbenda. Mulai tahun itu, Kementerian Luar Negeri, bekerja sama erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Yayasan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Kedutaan Besar Indonesia di Paris, dan berbagai pemangku kepentingan domestik dan internasional, mengajukan batik untuk dicantumkan dalam Daftar Representatif Warisan Budaya Takbenda Kemanusiaan UNESCO. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya takbenda. Penetapan ini merupakan sumber kebanggaan nasional, yang mencerminkan kekayaan simbolisme batik—dari penanda status sosial hingga pembawa memori budaya—yang terus memperkuat identitas Indonesia.

Pengakuan UNESCO terhadap batik telah menghasilkan pertumbuhan hulu yang signifikan dalam industri batik domestik Indonesia. Antusiasme masyarakat untuk melestarikan tradisi batik telah mendorong ekspansi sektor ini, menjadikannya sumber pendapatan utama bagi masyarakat di 19 provinsi, dari Aceh hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris telah berperan aktif dalam mengawal proses nominasi sejak tahun 2004 hingga penetapan resminya di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009.

Untuk memperluas jangkauan budaya Indonesia di mancanegara, pemerintah mendirikan Rumah Budaya Indonesia (RBI) pada tahun 2012. Pusat-pusat RBI berfungsi sebagai tempat umum yang didedikasikan untuk memamerkan warisan budaya Indonesia kepada khalayak mancanegara. Melalui pertunjukan, lokakarya, dan pameran, RBI secara sistematis menyajikan, mengkaji, mengadvokasi, dan mempromosikan kekayaan budaya nusantara. Cabang-cabang RBI—yang berganti nama menjadi "Pusat Kebudayaan Indonesia"—telah diluncurkan di negara-negara mitra utama termasuk Jepang, Prancis, Amerika Serikat, Jerman, Australia, Myanmar, Singapura, Timor-Leste, dan Turki, yang biasanya berlokasi bersama kedutaan besar Indonesia atau di kota-kota strategis lainnya. Komitmen Indonesia

terhadap diplomasi budaya semakin ditunjukkan dengan menjadi tuan rumah Forum Kebudayaan Dunia di Bali pada tahun 2013. Forum tersebut menghasilkan “Janji Bali”, sebuah kesepakatan bersama untuk membangun dunia yang lebih beradab dan kaya budaya.

Terlepas dari pencapaian ini, diplomasi budaya Indonesia masih relatif kurang berkembang dibandingkan dengan inisiatif Cool Japan Jepang atau Hallyu Wave Korea Selatan. Tantangan utama meliputi ketidakpastian kebijakan, keterbatasan anggaran, dan kapasitas produksi konten budaya digital yang belum memadai. Untuk mengatasi kesenjangan ini, diplomasi budaya perlu lebih selaras dengan industri kreatif melalui sinergi yang diperkuat antara kementerian, diaspora, akademisi, seniman, dan sektor swasta. Platform digital—terutama YouTube—perlu dioptimalkan, termasuk produksi serial bertema budaya yang melibatkan animator lokal dalam proyek-proyek soft-power Indonesia yang lebih besar.

Upaya-upaya ini sejalan dengan Prioritas Nasional 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, sebagaimana diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyerukan peningkatan penyelenggaraan mega-acara budaya di luar negeri, promosi museum dan warisan budaya, serta inovasi digital (Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2020). Landasan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan: Pasal 35(1) mengamanatkan diplomasi budaya dan kerja sama internasional, merujuk juga pada Pasal 32(2)(d), sementara Pasal 43 menggarisbawahi pemanfaatan budaya sebagai media diplomasi internasional.

Meskipun Undang-Undang No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengizinkan pembentukan lembaga budaya dan persahabatan (Pasal 11(1) dan 12(1)), saat ini belum ada peraturan khusus yang mengukur capaian diplomasi budaya. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang atau peraturan pemerintah baru tentang diplomasi budaya—yang merinci cetak biru kebijakan jangka panjang, alokasi anggaran, dan kemampuan produksi konten digital—sangat krusial untuk mengubah warisan budaya Indonesia menjadi instrumen soft power yang efektif.

## **7. Batik, Gamelan, dan Masakan Nusantara Sebagai Trisula Unsur Budaya**

Pemerintah Indonesia telah lama menjadikan batik sebagai ujung tombak diplomasi budayanya. Setelah ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai Warisan Budaya Takbenda—sebuah upaya yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, Yayasan KADIN, Kedutaan Besar Indonesia di Paris, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya—batik tidak hanya menjadi simbol



identitas nasional tetapi juga aset soft power yang memiliki daya tarik global. Keberhasilan ini telah membuka jalan bagi festival-festival internasional dan perancangan cetak biru kebijakan jangka panjang terpadu yang menghubungkan industri kreatif dan platform digital.

Selain batik, orkes gamelan memainkan peran penting dalam diplomasi budaya Indonesia. Sebagai ansambel tradisional Jawa-Bali yang terdiri dari gong, kendang, metalofon, suling bambu, rebab, dan vokalis perempuan yang dikenal sebagai sindhen, gamelan telah menjadi bahasa musik universal. Diplomasi gamelan yang dicontohkan oleh Festival Gamelan Internasional perdana yang diselenggarakan di Inggris pada tahun 2017, telah menghasilkan niat baik, terlibat dengan isu-isu global, dan memperluas jangkauan budaya Indonesia. Melalui acara-acara IGF di London dan Glasgow, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menampilkan gamelan sebagai warisan yang hidup dan berkembang dalam dialog antarbudaya.

Di ranah kuliner, kuliner Indonesia menawarkan potensi soft power yang luar biasa. Rendang dari Sumatera Barat telah mencapai status ikonis, sementara Sate Klathak dari Yogyakarta, yang dikenal dengan suara "klathak" khasnya saat dipanggang, telah mulai memikat selera internasional. Promosi sushi oleh pemerintah Jepang sejak tahun 2005—melalui lembaga nirlaba khusus yang memasarkan restoran, bahan, dan teknik memasak di luar negeri—dan advokasi Korea Selatan terhadap kimchi, serta fenomena pizza global Italia, menggarisbawahi kapasitas makanan untuk menjalin ikatan emosional dan menumbuhkan persepsi positif yang langgeng, menjadikannya kendaraan yang sangat strategis bagi diplomasi lunak Indonesia.

## **8. Tantangan dan Risiko**

Dalam lingkungan multipolar saat ini, Indonesia menghadapi persaingan soft power yang semakin ketat dari inisiatif-inisiatif seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok, meluasnya Gelombang Korea (Hallyu), dan strategi Cool Japan Jepang. Lanskap persaingan yang semakin ketat ini menuntut Indonesia untuk merancang pendekatan diplomasi budaya yang lebih tepat, terfokus, dan adaptif secara regional. Meskipun Indonesia telah mempertahankan upaya yang konsisten, peringkatnya—ke-45 dengan skor 42,9 dari 100—dalam Indeks Soft Power Global 2025 menyoroti kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan negara-negara soft power terkemuka seperti Amerika Serikat (79,5) dan Tiongkok (72,8) (Kumar, 2025). Peringkat ini menunjukkan peluang yang luas untuk perbaikan, mulai dari memperkuat citra nasional hingga mengoptimalkan program-program budaya untuk dampak yang terukur.

Tantangan utamanya terletak pada keseimbangan antara pelestarian keaslian tradisional dan pengemasan unsur-unsur budaya agar menarik bagi khalayak global. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kerangka kerja

yang memungkinkan warisan budayanya diadaptasi untuk konsumsi internasional tanpa mengurangi esensinya. Selain itu, manajemen risiko yang ketat—terutama untuk mencegah apropriasi dan misrepresentasi budaya—harus menyertai setiap inisiatif diplomasi budaya, memastikan Indonesia menampilkan dirinya secara autentik dan penuh hormat di panggung dunia.

### Rekomendasi Strategis

Langkah awal yang krusial adalah pembentukan Satuan Tugas Diplomasi Kebudayaan Nasional, yang terdiri dari perwakilan dari seluruh kementerian terkait, lembaga kebudayaan, akademisi, diaspora, dan industri kreatif, yang bertugas menyusun strategi besar diplomasi kebudayaan Indonesia yang komprehensif dan dapat dieksekusi. Strategi ini harus dituangkan dalam nota kesepahaman antarkementerian yang formal dan didukung oleh sistem koordinasi dan pemantauan terpusat, yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap indikator kinerja bersama dan penyempurnaan kebijakan yang cepat. Bersamaan dengan itu, Indonesia harus mendirikan Pusat Kebudayaan Indonesia permanen di delapan negara prioritas—yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Jerman, Inggris, dan Australia—yang masing-masing berfungsi sebagai pusat khusus untuk mempromosikan batik, gamelan, kuliner Nusantara, dan aset budaya lainnya. Untuk melengkapi pos-pos fisik ini, pemerintah harus meluncurkan platform diplomasi digital terpadu—yang menampilkan pengalaman budaya virtual, pameran daring, dan program pendidikan digital—yang dapat melibatkan khalayak global secara efektif dan hemat biaya, terutama generasi muda yang telah mengenal teknologi digital.

Pada saat yang sama, diplomasi budaya harus sepenuhnya tertanam dalam arsitektur kebijakan luar negeri Indonesia dan selaras dengan inisiatif budaya ASEAN, sehingga dapat memanfaatkan kepemimpinan regional Indonesia untuk memajukan kepentingan nasional. Model pendanaan berkelanjutan—yang dibangun dalam kemitraan dengan ekonomi kreatif—akan mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dan mendorong ekosistem yang mandiri untuk program budaya. Mengambil pelajaran dari model Cool Japan dan Hallyu, Indonesia harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan alokasi anggaran yang transparan untuk diplomasi budaya, membandingkan pengeluaran dengan pengeluaran Jepang dan Korea Selatan untuk menggarisbawahi komitmen dan akuntabilitas. Terakhir, strategi media digital nasional harus mengedepankan "trisola" batik, gamelan, dan warisan kuliner, menjalin narasi spesifik daerah dan melibatkan bakat kreatif lokal—seperti studio animasi—dalam inisiatif konten berskala besar. Dengan menyelaraskan koordinasi tingkat tinggi, kehadiran fisik yang strategis, pembiayaan berkelanjutan, dan penjangkauan digital mutakhir, Indonesia dapat mengubah warisan budayanya yang kaya menjadi instrumen kekuatan lunak yang kuat di dunia multipolar.

## **9. Diplomasi**

Indonesia memiliki peluang signifikan untuk memanfaatkan batik, gamelan, dan warisan kulinernya sebagai instrumen soft power di tengah dinamika lanskap politik multipolar. Pelajaran yang dipetik dari keberhasilan Korea Selatan dan Jepang menggarisbawahi betapa pentingnya dukungan pemerintah yang komprehensif, koordinasi antarlembaga yang efektif, dan perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan potensi ini sepenuhnya, reformasi kelembagaan awal diperlukan, diikuti dengan pengembangan strategi diplomasi budaya yang holistik dan pembentukan model pembiayaan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan program tanpa ketergantungan yang berlebihan pada alokasi anggaran tahunan. Dengan menerapkan rekomendasi strategis ini—mulai dari pembentukan gugus tugas diplomasi budaya khusus dan pembentukan pusat-pusat kebudayaan di negara-negara prioritas hingga integrasi platform digital—Indonesia siap untuk meningkatkan peringkatnya dalam Indeks Soft Power Global dan memperkuat pengaruhnya di panggung internasional. Diplomasi budaya yang didasarkan pada batik, gamelan, dan kuliner daerah tidak hanya akan memamerkan kekayaan warisan nusantara tetapi juga memajukan tujuan nasional yang lebih luas di seluruh ranah ekonomi, politik, dan sosial.

### **C. MEMANFAATKAN BUDAYA NUSANTARA SEBAGAI SOFT POWER: MENINGKATKAN PENGARUH DIPLOMATIK INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBALISASI**

#### **1. Globalisasi Budaya Nusantara**

Globalisasi telah membawa perubahan mendasar dalam dinamika hubungan internasional, di mana batas-batas geografis dan politik tidak lagi menjadi satu-satunya penentu interaksi antarbangsa. Di era ini, kekuatan suatu negara tidak lagi ditentukan semata-mata oleh dominasi militer (hard power) atau kapasitas ekonomi (economic power), tetapi juga oleh kemampuannya membangun pengaruh melalui pendekatan yang lebih halus dan persuasif, yaitu soft power. Soft power adalah kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan yang sah secara moral dan internasional. Dalam praktiknya, soft power terbukti lebih efektif dan berkelanjutan karena dapat membangun kepercayaan dan meminimalkan konflik. Salah satu instrumen utama dalam soft power adalah budaya. Budaya berperan sebagai media komunikasi lintas bangsa yang melampaui bahasa dan ideologi. Menurut data dari Donaldson (2018), diplomasi budaya meningkatkan persepsi positif terhadap suatu negara dan mendorong hubungan bilateral yang lebih stabil dan terbuka. Negara-negara seperti Korea Selatan dengan K-Wave, Jepang dengan diplomasi Cool Japan, dan Tiongkok dengan Confucius Institute telah membuktikan bahwa budaya dapat menjadi sarana strategis untuk memperluas pengaruh global dan

membentuk opini publik internasional. Hallyu (Gelombang Korea) misalnya, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar USD 12,3 miliar pada tahun 2019 dan memperkuat citra negara tersebut secara global.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 18.810 pulau, 1.340 suku bangsa, dan lebih dari 700 bahasa daerah. Memiliki warisan budaya yang luar biasa kaya. Warisan ini meliputi tari, musik tradisional, tekstil, kuliner, dan ritual adat yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Hingga tahun 2024, Indonesia memiliki 12 warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO, meliputi batik, wayang, angklung, noken Papua, dan pencak silat. Hal ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap kekayaan budaya Nusantara sebagai bagian dari warisan peradaban dunia. Namun, pemanfaatan budaya Nusantara dalam diplomasi internasional masih belum optimal. Berbagai program diplomasi budaya yang dijalankan pemerintah, seperti Indonesia Channel, Art for Diplomacy, dan pameran budaya di luar negeri, masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam strategi politik luar negeri. Potensi ini sangat besar, tidak hanya dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara multikultural yang toleran dan dinamis, tetapi juga sebagai sarana untuk membina hubungan bilateral dan multilateral yang damai.

Selain menjadi aset simbolis, budaya Nusantara juga memiliki nilai strategis dalam membangun rasa kebersamaan global. Dalam konteks masyarakat internasional yang semakin terfragmentasi akibat konflik identitas, intoleransi, dan krisis global, diplomasi budaya berperan sebagai jembatan peradaban yang mengedepankan nilai-nilai keberagaman, harmoni, dan kerja sama, nilai-nilai yang menjadi inti falsafah hidup masyarakat Nusantara. Hal ini juga relevan dengan visi Indonesia dalam diplomasi luar negeri yang menitikberatkan pada prinsip politik bebas aktif dan perdamaian dunia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana budaya Nusantara dikonstruksi dan direpresentasikan sebagai soft power dalam kebijakan diplomasi budaya Indonesia? 2) Sejauh mana budaya Nusantara dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membangun pengaruh Indonesia di tingkat global? 3) Apa saja hambatan struktural dan epistemik yang menghambat efektivitas budaya Nusantara sebagai soft power Indonesia?

Sejalan dengan formulasi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi yang digunakan Indonesia dalam memanfaatkan budaya Nusantara sebagai instrumen soft power dalam konteks diplomasi internasional, antara lain melalui festival budaya, program pertukaran, pengakuan warisan budaya oleh UNESCO, dan diplomasi digital.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk representasi budaya Nusantara yang digunakan dalam praktik diplomasi, dan mengevaluasi sejauh mana representasi tersebut mencerminkan nilai-nilai substantif seperti pluralisme, kerjasama, dan keberlanjutan.
3. Mengevaluasi dampak pemanfaatan budaya Nusantara terhadap hubungan internasional Indonesia, terutama dalam memperkuat citra nasional, meningkatkan kerja sama multilateral, dan membangun solidaritas global.

4. Menguraikan tantangan struktural, simbolik, dan naratif yang dihadapi dalam upaya menjadikan budaya Nusantara sebagai soft power yang efektif dan berkelanjutan di panggung diplomasi global.
5. Memberikan rekomendasi strategis untuk integrasi kebijakan diplomasi budaya yang lebih sistematis, partisipatif, dan kontekstual dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.

Tiga studi terdahulu yang relevan dengan studi diplomasi budaya berbasis soft power menunjukkan fokus yang beragam tetapi memiliki keterbatasan tertentu dalam konteks negara berkembang multikultural seperti Indonesia. Pertama, Bagaimana warisan budaya tradisional dimobilisasi secara sistematis melalui kebijakan budaya nasional, seperti Cool Japan, yang telah berhasil membangun citra damai dan halus melalui simbol-simbol seperti Zen, seni, dan etiket sosial. Studi ini menekankan efektivitas pelebagaan budaya sebagai alat diplomatik tetapi terbatas pada konteks negara maju dengan struktur politik dan budaya yang terpusat dan homogen. Kedua, India menyoroti peran budaya populer, termasuk Bollywood, yoga, dan diaspora, sebagai bentuk soft power yang memperluas pengaruh India di ranah global. Meskipun memperkaya wacana tentang peran aktor non-negara, studi ini masih berfokus pada budaya standar. Studi ini tidak secara menyeluruh mengeksplorasi kompleksitas nilai-nilai budaya lokal India. Ketiga, Antara Pakistan dan Arab Saudi menunjukkan pendekatan soft power yang berbasis pada religiusitas dan simbol-simbol keagamaan, yang cenderung berfokus pada penyebaran nilai-nilai ideologis tertentu dan tidak mencerminkan pendekatan multikultural yang inklusif.

Ketiga studi ini memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana budaya dapat dimobilisasi untuk tujuan diplomatik, tetapi secara kolektif masih menyisakan beberapa kesenjangan yang signifikan. Pertama, belum ada studi yang secara khusus membahas negara-negara berkembang dengan keragaman internal yang ekstrem, seperti Indonesia, sebagai objek studi utama. Kedua, studi-studi ini cenderung menyoroti satu jenis ekspresi budaya yang dominan (tradisi, budaya pop, atau agama) dan belum mengembangkan kerangka teoritis yang dapat menjelaskan diplomasi budaya sebagai proses naratif multivokal yang mencerminkan pluralitas. Ketiga, belum ada diskusi mendalam tentang bagaimana budaya tidak hanya direpresentasikan sebagai pertunjukan, tetapi juga dibaca sebagai sistem nilai dan narasi ideologis yang dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam kebijakan luar negeri. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji potensi budaya Nusantara sebagai bentuk kekuatan lunak multikultural dalam diplomasi internasional Indonesia. Studi ini tidak hanya menyoroti ekspresi budaya, seperti seni pertunjukan, bahasa, dan simbol-simbol tradisional, tetapi juga mengkaji nilai-nilai substansial, termasuk kerja sama, harmoni ekologis, dan inklusivitas, yang melekat dalam budaya lokal dan berpotensi membentuk dasar bagi narasi global Indonesia. Di sisi lain, studi ini juga menyoroti tantangan kelembagaan dan naratif yang menyebabkan strategi diplomasi budaya Indonesia kurang optimal. Melalui pendekatan kritis dan analisis konten terhadap kebijakan, praktik, dan representasi budaya, studi ini bertujuan untuk menyusun peta strategi integratif

yang memposisikan budaya tidak hanya sebagai komoditas estetika, tetapi juga sebagai instrumen politik simbolis yang mampu membangun solidaritas lintas negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik global.

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatannya yang multikultural, kontekstual, dan strategis. Penelitian ini memandang budaya Nusantara bukan sekadar kumpulan ekspresi budaya lokal, melainkan sebagai kesatuan diplomatik yang mencerminkan identitas kolektif bangsa Indonesia yang plural dan inklusif. Pendekatan ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada satu bentuk budaya dominan; sebaliknya, penelitian ini mengakui keberagaman sebagai kekuatan simbolis yang dapat diartikulasikan dalam narasi diplomatik lintas batas. Selain itu, penelitian ini menawarkan pembacaan yang berbasis nilai dan kritis, yang menggeser fokus dari budaya sebagai objek visual atau performatif menjadi budaya sebagai sistem makna yang sarat dengan nilai-nilai ideologis seperti kerja sama, harmoni ekologis, dan toleransi sosial. Budaya diposisikan bukan sekadar untuk konsumsi estetika, melainkan sebagai narasi strategis yang dapat menjawab tantangan global kontemporer. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan budaya ke dalam kerangka kebijakan luar negeri Indonesia secara substansial. Dalam hal ini, budaya tidak lagi dipandang sebagai pelengkap pariwisata atau citra nasional, melainkan sebagai instrumen politik simbolis yang berperan krusial dalam memperkuat diplomasi multilateral, memupuk solidaritas internasional, dan membentuk citra Indonesia sebagai negara yang damai dan progresif yang berakar pada nilai-nilai lokal. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperluas kerangka konseptual diplomasi budaya dari perspektif negara berkembang yang multikultural, serta menyediakan landasan strategis untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih inklusif dan berkelanjutan berdasarkan kekuatan naratif budaya nasional.

## **2. Ciri-Ciri Budaya Nusantara**

Budaya Nusantara dicirikan oleh kekayaan simbolis dan struktural yang tidak hanya mencerminkan identitas kolektif bangsa, tetapi juga membentuk fondasi epistemik bagi pembangunan soft power yang kontekstual dan berdaya saing global. Namun, untuk menjadikan budaya sebagai instrumen soft power yang efektif, dibutuhkan lebih dari sekadar pengakuan atas keberagamannya. Yang dibutuhkan adalah interpretasi strategis atas nilai-nilai yang terkandung dalam budaya tersebut dan upaya sistematis untuk memposisikannya sebagai sumber daya diplomatik yang memiliki koherensi naratif dan daya tarik universal.

Salah satu kekuatan fundamental budaya Nusantara adalah pluralitasnya. Lebih dari tujuh ratus bahasa daerah, ratusan kelompok etnis, dan ribuan ekspresi seni lokal menjadikan Indonesia salah satu negara dengan keragaman budaya tertinggi di dunia. Dari perspektif soft power, pluralitas ini merupakan aset simbolis yang memungkinkan Indonesia mengartikulasikan narasi toleransi, inklusivitas, dan harmoni antarbudaya. Namun, keberagaman ini bukannya tanpa masalah. Jika tidak dipetakan dan dipelihara secara sistematis dalam kerangka kebijakan budaya yang strategis, pluralitas dapat menjadi

simbol-simbol yang terfragmentasi dan kehilangan daya representasinya di mata masyarakat internasional.

Analisis praktik diplomasi budaya Indonesia menunjukkan bahwa kekayaan budaya seringkali disajikan dalam bentuk performatif yang bersifat seremonial dan estetis, namun minim eksplorasi nilai-nilai substantif yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, pengenalan Tari Saman, Batik, atau Angklung di forum internasional tidak selalu diiringi narasi ideologis tentang makna kolektivisme, spiritualitas lokal, atau ekologi sosial yang melekat dalam praktik-praktik tersebut. Kekuatan soft power tidak terletak pada objek budaya itu sendiri, melainkan pada kemampuan negara untuk mengemasnya sebagai representasi nilai-nilai yang relevan secara global. Ketika narasi nilai gagal dibangun, objek budaya hanya menjadi komoditas eksotis yang kehilangan dimensi diplomatiknya.

Lebih lanjut, potensi budaya Nusantara belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat refleksi atas tantangan global kontemporer. Dalam praktik terbaik soft power, budaya tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan identitas nasional tetapi juga sebagai kontribusi bagi wacana etika global, seperti keberlanjutan lingkungan, kesetaraan gender, dan perdamaian sosial. Jepang, misalnya, telah berhasil menarasikan estetika wabi-sabi sebagai nilai kesederhanaan dan harmoni dengan alam dalam menghadapi krisis ekologi global. Dalam konteks ini, budaya Nusantara, termasuk kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan hutan dan filosofi "Tri Hita Karana" dari Bali, berpotensi untuk dimanfaatkan dalam wacana internasional tentang pembangunan berkelanjutan. Namun, potensi tersebut masih jarang diartikulasikan secara eksplisit dalam strategi budaya luar negeri Indonesia.

Di sisi lain, pengakuan UNESCO atas berbagai warisan budaya Indonesia menghadirkan peluang strategis yang belum sepenuhnya dikembangkan. Batik, keris, noken, dan pencak silat memang telah meraih status internasional, tetapi legitimasi ini seringkali hanya sebatas simbolis tanpa menjadi dasar kebijakan diplomasi budaya jangka panjang. Belum ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pengakuan ini dimanfaatkan untuk memperluas kerja sama budaya strategis atau memperkuat posisi geopolitik regional Indonesia melalui dimensi simbolis. Di sinilah letak kebutuhan akan pendekatan baru dalam membaca karakteristik budaya Nusantara, bukan hanya sebagai warisan, melainkan sebagai modal ideologis yang dapat dimobilisasi dalam strategi hubungan luar negeri.

Dengan demikian, karakteristik budaya Nusantara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sumber kebanggaan nasional, melainkan juga harus dipandang sebagai aset diskursif yang berpotensi membentuk persepsi, memengaruhi nilai-nilai, dan menciptakan hubungan emosional yang berdampak pada hubungan internasional. Namun, potensi ini baru dapat terwujud jika negara tidak berhenti pada tataran representasi permukaan, melainkan bergerak ke tahap pelebagaan narasi, penyusunan strategi komunikasi budaya lintas konteks, dan integrasi kebijakan luar negeri dengan kapasitas para pelaku budaya. Dalam kerangka ini, pendekatan budaya sebagai soft power mensyaratkan redefinisi posisi budaya, bergeser dari sekadar objek

warisan menjadi instrumen politik simbolis yang terstruktur secara reflektif, adaptif, dan strategis.

### Sejarah Pemanfaatan Budaya dalam Diplomasi Indonesia

Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menjadikan budaya sebagai elemen kunci dalam membentuk citra dan pengaruhnya di kancah internasional. Pilihan ini tak lepas dari kesadaran politik awal bahwa, sebagai negara baru di tengah sistem internasional yang sedang mencari keseimbangan pascaperang, Indonesia perlu memanfaatkan kekuatan lunak (soft power) untuk memperkenalkan diri kepada dunia dan meraih legitimasi global. Dalam konteks ini, budaya menjadi kanal strategis yang digunakan untuk menegaskan eksistensi dan jati diri nasional Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, dan kaya akan warisan peradaban.

Praktik diplomasi budaya Indonesia dapat ditelusuri kembali ke tahun 1950-an, ketika pemerintah secara aktif mengirimkan misi seni ke luar negeri sebagai bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di forum internasional. Salah satu contoh penting adalah partisipasi Indonesia dalam Festival Indonesia di Amerika Serikat pada tahun 1953, yang menampilkan seni pertunjukan tradisional, kerajinan tangan, dan batik untuk publik Amerika. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengirimkan kelompok tari dan musik ke negara-negara Eropa Timur, Asia, dan Afrika sebagai bagian dari diplomasi non-blok dan solidaritas anti-kolonial.

Momen bersejarah penting dalam penguatan diplomasi kebudayaan Indonesia adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Dalam konferensi ini, selain agenda politik, Indonesia juga menyelenggarakan pameran seni dan pertunjukan budaya sebagai bentuk komunikasi simbolis kepada masyarakat internasional. Keterlibatan seniman seperti Affandi dan penampilan berbagai seni pertunjukan tradisional menjadi bagian dari strategi kebudayaan untuk menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya negara politik, tetapi juga bangsa yang berperadaban tinggi (Heryanto, 2008). Konferensi ini menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan telah menjadi instrumen yang ampuh untuk menyampaikan pesan tentang nilai-nilai kebangsaan, solidaritas, dan identitas Dunia Ketiga.

Pada masa Orde Baru, pendekatan diplomasi budaya mengalami perubahan signifikan. Pemerintah mengadopsi strategi budaya yang lebih kohesif, berpusat pada narasi pembangunan dan stabilitas politik. Budaya diposisikan sebagai simbol harmoni sosial dan kebanggaan nasional yang dapat memperkuat citra Indonesia di luar negeri sebagai negara yang stabil dan berkembang. Salah satu kebijakan yang menandai tonggak sejarah pada periode ini adalah Program Misi Kebudayaan, yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Namun, pendekatan Orde Baru juga dikritik karena kecenderungannya untuk berfokus pada budaya yang telah "distandarisasi" oleh negara dan mengecualikan ekspresi budaya yang dianggap tidak konsisten dengan narasi resmi. Hal ini menyebabkan reduksi makna budaya menjadi sekadar alat untuk memvisualisasikan harmoni, alih-



alih ruang untuk dialog atau kritik sosial. Budaya Indonesia selama periode ini bersifat top-down dan terlalu berfokus pada estetika yang dapat diterima oleh elit politik dan pasar internasional, sementara mengabaikan keragaman makna budaya lokal. Pasca reformasi, diplomasi kebudayaan Indonesia mengalami reorientasi. Negara mulai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi aktor non-negara, termasuk komunitas seni, diaspora, pelaku industri kreatif, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu tonggak penting dalam fase ini adalah penyelenggaraan Festival Indonesia di berbagai ibu kota dunia, seperti "Wonderful Indonesia" dan "Pekan Budaya Indonesia", yang tidak hanya menampilkan pertunjukan seni tetapi juga dialog budaya, lokakarya, dan forum kerja sama antarbudaya.

Selain itu, kebijakan promosi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) juga merupakan bagian dari strategi diplomasi budaya. Hingga tahun 2023, terdapat lebih dari 150 lembaga pendidikan BIPA di berbagai negara, termasuk Australia, Vietnam, dan Belanda, sebagai bagian dari promosi sistematis bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa, sebagai bagian dari budaya, tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan sistem simbolik, tetapi juga untuk memperluas pengaruh epistemik Indonesia dalam ranah akademik dan diplomatik global. Dengan demikian, sejarah diplomasi budaya Indonesia menunjukkan kontinuitas yang signifikan, tetapi juga menyoroti perlunya pendekatan baru yang lebih reflektif, partisipatif, dan strategis. Budaya bukan hanya alat untuk mengenali identitas, tetapi juga harus diartikulasikan sebagai sumber daya politik simbolik yang mewakili nilai-nilai dan visi Indonesia di dunia yang terus berubah.

### **3. Dampak Budaya Nusantara sebagai Soft Power dalam Memperkuat Hubungan Internasional**

Kebudayaan telah diorientasikan kembali dari sekadar warisan simbolis menjadi sumber daya strategis dalam membentuk pengaruh global. Dalam kerangka diplomasi kontemporer, soft power memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi, memengaruhi opini publik, dan memperkuat hubungan antarnegara tanpa bergantung pada paksaan militer atau tekanan ekonomi. Indonesia, negara dengan keragaman budaya yang luar biasa, memiliki potensi yang signifikan untuk menjadikan kebudayaan Nusantara sebagai instrumen soft power yang dapat memperkuat hubungan internasional dalam berbagai dimensi, mulai dari perdamaian dan kerja sama ekonomi hingga pembentukan solidaritas global. Peran kebudayaan dalam mendorong diplomasi perdamaian tampak jelas dalam kontribusinya terhadap stabilitas regional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nilai-nilai budaya Nusantara, seperti kerja sama, toleransi, dan musyawarah, selaras dengan prinsip-prinsip normatif ASEAN yang menekankan non-intervensi, konsensus, dan harmoni. Nilai-nilai ini tidak hanya tercermin dalam narasi lokal tetapi juga telah menjadi bagian integral dari praktik diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik regional melalui cara-cara damai. Misalnya, kontribusi Indonesia dalam memediasi konflik di Filipina Selatan melalui Diplomasi Jalur Budaya yang berbasis pada pendekatan nilai lokal diterima lebih positif daripada

intervensi formal berbasis militer. Pendekatan budaya dalam konteks ini tidak hanya menumbuhkan kepercayaan di antara para aktor, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif, terutama di komunitas yang sensitif terhadap isu-isu agama dan identitas etnis.

Lebih lanjut, budaya Nusantara juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kerja sama ekonomi dan sosial. Pariwisata budaya merupakan sektor kunci ekonomi kreatif, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan mendorong hubungan bilateral. Pada tahun 2019, sektor pariwisata berkontribusi lebih dari 4,2% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, sebelum pandemi COVID-19. Produk budaya, seperti batik, keris, dan ukiran Jepara, tidak hanya menjadi simbol identitas tetapi juga komoditas ekspor unggulan yang memperkuat hubungan perdagangan. Ekspor batik Indonesia ke negara-negara mitra, seperti Jepang, Belanda, dan Korea Selatan, telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa produk budaya tidak hanya menjadi instrumen diplomasi simbolis tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang nyata.

Di luar aspek ekonomi, kerja sama budaya juga memfasilitasi penguatan hubungan sosial antarbangsa. Program pertukaran pelajar, pelatihan seniman, dan festival budaya internasional, seperti Festival Indonesia di Belanda atau Ennichi Sai di Jepang, berfungsi sebagai platform diplomasi budaya yang mempertemukan warga negara dari berbagai negara dalam suasana kolaboratif. Kerja sama budaya lintas negara meningkatkan saling pengertian dan mengurangi kecenderungan stereotip internasional. Dalam konteks Indonesia, diplomasi budaya melalui misi seni atau rumah budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia telah mempromosikan citra positif negara sebagai aktor yang terbuka dan damai, sekaligus memperkuat jaringan sosial yang berdampak pada kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, dan kemasyarakatan.

Selain fungsi ekonomi dan sosialnya, budaya Nusantara juga memiliki daya transformatif dalam membangun rasa kebersamaan antarnegara. Di dunia global yang semakin dirundung fragmentasi identitas dan konflik nilai, budaya dapat menjadi titik temu untuk menumbuhkan kesadaran bersama yang melampaui perbedaan. Konsep-konsep lokal, seperti "Bhinneka Tunggal Ika", yang mewujudkan filosofi persatuan dalam keberagaman, telah menjadi narasi yang memiliki resonansi universal, terutama di tengah meningkatnya intoleransi global. Ketika budaya Nusantara disampaikan melalui media internasional, seperti film, seni pertunjukan, atau diplomasi publik digital, ia membawa pesan tentang pentingnya keberagaman, toleransi, dan rasa hormat terhadap kemanusiaan yang dapat diterima oleh masyarakat global tanpa merasa terancam oleh dominasi nilai-nilai asing. Diplomasi yang sukses ditandai dengan kemampuan untuk menghasilkan resonansi nilai antara negara pengirim dan penerima.

Namun, untuk menjadikan budaya Nusantara sebagai instrumen soft power yang benar-benar efektif, diperlukan konsolidasi kebijakan nasional dan internasional yang lebih terstruktur. Saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia

belum sepenuhnya mengintegrasikan strategi budaya ke dalam kerangka diplomasi yang lebih luas. Meskipun terdapat lembaga seperti Badan Ekonomi Kreatif dan Direktorat Jenderal Kebudayaan, koordinasi antarlembaga dan keberlanjutan program budaya asing masih terbatas. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, yang memiliki Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea (KOCIS) dan strategi ekspor budaya yang terukur, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur budaya yang mendukung diplomasi jangka panjang.

Dengan demikian, budaya Nusantara memiliki dampak multidimensi dalam memperkuat hubungan internasional. Budaya ini berkontribusi pada perdamaian kawasan melalui pendekatan normatif berbasis nilai, memperkuat kerja sama ekonomi melalui industri kreatif, dan membangun rasa kebersamaan global melalui narasi inklusif. Namun, agar semua potensi tersebut dapat terwujud secara optimal, negara perlu menempatkan budaya dalam kerangka strategis yang tidak hanya berbasis representasi simbolis, tetapi juga dirancang secara terstruktur sebagai bagian dari politik luar negerinya. Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan sensitif terhadap simbol dan narasi, budaya bukan lagi pelengkap, melainkan menjadi fondasi hubungan internasional yang paling tangguh dalam menghadapi ujian waktu.

### **Tantangan dalam Pemanfaatan Budaya Nusantara sebagai Soft Power**

Meskipun budaya Nusantara menyimpan kekayaan simbolis dan historis yang luar biasa, transformasinya menjadi instrumen soft power dalam diplomasi internasional tidak lepas dari berbagai hambatan struktural, epistemik, dan simbolis, baik internal maupun eksternal. Tantangan-tantangan tersebut meliputi posisi Indonesia dalam lanskap budaya global, ketahanan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus modernisasi, dan ketimpangan representasi budaya Indonesia dalam wacana global. Untuk memahami dinamika tersebut secara mendalam, perlu dipetakan aspek-aspek strategis yang menghambat optimalisasi budaya sebagai soft power dalam hubungan internasional. Salah satu tantangan paling mendasar adalah dominasi soft power oleh negara-negara besar, yang menempatkan budaya Indonesia pada posisi kompetitif yang kurang menguntungkan.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah membangun ekosistem kekuatan lunak berbasis budaya yang sangat mapan. Amerika memanfaatkan industri hiburan, seperti Hollywood, musik pop, dan media digital, untuk menyebarkan nilai-nilai liberalisme, individualisme, dan gaya hidup modern. Korea Selatan, melalui strategi pemerintahan yang sistematis sejak tahun 1990-an, telah berhasil membangun "Gelombang Korea" sebagai kekuatan simbolis transnasional yang tidak hanya meningkatkan citra negara tetapi juga mendorong ekspor ekonomi kreatif dan investasi asing. Jepang, dengan pendekatan budaya populernya seperti anime, manga, dan desain arsitektur, telah membentuk persepsi global yang

menciptakan citra kekuatan lunak yang terkait dengan modernitas dan teknologi.

Berbeda dengan negara-negara tersebut, strategi diplomasi budaya Indonesia masih sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia masih kekurangan lembaga yang secara khusus menangani diplomasi budaya global dengan struktur organisasi, pendanaan, dan misi yang konsisten. Sementara negara-negara lain memiliki lembaga seperti Korea Foundation, Japan Foundation, atau British Council, Indonesia masih bergantung pada inisiatif sporadis dari kementerian terkait atau peran Kedutaan Besar Indonesia yang terbatas dalam hal sumber daya dan jangkauan.

Tantangan kedua terletak pada pelestarian dan transmisi budaya Nusantara di tingkat domestik. Di tengah globalisasi dan tekanan dari budaya populer internasional, banyak warisan budaya lokal mengalami erosi nilai dan kehilangan relevansi dalam komunitas mereka. Sekitar 11% dari 718 bahasa daerah di Indonesia berada dalam kondisi kritis dan terancam punah. Seni tradisional, seperti wayang, tari daerah, dan musik etnik, juga mengalami penurunan drastis dalam partisipasi di kalangan generasi muda karena kurangnya kurikulum pendidikan budaya yang adaptif. Dalam konteks soft power, ini menciptakan paradoks karena budaya yang dipromosikan ke dunia luar mengalami dislokasi makna dan pemutusan internal di dalam negeri. Sementara negara-negara lain dapat membingkai budaya tradisional dalam format modern dan global, Indonesia masih dibatasi dalam proses menata kembali budaya yang dapat diterima secara universal tanpa kehilangan identitas lokalnya.

Ketiga, terdapat permasalahan dalam pengelolaan narasi dan representasi budaya Indonesia di kancah internasional. Citra Indonesia di luar negeri seringkali masih terbatas pada simbol-simbol tertentu, seperti Bali, batik, dan gamelan. Di saat yang sama, kompleksitas budaya Indonesia bagian timur, kearifan masyarakat adat, dan keberagaman Islam Nusantara belum banyak mendapat perhatian global. Representasi yang sempit ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya strategi komunikasi budaya yang komprehensif dan keberlanjutan dalam mempromosikan budaya Indonesia, baik secara digital maupun diplomatis. Persepsi internasional terhadap budaya Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, dengan skor yang lebih rendah dalam aspek-aspek seperti keakraban, relevansi, dan kekaguman.

Selain itu, tantangan lainnya adalah stereotip dan kesalahpahaman budaya yang muncul di negara asing. Dalam beberapa kasus, budaya Indonesia sering disalahartikan sebagai eksotis, primitif, atau hanya berorientasi pada pariwisata. Kesalahpahaman ini melemahkan posisi budaya sebagai media diplomasi karena tidak mencerminkan nilai-nilai substantif yang melekat dalam budaya Nusantara, seperti demokrasi lokal, keberlanjutan ekologis, dan pluralitas sosial. Representasi budaya yang tidak didukung oleh narasi nilai dapat terjebak dalam konsumsi budaya yang dangkal, tanpa menghasilkan efek

diplomasi yang mendalam. Oleh karena itu, kekuatan lunak berbasis budaya membutuhkan rekonstruksi narasi yang strategis, bukan sekadar seremonial.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya Indonesia belum sepenuhnya dikembangkan sebagai strategi kebijakan luar negeri yang koheren. Ketiadaan lembaga khusus, lemahnya digitalisasi budaya, kurangnya investasi dalam pelestarian budaya lokal, dan masih dominannya narasi eksotis dalam promosi budaya merupakan permasalahan yang saling terkait dan harus ditangani melalui pendekatan lintas sektor. Strategi promosi budaya yang efektif tidak hanya bergantung pada festival atau pameran seni; melainkan harus mengintegrasikan dimensi nilai, relevansi kontemporer, dan keberlanjutan makna.

Dengan demikian, tantangan dalam memposisikan budaya Nusantara sebagai kekuatan lunak bersumber dari ketidakseimbangan infrastruktur diplomasi budaya, kerentanan budaya lokal dalam menghadapi globalisasi, dan ketiadaan narasi agung budaya Indonesia yang mampu beresonansi dalam konteks global. Tanpa perbaikan strategis dan pembentukan lembaga yang berfokus pada pengelolaan kekuatan lunak secara terstruktur, potensi budaya Indonesia akan terus mengalami keterbatasan dalam menjangkau dan memengaruhi wacana internasional.

### **Strategi Diplomasi Kebudayaan Indonesia dalam Hubungan Internasional**

Diplomasi budaya Indonesia telah berkembang dalam konteks kebijakan luar negeri yang menekankan prinsip-prinsip multikulturalisme bebas dan aktif, serta kerja sama Selatan-Selatan. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan diplomasi budaya konvensional, kerja sama multilateral, dan kanal digital untuk memperluas pengaruh budayanya secara global. Strategi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengartikulasikan kekuatan lunak Indonesia dalam menciptakan citra sebagai negara yang damai, berbudaya, dan toleran.

Salah satu instrumen utama diplomasi budaya Indonesia adalah penyelenggaraan festival budaya, pertunjukan seni tradisional, serta program pertukaran pelajar dan seniman. Sebagai contoh, kegiatan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (IACS) yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri sejak 2003 secara konsisten mengundang generasi muda dari berbagai negara untuk mengikuti pelatihan budaya di Indonesia. Program ini telah menciptakan komunitas alumni global yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya Indonesia dan berpotensi menjadi aktor informal diplomasi publik. Selain itu, keikutsertaan Indonesia dalam World Expo, Festival Indonesia di berbagai negara seperti Rusia, Jepang, dan Afrika Selatan, serta program pertukaran budaya dengan negara-negara anggota ASEAN, merupakan sarana untuk memperkenalkan warisan budaya Nusantara kepada khalayak internasional dalam konteks yang lebih formal dan strategis.

Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pendekatan ini masih sporadis dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kerangka kebijakan diplomasi budaya yang konsisten. Ketiadaan peta jalan jangka panjang dan koordinasi antarlembaga telah menyebabkan diplomasi budaya Indonesia menjadi reaktif dan bergantung pada momentum tertentu. Hal ini membuat nilai-nilai budaya yang ditampilkan di forum internasional rentan kehilangan koherensi dan signifikansi politiknya, serta lebih tampak sebagai pertunjukan simbolis daripada representasi strategis identitas nasional.

Di kancah internasional, keterlibatan Indonesia dalam organisasi seperti UNESCO, ASEAN, dan OKI telah menjadi platform penting bagi kemajuan diplomasi budaya. Hingga tahun 2023, Indonesia telah berhasil mendaftarkan 12 unsur budaya tak benda ke dalam daftar UNESCO, antara lain Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Pantun (2020). Pengakuan ini memposisikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kontribusi tinggi terhadap pelestarian warisan budaya dunia, sekaligus memperkuat legitimasi internasionalnya sebagai aktor yang mempromosikan keberagaman budaya dan nilai-nilai harmoni sosial. Dalam konteks ASEAN, Indonesia juga mempromosikan inisiatif Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN 2025, yang berisi komitmen bersama untuk memperkuat integrasi budaya di kawasan Asia Tenggara.

Namun, partisipasi dalam forum multilateral belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana transformasi citra dan pengaruh global. Diplomasi budaya yang efektif tidak hanya membutuhkan representasi simbolis, tetapi juga narasi normatif yang menghubungkan budaya dengan isu-isu global seperti keberlanjutan, inklusi sosial, dan pembangunan perdamaian. Dalam konteks ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjadikan budaya bukan hanya sebagai warisan, tetapi juga kontribusi aktif bagi peradaban dunia yang pluralistik dan dinamis.

Seiring dengan transformasi digital, Indonesia mulai mengeksplorasi dimensi baru diplomasi budaya melalui media sosial dan platform digital. Kanal-kanal seperti YouTube, Instagram, dan TikTok digunakan oleh Kementerian Luar Negeri, diaspora, dan pelaku industri kreatif untuk menyebarkan konten budaya Indonesia dalam format yang lebih inklusif dan mudah diakses. Contoh nyatanya adalah kampanye “Wonderful Indonesia”, yang tidak hanya menampilkan keindahan lanskap geografisnya tetapi juga memperkenalkan unsur-unsur budaya seperti tari, musik, makanan tradisional, dan bahasa daerah melalui narasi yang menarik secara visual. Digitalisasi ini menandai transisi penting dari diplomasi budaya berbasis kehadiran fisik menuju diplomasi publik berbasis jaringan.

Keberhasilan diplomasi budaya digital sangat bergantung pada kualitas konten, relevansi narasi budaya dengan isu-isu global, dan keterlibatan aktif audiens (Grincheva, 2024). Banyak konten budaya Indonesia di ranah digital masih berorientasi pada pariwisata, kurang memiliki penjelasan yang mendalam tentang nilai-nilai atau makna budaya. Diplomasi budaya yang efektif membutuhkan konstruksi narasi yang dapat menghubungkan budaya

lokal dengan wacana global, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan toleransi antaragama.

Dengan demikian, strategi diplomasi budaya Indonesia telah mencakup berbagai dimensi, mulai dari pertunjukan langsung dan kerja sama multilateral hingga platform digital. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara untuk membangun narasi budaya yang koheren, strategis, dan kontekstual. Integrasi ekspresi budaya dengan tujuan kebijakan luar negeri akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat menjadikan budayanya sebagai kekuatan lunak sejati yang berpengaruh secara global.

#### **4. Potensi Budaya Nusantara**

Budaya Nusantara memiliki potensi yang signifikan sebagai instrumen soft power dalam meningkatkan pengaruh diplomatik Indonesia di kancah global. Sebagai bangsa multikultural dengan warisan budaya yang kaya dan beragam, Indonesia memiliki modal simbolis dan naratif yang kuat untuk membangun citra sebagai negara yang inklusif dan damai yang berakar pada nilai-nilai kolektif seperti kerja sama, harmoni ekologis, dan toleransi. Namun, pemanfaatan budaya Nusantara dalam praktik diplomasi masih menghadapi beberapa tantangan. Strategi diplomasi budaya Indonesia cenderung belum terkoordinasi secara sistematis, masih bersifat simbolis dan estetis, serta belum terintegrasi ke dalam politik luar negeri sebagai bagian dari visi strategis nasional. Representasi budaya yang muncul di ruang internasional masih terbatas pada simbol-simbol tertentu dan belum secara akurat mencerminkan keberagaman budaya bangsa secara keseluruhan. Lebih lanjut, kurangnya lembaga yang berdedikasi untuk menangani diplomasi budaya secara konsisten dan struktural melemahkan kemampuan negara untuk memanfaatkan budaya sebagai soft power yang efektif dan berkelanjutan.

Meskipun studi ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membingkai budaya Nusantara sebagai aset diskursif dalam kebijakan luar negeri, beberapa keterbatasan perlu diakui. Pertama, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, berbasis studi literatur, sehingga tidak mencakup data lapangan empiris atau wawancara langsung dengan para pelaku diplomasi budaya. Kedua, fokus studi ini masih terbatas pada konstruksi naratif dan strategi kelembagaan, tanpa mengkaji dampak konkret diplomasi budaya terhadap persepsi publik internasional atau hubungan bilateral secara terukur. Ketiga, meskipun menekankan pendekatan multikultural, studi ini belum secara spesifik membedah representasi budaya dari wilayah-wilayah non-dominan di Indonesia, seperti wilayah timur atau komunitas adat yang lebih marginal.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan ini, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk melakukan eksplorasi lapangan melalui studi kasus empiris di perwakilan diplomatik Indonesia (KBRI/KJRI), komunitas diaspora, atau festival budaya internasional untuk mengukur dampak aktual strategi

diplomasi budaya Indonesia. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas narasi budaya dalam meningkatkan pencitraan bangsa, memperluas kerja sama strategis, atau membentuk opini publik internasional. Selain itu, penting juga untuk mengeksplorasi representasi budaya dari daerah-daerah yang selama ini kurang terekspos dalam diplomasi Indonesia, untuk membangun narasi budaya yang lebih inklusif, adil, dan representatif terhadap identitas nasional yang pluralistik.

## **D. EKONOMI KREATIF**

### **NUSANTARA GOES GLOBAL: PETA JALAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI UKM KREATIF INDONESIA MENGGUNAKAN AGILE PROJECTPENGELOLAAN**

Industri kreatif Indonesia, mulai dari fesyen dan kerajinan hingga animasi dan media digital, memiliki kemampuan untuk bersaing secara global. Namun, bagi banyak usaha kecil dan menengah, memasuki pasar internasional tetap menjadi tantangan besar. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya kreativitas, melainkan kurangnya struktur dalam hal pengembangan bisnis dan pengelolaan kompleksitas memasuki pasar baru. Makalah ini memperkenalkan peta jalan yang fleksibel untuk membantu UKM kreatif Indonesia berekspansi secara internasional, dengan menggabungkan strategi pengembangan bisnis dengan prinsip-prinsip manajemen proyek yang gesit. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman penulis di dunia nyata dalam pengembangan bisnis di sebuah perusahaan rintisan Singapura dan penelitian akademis dalam metodologi agile. Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan lima langkah praktis: menemukan peluang pasar, membentuk proposisi nilai yang tepat, menyusun rencana masuk pasar, mengeksekusi dengan perangkat agile, serta terus belajar dan berkembang. Alih-alih formula yang kaku, kerangka kerja ini menawarkan pola pikir yang membantu bisnis tetap adaptif, fokus, dan siap untuk tumbuh melampaui batas. Makalah ini tidak hanya ditujukan bagi para wirausahawan, tetapi juga bagi para pendidik, mentor, dan pembuat kebijakan yang ingin mendukung ekonomi kreatif agar berkembang dan menjangkau dunia.

#### **1. Ekonomi Kreatif Indonesia**

Ekonomi kreatif Indonesia menonjol sebagai sektor yang dinamis dan beragam dengan potensi global yang luar biasa. Dari perajin batik tradisional dan perancang busana indie hingga pengembang gim inovatif dan ilustrator digital, negara ini merupakan rumah bagi ribuan wirausahawan kreatif yang dengan terampil memadukan warisan dengan inovasi modern. Inisiatif nasional seperti Bekraf, di samping meningkatnya minat internasional terhadap



budaya Asia Tenggara, telah membawa industri kreatif Indonesia ke sorotan global.

Terlepas dari potensi ini, mentransformasi kreativitas lokal menjadi kesuksesan bisnis internasional merupakan tantangan yang signifikan. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kreatif Indonesia menghadapi tantangan berat ketika mencoba memasuki pasar global, yang seringkali ditandai oleh ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Meskipun para wirausahawan ini memiliki semangat dan bakat, merambah pasar di luar pasar lokal atau regional tetaplah sulit. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya strategi pengembangan bisnis yang terstruktur, yang penting untuk mengidentifikasi peluang pasar baru, memposisikan produk secara efektif, dan melaksanakan rencana masuk pasar yang meyakinkan. Selain itu, banyak UKM kreatif beroperasi dengan tim yang kecil dan pengalaman manajemen proyek formal yang terbatas, sehingga prosesnya semakin membebani.

Tantangan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di seluruh Asia Tenggara, wirausahawan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan formal dan struktur pendukung untuk ekspansi bisnis internasional. Namun, terdapat contoh-contoh sukses di kawasan ini. Misalnya, perusahaan rintisan di Singapura telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen proyek agile untuk beradaptasi dengan cepat, bereksperimen, dan belajar di berbagai pasar, menunjukkan bahwa strategi ini dapat menawarkan nilai signifikan bagi UKM kreatif dengan mengurangi risiko dan meningkatkan fleksibilitas. Makalah ini memperkenalkan peta jalan yang mengintegrasikan strategi pengembangan bisnis dengan manajemen proyek agile, yang dirancang khusus untuk UKM kreatif Indonesia yang ingin mencapai pertumbuhan internasional. Alih-alih menawarkan solusi satu ukuran untuk semua, kerangka kerja ini dirancang agar praktis dan adaptif, memandu wirausahawan melalui lima tahap penting: menemukan peluang pasar baru, menyempurnakan proposisi nilai mereka, membangun rencana masuk pasar, mengeksekusi dengan agile, dan belajar melalui umpan balik dan iterasi.

Dengan menggabungkan perencanaan bisnis strategis dengan perangkat eksekusi tangkas, peta jalan ini menawarkan pendekatan yang lebih mudah dikelola dan adaptif bagi UKM untuk ekspansi global. Peta jalan ini juga bertujuan untuk memicu diskusi di antara para pendidik, mentor, dan pembuat kebijakan tentang cara terbaik untuk mendukung wirausahawan kreatif dalam mengembangkan bisnis mereka secara internasional. Bagian-bagian berikut akan meninjau literatur yang ada tentang industri kreatif, pengembangan bisnis, dan manajemen proyek tangkas, diikuti dengan uraian rinci peta jalan yang diusulkan. Meskipun bersifat konseptual, studi ini didasarkan pada penelitian akademis dan wawasan praktis, dengan tujuan menjadi landasan bagi penerapan di masa mendatang dan kolaborasi lintas sektor.

## **2. Tinjauan Umum Penggabungan Literatur**

Pengembangan bisnis yang diusulkan dengan mengintegrasikan tinjauan menyeluruh atas literatur akademis yang relevan dengan pembahasan rinci tentang pendekatan metodologis. Dengan memadukan wawasan teoretis dan kerangka kerja praktis, bab ini menunjukkan bagaimana penelitian yang ada menginformasikan dan membentuk desain peta jalan. Tinjauan pustaka mencakup tema-tema utama seperti karakteristik unik industri kreatif, teori internasionalisasi, strategi pengembangan bisnis, dan penerapan manajemen proyek tangkas di UKM. Tema-tema ini tidak hanya penting untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi UKM kreatif Indonesia, tetapi juga memberikan landasan teoretis bagi metodologi selanjutnya.

Pendekatan metodologis ini dibangun berdasarkan literatur ini dengan mensintesis praktik terbaik, mengidentifikasi kesenjangan, dan menggabungkan pembelajaran dari dunia nyata, baik dari penelitian akademis maupun pengalaman praktis penulis. Perspektif gabungan ini memastikan peta jalan ini kuat secara akademis maupun relevan secara praktis, menawarkan panduan yang jelas dan adaptif bagi para wirausahawan kreatif yang ingin berekspansi secara internasional. Dengan menjembatani teori dan praktik, bab ini meletakkan dasar bagi fase-fase selanjutnya dari peta jalan ini dan menyiapkan penerapannya dalam konteks bisnis nyata.

### **Industri Kreatif dan Globalisasi Karakteristik UKM Kreatif**

UKM kreatif seringkali terinspirasi oleh inovasi dan ekspresi budaya, yang memberi mereka keunggulan unik di pasar global yang semakin terhubung saat ini. Bisnis-bisnis ini, yang beroperasi di berbagai sektor termasuk fesyen, seni digital, desain, dan kerajinan, cenderung membedakan diri dengan memprioritaskan kreativitas, branding yang kuat, dan inovasi artistik daripada ketergantungan pada bahan baku atau proses manufaktur skala besar. Proposisi nilai mereka seringkali dibangun di atas orisinalitas ide dan autentisitas narasi budaya mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengukir posisi pasar yang unik dan membina hubungan yang mendalam dengan audiens mereka.

Dalam praktiknya, usaha kreatif terkenal karena kemampuan adaptasi dan kelincihannya, mempekerjakan tim berkeahlian tinggi yang tidak hanya mahir di bidangnya masing-masing, tetapi juga bersemangat bereksperimen dengan konsep-konsep baru dan tetap responsif terhadap tren yang sedang berkembang. Kemauan untuk merangkul perubahan dan terus berkembang merupakan ciri khas UKM kreatif, yang menjadikan mereka sangat tangguh dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif. Dalam konteks Indonesia, UKM kreatif seringkali memadukan unsur-unsur budaya tradisional ke dalam produk dan layanan mereka, menanamkan rasa identitas dan warisan yang beresonansi dengan konsumen lokal dan internasional. Perpaduan antara yang lama dan yang baru ini dicapai dengan memadukan motif-motif lokal, teknik-teknik yang telah teruji waktu, dan material-material lokal dengan kepekaan desain modern dan pengaruh global. Hasilnya adalah sebuah karya yang

memikat dan menarik bagi beragam audiens, mulai dari mereka yang mencari pengalaman budaya autentik hingga mereka yang tertarik dengan gaya-gaya inovatif dan trendsetter. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, tetapi juga menempatkan UKM kreatif sebagai duta besar ekonomi kreatif Indonesia di panggung dunia. Kemampuan mereka untuk menyelaraskan tradisi dengan inovasi kontemporer menjadi kekuatan sejati ketika mengejar peluang bisnis lintas batas, memungkinkan mereka untuk membedakan diri di pasar internasional yang ramai dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang menghargai warisan dan orisinalitas.

### Peran dalam Ekonomi Berkembang

Di negara-negara seperti Indonesia, industri kreatif lebih dari sekadar bagian dari perekonomian. Industri kreatif membantu mendefinisikan budaya dan identitas bangsa sekaligus mendorong pembangunan ekonomi. Dengan menonjolkan tradisi dan warisan yang unik, sektor-sektor ini memainkan peran kunci dalam memperkuat makna menjadi orang Indonesia. Di saat yang sama, sektor-sektor ini memberikan dorongan besar bagi PDB negara dan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat di mana pun. Bagi Indonesia, ekonomi kreatif bukan hanya tentang bisnis; melainkan cara yang ampuh untuk membuka pintu bagi perdagangan internasional dan menyebarkan pengaruh negara ke seluruh dunia. Perhatikan industri fesyen, misalnya. Di bidang inilah bakat kreatif benar-benar menonjol dan membawa perubahan nyata.

Ketika UKM kreatif Indonesia berhasil di kancah internasional, hal ini tidak hanya membantu perekonomian. Hal ini juga meningkatkan kemampuan negara untuk terhubung dengan negara lain melalui budaya dan memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Namun, banyak dari usaha kreatif ini kesulitan untuk berekspansi ke luar negeri. Alasan utamanya adalah kurangnya keterampilan pengembangan bisnis formal dan persaingan di panggung dunia yang rumit dan cepat berubah. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, potensi UKM kreatif untuk memberikan dampak nyata, baik di dalam maupun luar negeri, tetap besar.

### Industri Kreatif sebagai Sumber Soft Power

Industri kreatif secara luas diakui sebagai kekuatan vital dalam membentuk kekuatan lunak suatu bangsa, terutama melalui ekspor produk budaya yang memengaruhi persepsi global dan berkontribusi pada pengaruh diplomatik. Negara-negara yang berhasil berbagi musik, film, dan fesyen mereka dengan khalayak internasional mampu membangun citra positif di luar negeri, tetapi dampak dari ekspor kreatif ini jauh melampaui sekadar hiburan. Dengan menampilkan kisah-kisah unik dan tradisi artistik, industri kreatif membantu menumbuhkan pemahaman lintas budaya dan mempromosikan rasa kemanusiaan bersama, yang penting dalam dunia yang saling terhubung saat ini.

Kemampuan sektor kreatif untuk mengomunikasikan nilai-nilai dan warisan melalui berbagai bentuk ekspresi budaya memungkinkan negara-negara untuk terlibat dengan khalayak global secara bermakna, yang seringkali menghasilkan hubungan internasional yang lebih kuat dan peningkatan kolaborasi. Hal ini khususnya terlihat jelas ketika produk-produk kreatif beresonansi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, mendorong dialog dan rasa saling menghormati. Pada akhirnya, industri kreatif berfungsi sebagai jembatan antarbudaya, menjadikannya alat yang sangat diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan lunak dan meningkatkan reputasi suatu negara di panggung dunia.

### Memperkuat Daya Saing Global Indonesia

Industri kreatif Indonesia memiliki kekayaan aset budaya yang unik dan tradisi inovasi yang kuat, yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing global mereka. Dengan mempromosikan warisan budaya dan kemampuan kreatif mereka yang unik, bisnis Indonesia dapat membedakan diri di pasar internasional dan menarik audiens global. Untuk sukses di panggung dunia, UKM kreatif harus: 1) Mumpuk Inovasi: Terus mencari dan memanfaatkan peluang kreatif baru untuk tetap unggul dalam pasar yang dinamis. Memahami Dinamika Pasar: Menganalisis tren global, preferensi konsumen, dan lanskap kompetitif untuk menginformasikan keputusan strategis, 3) Berkolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Bekerja sama dengan pelanggan, lembaga pemerintah, dan mitra lain untuk mengakses sumber daya, jaringan, dan sistem pendukung, dan 4) Menyesuaikan Model Bisnis: Tetap fleksibel dan responsif dengan mengembangkan model bisnis untuk memenuhi tuntutan internasional yang berubah.

### Teori Internasionalisasi

Teori internasionalisasi menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis bagaimana usaha kecil dan menengah (UKM) memperluas operasinya ke pasar luar negeri. Salah satu model yang paling menonjol, model Uppsala, menyatakan bahwa perusahaan biasanya mengikuti proses pertumbuhan internasional yang bertahap dan siklis. Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan memasuki pasar luar negeri secara bertahap, mengambil langkah-langkah kecil yang terukur seiring mereka memperoleh pengetahuan dan pengalaman di luar negeri. Namun, perkembangan metodis ini dapat menimbulkan tantangan bagi UKM kreatif, yang seringkali menghadapi kebutuhan untuk merespons perubahan kondisi pasar secara cepat guna mempertahankan keunggulan kompetitif mereka.

Sebaliknya, teori Born Global menggambarkan pola internasionalisasi yang berbeda, di mana perusahaan berekspansi ke pasar internasional dengan cepat, melewati proses bertahap yang lambat yang digariskan oleh model Uppsala. Banyak UKM kreatif, terutama yang memiliki strategi bisnis digital, mencontohkan pendekatan Born Global. Dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial, perusahaan-perusahaan ini mampu menjangkau

audiens internasional dan meningkatkan skala operasi mereka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat.

Perspektif penting lainnya diberikan oleh Teori Jaringan, yang menekankan peran penting hubungan dan jaringan dalam proses internasionalisasi, terutama bagi UKM. Bagi UKM kreatif, membangun koneksi yang kuat dengan distributor, meningkatkan kapabilitas pemasaran melalui keterlibatan komunitas kreatif, berkolaborasi dengan mitra lokal, dan mengembangkan tenaga kerja terampil merupakan strategi penting untuk berhasil memasuki pasar luar negeri. Jaringan tidak hanya membantu mengatasi tantangan terkait pengetahuan pasar, tetapi juga mengatasi isu-isu seperti konsumsi berkelanjutan dan hambatan pasar yang unik.

### **3. Pengembangan Bisnis di Startup: BD sebagai Strategi Pertumbuhan Terstruktur**

Pengembangan bisnis pada dasarnya adalah tentang mendukung organisasi dalam menemukan dan memanfaatkan peluang baru. Pengembangan bisnis memainkan peran fundamental dalam cara perusahaan berekspansi dan tetap kompetitif, tidak hanya untuk keuntungan mereka sendiri tetapi juga untuk ekonomi global yang lebih luas. Dengan mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja, pengembangan bisnis memiliki dampak yang signifikan, sesuatu yang ditekankan Kabwe & Kabubi (2025) dalam studi mereka. Pada intinya, tujuan utama pengembangan bisnis adalah membantu organisasi mencapai kesuksesan yang lebih besar, sebagai fungsi utamanya. Proses ini melibatkan pencarian cara-cara baru untuk tumbuh, membentuk hubungan bisnis yang berharga, dan menerapkan sistem yang memungkinkan perusahaan untuk berkembang dengan lancar. Tim pengembangan bisnis sering dipandang sebagai kekuatan pendorong di balik kemajuan ini, itulah sebabnya banyak pemimpin senior memperhatikan kegiatan mereka dengan saksama. Terdapat pula bukti kuat bahwa dukungan pengembangan bisnis yang efektif sangat penting untuk membantu startup diluncurkan dengan sukses dan untuk mengurangi pengangguran. Dalam hal dinamika pasar, pengembangan bisnis membantu perusahaan tetap kompetitif dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

Bagi UKM di industri kreatif, pengembangan bisnis sangat penting karena berkaitan erat dengan visi dan misi perusahaan. Sebagaimana dijelaskan, bagi UKM kreatif, pengembangan bisnis bukan sekadar strategi, melainkan cara untuk mewujudkan ide-ide inti mereka dan memastikan mereka dapat mengimbangi pasar yang terus berubah. Pengembangan bisnis di pasar dengan pertumbuhan tinggi seringkali membutuhkan kombinasi fokus strategis dan pengambilan keputusan yang gesit.

Manajemen Proyek Agile dan Penerapannya pada UKM Prinsip Agile untuk Pertumbuhan Bisnis

Manajemen proyek Agile dikenal karena penekanannya pada desentralisasi kendali dan pemberdayaan anggota tim untuk beradaptasi terhadap perubahan. Topik ini telah populer di kalangan bisnis dan akademis sejak publikasi Agile Manifesto pada tahun 2003. Manajemen proyek Agile mendukung metodologi yang memfasilitasi koordinasi aktivitas atau tugas yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu atau Sprint, mampu memantau kemajuan dan menjadwalkan ulang rapat untuk mengembangkan produk akhir sesuai dengan kebutuhan konsumen yang diminati. Salah satu metodologi manajemen proyek Agile yang paling banyak digunakan adalah Scrum, karena berfokus pada kerja sama tim, untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan kerja sama antar anggota tim, yang menghasilkan peningkatan produktivitas di masa mendatang dan penyelesaian masalah jangka pendek. Manajemen proyek Agile menunjukkan manfaatnya dalam mengelola proyek dengan mengadaptasi lingkungan yang fluktuatif untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Tim agile biasanya terdiri dari pemilik produk, pemimpin tim, dan anggota tim, yang juga mengintegrasikan proposal alur kerja komunikasi mengenai keterkaitan tiga momentum, yaitu analisis, perencanaan, dan perancangan, sambil menjalankan dan mengimplementasikan manajemen proyek agile. Agar berhasil, diperlukan keseimbangan kapabilitas tim, adaptasi praktik kerja, dan pemanfaatan teknologi untuk inovasi.

#### **4. Aplikasi dalam Konteks Kreatif, Startup, dan UKM**

Manajemen proyek Agile sangat bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah, atau UKM, karena membantu mereka beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip yang mendorong kerja sama tim, mendorong komunikasi terbuka, dan membagi proyek menjadi siklus yang lebih pendek yang dikenal sebagai sprint. Dengan bekerja dalam sprint, UKM dapat merespons informasi baru atau perubahan prioritas dengan lebih fleksibel, dan umpan balik yang berkelanjutan memungkinkan tim untuk meningkatkan pekerjaan mereka seiring berjalannya waktu. Metode Agile efektif, UKM perlu berinvestasi dalam pelatihan yang terfokus dan merencanakan dengan cermat bagaimana mereka mengalokasikan sumber daya mereka. Hal ini memastikan bahwa baik manusia maupun teknologi digunakan secara efisien. Interaksi tim yang kuat dan prosedur yang jelas, yang seringkali didukung oleh perangkat digital, sangat penting untuk mempertahankan kemajuan yang stabil dan menjaga proyek tetap pada jalurnya. Dalam industri manufaktur, penerapan manajemen proyek Agile dapat membuat perbedaan yang signifikan. Praktik-praktik ini membantu produsen bereaksi cepat terhadap gangguan tak terduga, berkolaborasi lebih erat dengan mitra rantai pasok mereka, dan secara proaktif mengelola risiko sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sangat berharga dalam situasi serba cepat di mana kemampuan beradaptasi dan mengambil keputusan cepat sangat penting untuk tetap kompetitif. Secara keseluruhan, manajemen proyek yang tangkas menyediakan alat yang dibutuhkan UKM untuk menavigasi ketidakpastian dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam operasional mereka.

## 5. Kerangka Kerja yang Diusulkan

Kerangka kerja yang dihasilkan terdiri dari lima fase, yang masing-masing dirancang untuk memandu UKM kreatif melewati kompleksitas memasuki pasar internasional. Fase-fase ini bukanlah langkah yang kaku, melainkan tahapan fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masing-masing bisnis. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

### Tahap 1: Penginderaan Peluang

Tahap awal ekspansi internasional pada dasarnya adalah mengidentifikasi peluang yang menjanjikan melalui riset pasar yang menyeluruh dan strategis. Proses ini melibatkan lebih dari sekadar pengumpulan data; proses ini mengharuskan bisnis untuk secara aktif merasakan, menafsirkan, dan merespons sinyal serta tren yang membentuk lingkungan operasional mereka. Bagi usaha kecil dan menengah (UKM), hal ini berarti memantau perkembangan secara terus-menerus, baik di dalam organisasi mereka sendiri maupun di seluruh industri, yang memungkinkan mereka mengenali prospek pertumbuhan dan area yang perlu ditingkatkan. Untuk mencapai hal ini, UKM sering menggunakan berbagai alat analisis, seperti analisis PESTLE, yang membantu mereka menilai faktor ekonomi, politik, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan di pasar potensial. Pelaksanaan analisis PESTLE harus dimulai dengan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: bagaimana pemerintah dapat memengaruhi perekonomian atau industri tertentu dan faktor-faktor hukum secara lokal, nasional, atau internasional (politik dan hukum); bagaimana kinerja perekonomian (ekonomi); bagaimana memengaruhi masyarakat secara sosial (sosial); bagaimana inovasi teknologi dapat memengaruhi operasi dan aktivitas (teknologi); dan bagaimana memengaruhi lingkungan sekitar. Selain itu, sistem penilaian negara dan penilaian kesesuaian budaya memberikan wawasan berharga tentang seberapa baik suatu bisnis dapat beradaptasi dengan konteks internasional tertentu.

Wirausahawan memainkan peran sentral dalam fase ini, karena pola pikir dan pendekatan proaktif mereka krusial dalam mendorong inovasi dan memfasilitasi transisi ke pasar internasional. Keterlibatan mereka melampaui observasi pasif; wirausahawan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut, memanfaatkan pemahaman mereka tentang dinamika lokal dan global untuk memandu usaha mereka menuju peluang berpotensi tinggi. Pola pikir kewirausahaan ini sangat penting bagi bisnis, tidak hanya untuk mencapai hasil yang didorong oleh inovasi, pertumbuhan tinggi, dan berorientasi internasional, tetapi juga untuk pengambilan keputusan yang cerdas, ketahanan mental dalam menghadapi kegagalan, dan kemampuan untuk melihat peluang di tengah ketidakpastian. Penginderaan peluang berkaitan erat dengan inovasi terbuka, di mana wirausahawan mengintegrasikan pengetahuan eksternal dan praktik kolaboratif untuk menyempurnakan dan memajukan ide-ide usaha

mereka. Dengan merangkul inovasi terbuka, UKM dapat memanfaatkan kumpulan wawasan dan sumber daya yang lebih luas, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan mereka di pasar yang belum dikenal.

Tujuan utama dari fase awal ini adalah untuk mengumpulkan data komprehensif tentang kondisi ekonomi, politik, budaya, dan teknologi negara-negara sasaran, yang memungkinkan UKM untuk membuat keputusan yang tepat tentang di mana mereka akan berekspansi. Informasi ini tidak hanya berguna untuk mengidentifikasi pasar yang paling menjanjikan tetapi juga untuk memahami tantangan dan peluang spesifik yang dihadirkan oleh setiap pasar. Kemampuan perusahaan untuk menilai secara akurat kapabilitas dan potensi pasar mereka sendiri sangat penting, karena membantu mereka mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan memposisikan diri untuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Pada akhirnya, fase ini meletakkan dasar untuk tahap-tahap internasionalisasi selanjutnya, memastikan bahwa UKM siap untuk menavigasi kompleksitas bisnis global dan memanfaatkan peluang yang muncul. Dengan menggabungkan riset pasar yang kuat dengan wawasan kewirausahaan dan praktik inovasi terbuka, bisnis dapat secara signifikan meningkatkan prospek mereka untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan internasional.

## Tahap 2: Desain Strategi

Pada fase ini, bisnis mengembangkan strategi yang jelas untuk memasuki pasar. Desain strategi adalah jenis kompetensi organisasi yang berfokus pada penyelarasan internal dan eksternal komponen formal strategi, artinya memahami jenis strategi yang dapat dirancang dan yang langka serta sulit ditiru. Pada tahap ini, UKM kreatif akan membuat strategi spesifik tentang bagaimana mereka akan membedakan posisi mereka dengan pesaing lokal atau besar. Jika mereka tidak dapat melakukannya, mereka perlu membedakan perspektif pelanggan yang membedakan produk atau layanan mereka dengan produk atau layanan lokal. Pada fase ini juga, bisnis lebih berfokus pada integrasi dengan metodologi manajemen proyek tangkas. Hal ini melibatkan pemilihan antara pendekatan kehadiran digital dan fisik, mengadaptasi model bisnis menggunakan alat seperti Lean Canvas, dan menyelaraskan proposisi nilai dengan kebutuhan target pasar. Berdasarkan definisi dan perbedaannya dengan rencana bisnis, ini adalah bentuk penulisan versi ringkas dari strategi bisnis. Dengan demikian, hal ini membantu UKM melakukan perencanaan strategis dan memberikan pendekatan yang komprehensif dan visual untuk menciptakan dan memvalidasi model bisnis (Tim dkk., 2024). Strategi ini dirancang agar fleksibel, memungkinkan penyesuaian seiring tersedianya informasi baru.

## Fase 3: Eksekusi Agile

Eksekusi Agile merupakan tahap krusial di mana UKM bertransisi dari perencanaan ke tindakan, memanfaatkan prinsip-prinsip manajemen proyek Agile untuk mendorong kemajuan dan beradaptasi dengan cepat terhadap informasi baru. Pada dasarnya, Eksekusi Agile adalah eksekusi metodologi manajemen proyek Agile yang meningkatkan kemampuan untuk merespons



perubahan konteks dan teknologi. Pada titik ini, bisnis mengalihkan fokus mereka ke penerapan alur kerja dinamis yang mengutamakan fleksibilitas, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan. Tim dapat menggunakan beberapa perangkat Agile yang mendukung tim UKM, seperti papan Kanban, Jira, atau Trello, untuk melacak kemajuan proses bisnis operasional mereka saat memasuki pasar.

Keberhasilan fase ini bergantung pada penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim UKM, yang membantu meminimalkan kebingungan dan menyederhanakan pengambilan keputusan. Pembinaan yang tangkas dapat membantu hal ini, sekaligus membantu menetapkan aturan internal yang memperjelas peran masing-masing anggota tim UKM. Umpan balik yang rutin diterapkan dalam operasional sehari-hari, memungkinkan tim untuk merefleksikan apa yang berjalan dengan baik dan di mana penyesuaian diperlukan. Pendekatan iteratif ini mendorong pembelajaran dan penyempurnaan berkelanjutan, sehingga memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau tantangan tak terduga. Dengan memecah proyek yang lebih besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mudah dikelola, serta meninjau hasilnya secara berkala, UKM dapat mempertahankan momentum, mengurangi risiko, dan meningkatkan kualitas output mereka.

Selain kolaborasi internal, eksekusi agile menekankan komunikasi terbuka dan kerja sama tim lintas fungsi. Anggota tim didorong untuk berbagi wawasan, menyampaikan kekhawatiran, dan mengusulkan solusi, sehingga menumbuhkan budaya inovasi dan akuntabilitas bersama. Lingkungan kolaboratif ini tidak hanya mempercepat penyelesaian masalah tetapi juga memberdayakan karyawan untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan.

#### Tahap 4: Masuk Pasar Percontohan

Tahap percontohan merupakan tahap krusial dalam proses internasionalisasi, di mana UKM meluncurkan entri skala kecil ke pasar sasaran pilihan mereka untuk memvalidasi kelayakan model bisnis mereka dan mengumpulkan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Alih-alih mengalokasikan sumber daya yang signifikan di awal, bisnis berfokus pada pengujian asumsi mereka dan menyempurnakan pendekatan mereka dalam situasi dunia nyata. Untuk mencapai hal ini, UKM sering kali menerapkan produk minimum yang layak (MVP), yang merupakan versi sederhana dari penawaran mereka yang dirancang untuk menilai permintaan pasar dan preferensi pelanggan. Karena MVP sebagai representasi produk atau layanan nyata dengan sejumlah fitur terbatas yang diterapkan untuk tujuan mempelajari nilai solusi potensial melalui eksperimen. Selain itu, menjalin kemitraan dengan distributor atau influencer lokal dapat membantu menjembatani kesenjangan budaya dan mempercepat penetrasi pasar dengan memanfaatkan jaringan yang mapan dan keahlian lokal.

Tahap percontohan berfungsi seperti proyek percontohan di bidang lain, dengan tujuan utama untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

mendalam tentang kinerja strategi, teknologi, atau intervensi tertentu dalam kondisi nyata. Dengan mengadopsi pendekatan ini, UKM dapat mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang sejak dini, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berbasis data sebelum meningkatkan skala operasinya. Hal ini memberikan kesempatan unik untuk pembelajaran langsung dan pengalaman praktis, serta memungkinkan pelaku UKM untuk mengidentifikasi bias sistematis dan menerapkan langkah-langkah untuk memitigasinya. Proses iteratif ini tidak hanya mengurangi risiko yang terkait dengan ekspansi internasional, tetapi juga memungkinkan bisnis untuk menyempurnakan proposisi nilai, pesan pemasaran, dan saluran distribusi mereka berdasarkan umpan balik langsung dari pasar.

#### Fase 5: Iterasi dan Skala

Fase terakhir berfokus pada pembelajaran dari temuan selama uji coba, kemudian meningkatkan skala operasional menggunakan umpan balik dan data kinerja. Usaha kecil dan menengah (UKM) kreatif menggunakan sprint agile dan metode growth hacking untuk meningkatkan produk atau layanan mereka dan memperluas kehadiran mereka di pasar sasaran. Secara teori, backlog sprint berarti daftar proyek dan persyaratan yang akan ditangani selama proses pengembangan agile dalam setiap sprint. Bagi UKM kreatif, backlog ini dapat diadaptasi untuk mencakup tugas pengembangan bisnis dan proyek kreatif, memastikan tim tetap fleksibel dan responsif seiring perkembangannya. Proses ini bersifat iteratif, dengan penyesuaian berkelanjutan untuk menjaga relevansi dan daya saing bisnis.

Faktor kunci dalam fase ini adalah keterlibatan aktif seluruh tim, yang bekerja sama untuk menginterpretasikan umpan balik dan menerapkan perubahan. Pertemuan rutin dan komunikasi terbuka membantu semua orang tetap selaras dan fokus pada tujuan bersama. Lingkungan kolaboratif ini mendorong pembelajaran berkelanjutan, yang memungkinkan bisnis beradaptasi dengan cepat terhadap wawasan dan tren pasar baru. Hasilnya, UKM dapat menghindari kesalahan umum dan memanfaatkan peluang yang muncul, sehingga proses penskalaan menjadi lebih efisien dan efektif.

Meskipun kerangka kerja ini masih konseptual dan belum diuji melalui studi skala besar, kerangka kerja ini dimaksudkan sebagai panduan praktis bagi UKM kreatif yang merencanakan ekspansi internasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka kerja ini dalam studi kasus dunia nyata dan di berbagai sektor kreatif, yang akan membantu memastikan kegunaannya dan mendukung penerapan yang lebih luas.

## **6. Peluang dan Fleksibilitas**

Mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen proyek yang gesit dengan strategi pengembangan bisnis menawarkan pendekatan yang menarik bagi UKM kreatif Indonesia untuk ekspansi internasional. Pendekatan terpadu ini menggabungkan pola pikir pengembangan bisnis yang terstruktur dan berorientasi peluang dengan fleksibilitas dan adaptabilitas metodologi gesit,

menyediakan cara praktis dan responsif bagi perusahaan kreatif untuk menavigasi kompleksitas pasar global. Perjalanan dari penginderaan peluang menuju iterasi dan penskalaan dirancang untuk membantu UKM tetap fokus, tangguh, dan terbuka terhadap pembelajaran, yang khususnya penting dalam industri di mana selera konsumen, kondisi pasar, dan tekanan persaingan dapat berubah dengan cepat.

Berkaca pada pengalaman penulis dalam pengembangan bisnis di sebuah perusahaan rintisan di Singapura, tim penulis mengamati secara langsung bagaimana praktik agile dapat mengubah cara tim mendekati ekspansi internasional. Dalam operasional mereka, penggunaan perangkat digital seperti Hubspot dan Trello memungkinkan tim penulis untuk mengoordinasikan tugas secara efisien, menjaga transparansi, dan menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan. Misalnya, tim penulis mengadakan rapat rutin setiap Senin untuk menetapkan strategi dan rencana mingguan, dan setiap Kamis untuk berbagi informasi terbaru dan membahas masalah atau umpan balik. Pendekatan ini tidak hanya menjaga keselarasan semua orang, tetapi juga membantu tim mengatasi tantangan secara kolektif dan belajar dari setiap proyek percontohan, mirip dengan proses iteratif yang dijelaskan dalam Fase 5 kerangka kerja ini. Umpan balik yang rutin dan perencanaan iteratif memungkinkan tim penulis untuk merespons umpan balik pasar dengan cepat dan menyesuaikan strategi. Praktik semacam ini sangat berharga bagi UKM dengan sumber daya terbatas, karena membantu tim memprioritaskan aktivitas berdampak tinggi dan mengurangi risiko yang terkait dengan pertumbuhan internasional.

Kerangka kerja yang diusulkan tidak hanya berakar pada pengalaman praktis, tetapi juga didasarkan pada teori-teori internasionalisasi dan pengembangan bisnis yang telah mapan. Misalnya, model Uppsala menekankan internasionalisasi yang bertahap dan berbasis pengetahuan, sementara model Born Global menyoroti potensi ekspansi digital yang cepat. Teori jaringan lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal dan memanfaatkan platform digital untuk eksposur pasar. Perspektif teoretis ini tercermin dalam penekanan peta jalan pada riset pasar, kemitraan strategis, dan pembelajaran iteratif.

Salah satu keunggulan utama pendekatan ini adalah kemampuan adaptasinya. Di pasar global yang serba cepat saat ini, kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat sangatlah penting. Metodologi Agile memungkinkan UKM untuk melakukan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan umpan balik waktu nyata, tren pasar, dan peluang yang muncul. Fleksibilitas ini sangat berharga bagi bisnis kreatif, yang seringkali beroperasi dalam lingkungan dinamis di mana preferensi konsumen dan lanskap persaingan dapat berubah secara tak terduga. Penggunaan perangkat digital dan perencanaan iteratif memungkinkan UKM untuk memaksimalkan produktivitas, meminimalkan pemborosan, dan berfokus pada pemberian nilai tertinggi kepada pelanggan mereka.

Terlepas dari manfaat-manfaat ini, terdapat pula tantangan yang terkait dengan penerapan strategi pengembangan bisnis agile. Keterbatasan sumber

daya, literasi digital yang terbatas, dan perlunya perubahan budaya dalam organisasi, semuanya dapat menjadi hambatan dalam penerapannya. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Dukungan pemerintah sangat vital, karena dapat memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi UKM. Karyawan mungkin memerlukan pelatihan khusus dalam metodologi agile, perangkat kolaborasi digital, dan komunikasi lintas budaya. Khususnya, jika UKM ingin mengadopsi metodologi agile secara lebih luas, berkolaborasi dengan pelatih agile dapat sangat bermanfaat. Pelatih agile memberikan keahlian unik bagi organisasi dan membantu melatih tim dalam pendekatan agile, membantu mengelola pengembangan tim agile untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dan tugas diselesaikan secara efisien. Dukungan dari pimpinan dan visi yang jelas untuk masa depan juga penting untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan memastikan dukungan dari semua anggota tim. Ini adalah pemimpin yang transformasional, mereka membangun kepercayaan dan menumbuhkan rasa komitmen di antara karyawan.

Dibandingkan dengan model pengembangan bisnis tradisional, pendekatan agile menawarkan keunggulan tersendiri. Model tradisional seringkali bergantung pada rencana bisnis jangka panjang yang terperinci dan perkembangan linear, yang dapat berjalan lambat dan tidak fleksibel. Selain itu, model tradisional kesulitan beradaptasi secara efektif dengan tuntutan ekonomi digital akibat evolusi teknologi digital yang pesat. Sebaliknya, peta jalan agile menekankan pengujian cepat, pembelajaran iteratif, dan adaptasi berkelanjutan. Hal ini memungkinkan UKM memasuki pasar baru lebih cepat, merespons perubahan secara lebih efektif, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Efek transformatif internasionalisasi terhadap UKM telah terdokumentasi dengan baik dalam studi-studi terkini, yang menyoroti perubahan dalam proses bisnis, penawaran produk, dan basis pelanggan sebagai akibat dari ekspansi internasional.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan pendidikan. Para pembuat kebijakan dapat memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem yang mendorong pengembangan bisnis yang gesit dengan menyediakan sumber daya untuk pelatihan digital, mendorong kolaborasi internasional, dan memberikan insentif bagi penerapan metodologi gesit. Para pendidik, pada gilirannya, dapat membantu mempersiapkan generasi wirausahawan berikutnya dengan mengintegrasikan kerangka kerja gesit dan strategi pengembangan bisnis ke dalam kurikulum kewirausahaan. Pada akhirnya, dengan menerapkan kegesitan, pembelajaran berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor, UKM kreatif Indonesia dapat membuka peluang baru, mendorong inovasi, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan di pasar global. Peta jalan yang diusulkan tidak hanya menjadi panduan bagi para wirausahawan, tetapi juga ajakan bertindak bagi para pendidik, mentor, dan pembuat kebijakan untuk mendukung ekonomi kreatif agar dapat berkembang dan menjangkau dunia.

## 7. Implikasi & Rekomendasi Bagi UKM

Mengadopsi prinsip-prinsip agile: UKM kreatif Indonesia harus menerapkan perangkat manajemen proyek agile dan proses iteratif untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan respons mereka di pasar internasional. Hal ini mencakup penggunaan platform digital untuk mengelola proyek dan penerapan metodologi agile untuk koordinasi proyek dan siklus umpan balik demi peningkatan berkelanjutan. Berinvestasi dalam pelatihan: UKM harus memprioritaskan pelatihan bagi anggota tim dalam metodologi agile dan literasi digital untuk memaksimalkan manfaat perangkat agile dan menumbuhkan budaya inovasi serta pengambilan keputusan yang cepat. Memanfaatkan perangkat digital: Memanfaatkan perangkat manajemen proyek dan pemasaran berbasis cloud yang skalabel untuk menyederhanakan operasional, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan mempertahankan fleksibilitas tanpa membebani sumber daya yang terbatas. Membangun jaringan: Berkolaborasi dengan rekan industri, mitra lokal dan internasional, serta platform digital untuk mengakses pasar baru, berbagi sumber daya, dan mendapatkan wawasan berharga untuk ekspansi internasional.

### Untuk Para Pembuat Kebijakan

Dukung transformasi digital: Para pembuat kebijakan harus menyediakan sumber daya untuk pelatihan digital dan mensubsidi akses ke perangkat manajemen proyek yang tangkas bagi UKM kreatif, membantu mereka mengatasi hambatan teknis dan finansial. Dorong program internasionalisasi: Kembangkan program dukungan internasionalisasi yang terarah, termasuk inisiatif soft landing, informasi pasar, dan peluang jejaring untuk membantu UKM kreatif memasuki dan meraih kesuksesan di pasar luar negeri. Dorong inovasi: Tawarkan insentif bagi UKM kreatif untuk bereksperimen dengan model bisnis dan strategi monetisasi baru, seperti lokakarya, inkubator, dan akselerator. Fasilitasi akses pendanaan: Tingkatkan akses ke pendanaan swasta dan instrumen keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM kreatif, memastikan mereka memiliki modal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan internasional.

### Untuk Peneliti dan Penelitian Masa Depan

Validasi empiris: Penelitian di masa mendatang sebaiknya berfokus pada pengujian empiris peta jalan pengembangan bisnis agile yang diusulkan melalui studi kasus dan aplikasi lintas sektor, terutama di berbagai subsektor kreatif dan konteks internasional. Menjelajahi inovasi digital: Meneliti dampak perangkat digital canggih, seperti kecerdasan buatan dan analitik data, terhadap kelincahan dan ketahanan UKM kreatif di pasar internasional. Mempelajari hambatan implementasi: Menelaah tantangan spesifik yang dihadapi UKM kreatif dalam mengadopsi metodologi agile, termasuk resistensi budaya, keterbatasan sumber daya, dan efektivitas berbagai pendekatan pelatihan. Adaptasi lintas budaya: Meneliti bagaimana praktik agile dapat diadaptasi ke berbagai lingkungan budaya dan peraturan,

memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi UKM yang memasuki pasar internasional yang beragam.

## **8. UMKM Kreatif di Pasar Global**

Perjalanan ekspansi internasional bagi UKM kreatif Indonesia merupakan tantangan sekaligus peluang. Peta jalan yang disajikan dalam makalah ini memadukan pemikiran terstruktur pengembangan bisnis dengan adaptabilitas metodologi agile, menawarkan panduan praktis bagi wirausahawan kreatif yang siap menjelajahi pasar global. Dengan berfokus pada pembelajaran berkelanjutan, komunikasi terbuka, dan peningkatan iteratif, UKM dapat menavigasi ketidakpastian pertumbuhan internasional dan tetap responsif terhadap perubahan permintaan pasar.

Pengalaman penulis dalam pengembangan bisnis di sebuah perusahaan rintisan di Singapura telah menunjukkan betapa berharganya prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Bekerja dengan tim yang beragam dan memanfaatkan perangkat digital membantu kami tetap tangkas dan membuat keputusan yang cepat dan tepat, pelajaran yang juga relevan bagi UKM kreatif di Indonesia dan di seluruh dunia. Meskipun kerangka kerja ini masih konseptual dan masih menunggu validasi empiris lebih lanjut, kerangka kerja ini memberikan titik awal yang jelas dan dapat ditindaklanjuti bagi bisnis yang ingin berekspansi secara internasional.

Pada akhirnya, kesuksesan UKM kreatif di pasar global tidak hanya bergantung pada produk inovatif mereka, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk beradaptasi, berkolaborasi, dan belajar dari setiap langkah perjalanan mereka. Dengan pola pikir, perangkat, dan dukungan yang tepat, usaha kreatif Indonesia dapat dengan percaya diri mengambil tempat di panggung dunia, menginspirasi orang lain, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif global.

## **E. Strategi Fiskal untuk Ekonomi Kreatif Global: Peran Lembaga Keuangan Multilateral Lembaga dan Negara Berkembang**

### **1. Ekonomi Creative**

Ekonomi kreatif yang mencakup sektor-sektor seperti desain, seni pertunjukan dan seni visual, media audiovisual, warisan budaya, penerbitan, periklanan, arsitektur, mode, pengembangan perangkat lunak, dan konten digital telah muncul sebagai kekuatan transformatif dalam ekonomi global abad ke-21. Sektor-sektor ini berkontribusi sekitar 3% terhadap PDB global dan diakui sebagai salah satu domain ekonomi paling dinamis dan berkembang paling pesat. Selain nilai ekonominya, industri kreatif menghasilkan modal budaya, sosial, dan diplomatik yang signifikan, bertindak sebagai wahana

ekspresi identitas, kohesi sosial, dan kekuatan lunak dalam hubungan internasional. Pertumbuhan eksponensial ekonomi kreatif terkait erat dengan dua megatren global: transformasi digital dan globalisasi. Kebangkitan platform digital, model produksi terdesentralisasi, dan pasar tenaga kerja kreatif daring telah memungkinkan pekerja dan wirausahawan kreatif menjangkau khalayak global dengan efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan ini telah membuka peluang baru untuk lapangan kerja, kewirausahaan, dan inovasi, terutama di kalangan pemuda dan perempuan, serta di negara-negara berkembang di mana industri tradisional mungkin sedang menurun.

Namun, terlepas dari potensinya yang menjanjikan, ekonomi kreatif masih kurang dimanfaatkan, terutama di negara-negara berkembang. Kendala sistemik menghambat potensi penuhnya. Kendala-kendala ini meliputi infrastruktur digital yang belum berkembang, rezim hak kekayaan intelektual yang lemah, koordinasi kebijakan yang terfragmentasi, informalitas tenaga kerja kreatif, dan kurangnya insentif fiskal yang tepat sasaran. Kendala-kendala ini mencegah talenta kreatif untuk meningkatkan skala pekerjaan mereka, membatasi akses ke pasar global, dan membatasi kontribusi sektor ini terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal muncul sebagai instrumen strategis untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi ekonomi kreatif. Melalui strategi fiskal yang dirancang dengan baik seperti kredit pajak, skema pendanaan publik, hibah untuk kewirausahaan budaya, dan investasi dalam barang publik digital, pemerintah dan lembaga multilateral dapat secara signifikan mengurangi hambatan masuk dan mendukung ekosistem inovasi. Lebih lanjut, kerangka fiskal dapat disesuaikan untuk mengenali fitur unik karya kreatif, sifatnya yang berisiko tinggi, berbasis proyek, dan keluaran yang tidak berwujud dengan menawarkan perlakuan pajak yang fleksibel dan adaptif, model perlindungan sosial, dan prosedur kepatuhan yang disederhanakan. Lembaga pembangunan multilateral, termasuk Bank Dunia, UNESCO, UNCTAD, dan OECD, semakin menekankan pentingnya mengintegrasikan industri budaya dan kreatif ke dalam rencana pembangunan nasional dan agenda reformasi fiskal. Peran mereka tidak hanya mencakup pendanaan dan pengembangan kapasitas, tetapi juga mendorong harmonisasi kebijakan lintas batas yang memfasilitasi aliran kekayaan intelektual, perdagangan digital, dan mobilitas para profesional kreatif. Hal ini khususnya krusial dalam ekonomi kreatif global di mana rantai nilai bersifat transnasional, dan inovasi berkembang pesat melalui kolaborasi lintas budaya.

Lebih lanjut, pemerintah nasional, terutama di negara berkembang, memegang peran sentral dalam merancang kerangka fiskal inklusif yang mendorong akses yang adil terhadap sumber daya, memberdayakan komunitas kreatif yang terpinggirkan, dan merangsang permintaan akan produk budaya lokal. Investasi fiskal strategis dalam infrastruktur digital, lembaga budaya, kluster kreatif, dan sistem pendidikan dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing ekonomi kreatif lokal di pasar global. Singkatnya, memajukan ekonomi kreatif di negara-negara berkembang membutuhkan lebih dari sekadar liberalisasi pasar atau kebebasan kreatif, tetapi juga membutuhkan rekayasa

fiskal yang disengaja untuk membangun kondisi struktural bagi inovasi, kewirausahaan, dan semangat budaya. Studi ini mengeksplorasi bagaimana strategi fiskal yang dirancang dan diimplementasikan di tingkat multilateral dan nasional dapat berfungsi sebagai alat katalis untuk membuka potensi ekonomi kreatif global, terutama dalam konteks yang menghadapi keterbatasan kelembagaan, keuangan, dan teknologi. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji strategi fiskal terkini dari Bank Dunia, OECD, dan negara-negara BRIC dalam mendukung ekonomi kreatif, menganalisis bagaimana strategi-strategi ini berkontribusi pada digitalisasi dan globalisasi, serta menawarkan rekomendasi kebijakan bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mengadaptasi praktik terbaik global.

## **2. Mendefinisikan Ekonomi Kreatif di Era Digital**

Ekonomi kreatif melibatkan penciptaan nilai melalui kekayaan intelektual, inovasi, dan ekspresi budaya. Ekonomi kreatif mencakup lima belas sektor, termasuk film, desain, gim, fesyen, dan periklanan. Transformasi digital telah mengubah ekonomi kreatif secara radikal dengan memungkinkan distribusi konten tanpa batas, kolaborasi virtual, dan model monetisasi baru. Globalisasi semakin memfasilitasi pertukaran aset kreatif, memungkinkan hibridisasi budaya dan transfer pengetahuan. Teori keuangan publik menyatakan bahwa kebijakan fiskal, belanja pemerintah, perpajakan, dan subsidi dapat memengaruhi alokasi sumber daya, pemerataan, dan inovasi. Dalam industri kreatif, instrumen-instrumen ini menurunkan hambatan masuk, mengurangi risiko inovasi, dan memacu pertumbuhan. Contohnya termasuk pembebasan pajak untuk perusahaan rintisan, insentif ekspor budaya, dan platform digital yang disponsori negara. Bauran fiskal yang optimal bervariasi di seluruh tingkat pembangunan dan konteks kelembagaan (Potts & Cunningham, 2008; UNESCO, 2015).

### Analisis Perbandingan Strategi Fiskal Inisiatif Bank Dunia

Bank Dunia menekankan pembangunan kapasitas digital dan partisipasi ekonomi yang inklusif. Inisiatif Ekonomi Digital untuk Afrika (DE4A) berfokus pada infrastruktur pita lebar, pengembangan sumber daya manusia, dan ekosistem inovasi digital. Di Kolombia dan Indonesia, Program Dukungan Industri Kreatif menyediakan pembiayaan terpadu, pelatihan, dan akses pasar bagi wirausahawan kreatif. Intervensi ini merupakan contoh strategi fiskal yang berakar pada pembangunan kapasitas dan pengembangan ekosistem. Selain itu, negara-negara OECD menerapkan kerangka kerja fiskal yang kuat yang berfokus pada insentif pajak litbang, subsidi sektor kreatif, dan investasi infrastruktur digital. Misalnya: Keringanan Pajak Industri Kreatif Inggris mencakup film, animasi, gim video, dan orkestra, yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan investasi masuk yang signifikan. Dukungan fiskal Korea Selatan untuk konten digital (misalnya, K-pop, gim) mencakup insentif pajak dan hibah pelatihan, yang mengarah pada dominasi pasar global. Kebijakan-kebijakan ini menyelaraskan instrumen fiskal dengan strategi inovasi jangka panjang.



### 3. Komitmen Bersama

Meskipun terdapat komitmen bersama untuk mendukung infrastruktur digital dan kewirausahaan kreatif, strategi fiskal di berbagai lembaga multilateral dan blok nasional memiliki tujuan, perangkat, dan pendekatan yang berbeda secara signifikan. Perbedaan ini mencerminkan mandat kelembagaan, ekonomi politik, dan tingkat pembangunan yang berbeda pula.

Kesatuan	Fokus Strategis	Instrumen Fiskal
Bank Dunia	Peningkatan kapasitas dan pengentasan kemiskinan	Hibah pembangunan, pinjaman lunak
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan (OECD)	Inovasi, daya saing, desain kebijakan	Kredit pajak R&D, voucher inovasi
BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok)	Identitas budaya, perluasan pasar	Dana budaya, subsidi pajak domestik

Pendekatan OECD dicirikan oleh pemodelan fiskal berbasis data dan fokus yang kuat pada R&D. Sebagai contoh, anggota OECD memiliki rata-rata belanja R&D publik sebesar 2,7% dari PDB pada tahun 2021, jauh di atas rata-rata global sebesar 1,7%. Insentif pajak untuk inovasi seperti *Crédit d'Impôt Recherche* di Prancis dan *Creative Sector Tax Relief* di Inggris terstruktur dan dievaluasi secara ketat efektivitasnya. Sebaliknya, negara-negara BRIC mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan berfokus pada domestik, dengan menekankan kedaulatan budaya, branding nasional, dan ketenagakerjaan. Program *Cinema do Brasil* di Brasil dan Strategi Ekonomi Digital Rusia menawarkan subsidi domestik untuk konten lokal, meskipun seringkali dengan kerangka akuntabilitas yang terbatas.

Bank Dunia, pada gilirannya, bertindak sebagai katalis dan pendorong, memprioritaskan investasi fundamental dalam infrastruktur digital dan reformasi tata kelola. Inisiatif Ekonomi Digital untuk Afrika (DE4A) telah mendukung lebih dari 40 negara dalam reformasi regulasi, akses pita lebar, dan pelatihan keterampilan. Instrumen fiskal Bank Dunia terutama berupa hibah, dan pinjaman lunak, tertanam dalam program pembangunan yang lebih luas dan bergantung pada metrik reformasi kebijakan.

Saran Analisis Data: Analisis kebijakan komparatif lintas seksi menggunakan analisis konten (misalnya, NVivo atau MAXQDA) terhadap dokumen kebijakan budaya nasional, yang dilengkapi dengan visualisasi data

fiskal (misalnya, Tableau atau R/ggplot2), akan mengungkap pola dalam desain kebijakan, keselarasan dengan target SDG, dan kesenjangan dalam implementasi. Penerjemahan strategi fiskal menjadi pertumbuhan kreatif yang terukur seringkali terkendala oleh hambatan struktural dan kelembagaan:

1. Kendala Sumber Daya

Negara-negara berpenghasilan rendah seringkali menghadapi keterbatasan fiskal yang parah, yang mengakibatkan ketergantungan berlebihan pada bantuan multilateral dan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk sektor budaya dan kreatif. Sebagai contoh, persentase belanja budaya dari total belanja publik masih di bawah 1% di banyak negara Afrika dan Asia Selatan.

2. Fragmentasi Regulasi

Ketidakkonsistenan kebijakan di berbagai kementerian, seperti keuangan, kebudayaan, ekonomi digital, dan pendidikan, mengakibatkan intervensi yang terputus-putus, dengan insentif yang tumpang tindih atau kontradiktif. Di India, meskipun terdapat program seperti Startup India dan Digital India, kurangnya kebijakan industri kreatif yang terintegrasi telah menghambat koordinasi ekosistem.

3. Kesenjangan Digital

Kesenjangan digital perkotaan dan pedesaan yang persisten membatasi akses terhadap peluang kreatif. Di Afrika Sahara, hanya 28% penduduk pedesaan yang memiliki akses internet seluler dibandingkan dengan 55% di wilayah perkotaan. Asimetri teknologi ini tidak hanya membatasi akses tetapi juga mengarahkan pendanaan publik ke pusat-pusat kreatif perkotaan. Alat yang Direkomendasikan: Analisis spasial menggunakan perangkat SIG dapat memvisualisasikan disparitas geografis dalam akses terhadap infrastruktur digital dan investasi budaya, yang akan memberikan informasi untuk penargetan fiskal yang lebih adil.

Untuk memaksimalkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pembangunan berkelanjutan, strategi fiskal harus adaptif, inklusif, dan berorientasi pada dampak:

1. Lokalisasi Instrumen Fiskal

Kerangka kebijakan harus mengakui dan menghargai aset budaya lokal dan praktik kreatif informal, serta menyesuaikan instrumen fiskalnya. Misalnya, hibah mikro dan sistem kredit pajak berbasis seluler dapat menyasar wirausahawan kreatif akar rumput di Afrika dan Asia Tenggara.

2. Kemitraan Lintas Sektor

Kemitraan publik-swasta-akademisi (KPS) dapat memobilisasi modal, mengurangi tekanan fiskal, dan meningkatkan difusi inovasi.

Contohnya termasuk Program Eropa Kreatif dan pusat kreatif berbasis KPS di Indonesia dan Kenya.

### 3. Investasi Modal Manusia

Strategi fiskal harus mengalokasikan dana untuk pendidikan, pelatihan vokasi, dan literasi digital yang selaras dengan keterampilan kreatif. Negara-negara seperti Korea Selatan telah mengintegrasikan pendidikan seni ke dalam kurikulum nasional dengan pendanaan bersama dari perusahaan swasta.

### 4. Pemantauan dan Evaluasi (M&E)

Menanamkan sistem M&E seperti penganggaran berbasis hasil dan indikator dampak budaya ke dalam kebijakan fiskal yang kreatif memastikan transparansi, umpan balik, dan pembelajaran kebijakan. Kerangka Kerja Indikator Budaya|2030 UNESCO menawarkan model yang bermanfaat untuk mengevaluasi hasil fiskal yang sejalan dengan target SDG (UNESCO, 2021). Kerangka Kerja yang Disarankan: Gunakan model Teori Perubahan (ToC) yang dikombinasikan dengan kerangka kerja logika untuk memetakan jalur kausal dari masukan fiskal hingga keluaran budaya dan hasil sosial-ekonomi.

Model Fiskal di Negara-Negara BRIC, Brasil, program “Cinema do Brasil” menawarkan kredit pajak dan investasi publik untuk produksi film lokal, yang bertujuan memperkuat kekuatan lunak Brasil. Program “Ekonomi Digital” Rusia mencakup keringanan pajak untuk perusahaan rintisan teknologi dan investasi dalam komputasi awan dan platform digital (Pemerintah Rusia, 2019). Inisiatif “Startup India” menyediakan pembebasan pajak, pendanaan ekuitas, dan pusat inovasi bagi perusahaan rintisan kreatif. Kebijakan Digital India melengkapi hal ini dengan memperluas akses internet dan literasi digital. Dalam program “Made in China 2025,” Tiongkok mensubsidi sektor e-sports, animasi, dan film digital, menggabungkan promosi budaya dengan strategi ekspor.

Strategi fiskal Indonesia untuk ekonomi kreatif. Indonesia merupakan contoh menarik negara berkembang yang secara aktif memanfaatkan instrumen fiskal untuk memajukan ekonomi kreatifnya. Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022), sektor ini menyumbang Rp1.300 triliun (sekitar USD 90 miliar) terhadap PDB Indonesia, menempatkan Indonesia di antara lima penyumbang PDB kreatif global teratas.

Pemerintah telah memperkenalkan berbagai strategi, insentif pajak untuk UKM melalui peraturan pemerintah No. 23/2018, usaha kreatif kecil dan mikro memenuhi syarat untuk tarif pajak penghasilan final yang dikurangi sebesar 0,5%, yang meringankan beban bagi perusahaan rintisan di sektor kuliner, mode, dan kerajinan. Badan ekonomi kreatif (Bekraf) sebelum merger dengan kementerian kreatif, Bekraf menyediakan pendanaan awal, pelatihan, dan bantuan ekspor kepada perusahaan rintisan di bidang film, media digital, dan permainan. Perluasan infrastruktur digital, proyek palapa ring dan inisiatif kota pintar telah menyediakan akses pita lebar ke daerah-daerah terpencil,

yang memungkinkan platform digital bagi produsen kreatif di luar Jawa. Promosi ekspor kreatif melalui acara-acara seperti Festival Produk Kreatif Indonesia dan insentif untuk pameran kreatif internasional, Indonesia mempromosikan ekspor mode, batik, musik, dan IP digital. Meskipun ada upaya-upaya ini, masalah struktural tetap ada kurang dari 15% pelaku ekonomi kreatif terdaftar secara resmi, membatasi akses mereka terhadap manfaat fiskal dan pembiayaan, ada kesenjangan digital antara pelaku kreatif perkotaan dan pedesaan dan koordinasi fiskal masih terfragmentasi di antara kementerian dan pemerintah daerah.

Rekomendasi bagi Indonesia untuk Koordinasi Fiskal Terintegrasi: Mendirikan kantor strategi fiskal ekonomi kreatif pusat untuk menyelaraskan insentif lintas sektor dan kementerian. Memperluas Insentif Pajak Litbang: Menawarkan kredit untuk inovasi digital, pengembangan IP, dan lembaga pendidikan kreatif. Desentralisasi Akses Pendanaan: Membangun pusat kreatif regional yang didukung oleh insentif fiskal lokal dan investasi publik-swasta. Meningkatkan Sistem Data: Membuat dasbor nasional untuk melacak kinerja dan hasil fiskal di sektor kreatif. Dengan modal budaya yang kaya dan bakat digital muda, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam ekonomi kreatif asalkan arsitektur fiskalnya berkembang untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan dipimpin oleh inovasi. Untuk menganalisis dokumen kebijakan, laporan kelembagaan, dan transkrip wawancara secara sistematis, studi ini menggunakan NVivo 14 untuk melakukan pengkodean tematik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola yang berulang, alasan kebijakan, kesenjangan implementasi, dan kerangka wacana yang digunakan oleh berbagai aktor (misalnya, Bank Dunia, OECD, pemerintah BRIC).

Proses pengkodean mengikuti pendekatan hibrida deduktif-induktif, menggabungkan tema-tema yang berasal dari literatur dengan tema-tema yang muncul secara organik dari data.

#### 1. Ikhtisar Buku Kode

Berikut adalah ringkasan simpul utama (tema) dan sub-simpul (sub-tema) yang dibuat selama analisis NVivo:

Simpul	Keterangan
Instrumen Fiskal	Penyebutan insentif pajak, hibah, subsidi, mekanisme pendanaan publik
→ Insentif Pajak	Kredit pajak perusahaan, keringanan pajak kreatif, pembebasan PPN
→ Pendanaan Publik	Hibah pemerintah, subsidi langsung, dana

	budaya
→ Model PPP & Hibrida	Kemitraan publik-swasta dan model pembiayaan bersama
Peran Kelembagaan	Deskripsi peran yang dimainkan oleh lembaga multilateral dan badan nasional
→ Bank Dunia	Pengembangan kapasitas, infrastruktur digital, pembiayaan pembangunan
→ OECD	Kebijakan inovasi, pembandingan pajak, reformasi berbasis bukti
→ BRIC	Branding nasional, perluasan pasar, pertumbuhan yang dipimpin budaya
Tantangan Kebijakan	Hambatan terhadap efektivitas kebijakan
→ Kendala Sumber Daya	Keterbatasan anggaran, ketergantungan donor
→ Fragmentasi	Kurangnya koordinasi, mandat yang tumpang tindih
→ Kesenjangan Digital	Kesenjangan perkotaan-pedesaan, masalah akses, ketidaksetaraan
→ Ekuitas dan Inklusi	Gender, pemuda, pelaku kreatif informal
→ Pemantauan dan Evaluasi	Penyebutan KPI, kerangka kerja penilaian dampak

Sumber: Analisis Nvivo

2. Kutipan dari Coding (Contoh dari Transkrip Wawancara dan Laporan)

**Sumber:**Laporan Kebijakan Inovasi OECD

*Kredit pajak terbukti efektif dalam mendorong usaha rintisan kreatif jika dikombinasikan dengan hibah inovasi dan pendanaan akselerator. Namun, penerapannya seringkali terbatas di lingkungan berkapasitas rendah.* → Dikodekan dalam: Instrumen Fiskal → Insentif Pajak, Tantangan Kebijakan → Kendala Sumber Daya

3. Wawasan dari Matriks Pengkodean NVivo

Matriks pengkodean dikembangkan untuk menganalisis persimpangan antara alat fiskal dan tantangan implementasi:

	<b>Pajak Insentif</b>	<b>Pendanaan Publik</b>	<b>PPP Model</b>
Kendala Sumber Daya	✓✓	✓✓✓	✓
Fragmentasi	✓✓	✓✓	✓✓
Kesenjangan Digital	✓	✓✓✓	✓

(✓= frekuensi referensi;✓✓✓= sangat sering)

Matriks ini menyoroti bahwa strategi pendanaan publik paling sering dikaitkan dengan diskusi tentang keterbatasan sumber daya dan kesenjangan digital, yang menunjukkan bahwa mekanisme fiskal tradisional terbebani dalam konteks yang kurang berkembang secara digital. Keluaran NVivo mendukung tiga kesimpulan utama:

- **Insentif pajak kurang dimanfaatkan** pada ekonomi kreatif berpendapatan rendah dan informal, terutama disebabkan oleh lemahnya kapasitas administratif dan kurangnya pendaftaran wajib pajak di kalangan pekerja kreatif.

- **Pendanaan publik tetap menjadi pusat perhatian** tetapi memerlukan penargetan yang lebih baik, transparansi, dan kerangka kerja keberlanjutan jangka panjang.
- **Hambatan lintas sektor seperti eksklusi digital dan fragmentasi tata kelola** menghambat efektivitas alat fiskal kecuali tertanam dalam strategi multisektoral yang koheren.

#### 4. Memperkuat Dimensi Analitis dengan Data Empiris

Untuk meningkatkan keandalan studi ini, kami mengintegrasikan wawasan kuantitatif dan data primer dari lembaga-lembaga global terkemuka. Analisis berikut ini mentriangulasi temuan literatur dengan indikator empiris dari basis data Bank Dunia, OECD, dan UNCTAD.

**Investasi Global dalam Industri Kreatif:** Menurut Laporan Global UNESCO (2021), industri budaya dan kreatif (IKK) menghasilkan pendapatan global sebesar US\$2,25 triliun dan mempekerjakan hampir 30 juta orang sebelum pandemi COVID-19. Tren pemulihan pascapandemi menunjukkan percepatan digitalisasi di sektor ini, didorong oleh layanan streaming, penerbitan digital, dan teknologi kreatif. Misalnya, Bank Dunia (2023) melaporkan bahwa ekspor layanan digital, termasuk barang-barang kreatif, meningkat sebesar 13,4% di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah antara tahun 2020 dan 2022.

**Belanja Fiskal untuk Infrastruktur Kreatif:** OECD (2022) menunjukkan bahwa negara-negara anggota mengalokasikan antara 0,5% hingga 2,3% dari anggaran nasional mereka untuk mendukung industri kreatif, terutama melalui keringanan pajak R&D dan hibah inovasi. Investasi Korea Selatan dalam konten budaya melampaui USD 1,1 miliar pada tahun 2021, mendukung lebih dari 50.000 lapangan kerja di media digital dan tradisional. Sementara itu, inisiatif DE4A Bank Dunia menginvestasikan lebih dari USD 1,5 miliar di 35 negara Afrika untuk memperkuat ekosistem kreatif digital.

**Dampak Insentif Pajak:** Analisis keringanan pajak industri kreatif di Inggris menunjukkan pengembalian sebesar £8,30 dalam GVA (Nilai Tambah Bruto) untuk setiap £1 keringanan pajak yang diberikan. Demikian pula, sektor audiovisual Brasil mengalami pertumbuhan produksi film domestik sebesar 36% setelah penerapan kebijakan keringanan pajak yang ditargetkan. Di India, skema Startup India melaporkan lebih dari 80.000 startup terdaftar pada tahun 2023, dengan pangsa yang signifikan di bidang teknologi dan media kreatif.

**Efektivitas Kebijakan dan Kesenjangan Regional:** Meskipun terdapat kemajuan kebijakan, kesenjangan masih tetap ada. Meskipun Asia dan Amerika Utara mendominasi ekspor kreatif, Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan koordinasi fiskal yang lemah. Kesenjangan ini menggarisbawahi perlunya kebijakan fiskal yang terukur dan peka terhadap kawasan.

Sintesis: Data-data ini memvalidasi pendekatan multidimensi yang diperlukan untuk perancangan kebijakan fiskal di sektor kreatif. Instrumen kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti yang mencerminkan kondisi ekonomi, kapasitas teknologi, dan dinamika budaya lebih mungkin menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi ke depan harus mengintegrasikan indikator ekonomi makro dengan wawasan akar rumput untuk memastikan inklusivitas dan ketahanan.

## **5. Strategi Kreatif Era Digital**

Strategi fiskal untuk ekonomi kreatif di era digital, sebuah pendorong strategis bagi pembangunan inklusif. Strategi fiskal memainkan peran sentral dan transformatif dalam mendorong ekonomi kreatif berkembang pesat di era digital. Seiring dengan semakin kaburnya batasan antara budaya, teknologi, dan perdagangan, kebijakan fiskal muncul bukan hanya sebagai mekanisme pembiayaan, tetapi juga sebagai pendorong strategis bagi inovasi, inklusi, dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini telah mengeksplorasi bagaimana lembaga multilateral, negara-negara ekonomi maju (misalnya, OECD), dan negara-negara pasar berkembang (misalnya, BRICS) merancang dan menerapkan strategi fiskal untuk mendukung industri kreatif dalam beragam konteks sosial-ekonomi.

Ekonomi kreatif berkontribusi signifikan terhadap PDB global, diperkirakan sebesar 3% secara global, dan merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Namun, perkembangannya tidak merata, dipengaruhi oleh asimetri dalam kapasitas fiskal, kesiapan digital, dan koordinasi kelembagaan. Tiga wawasan utama muncul dari analisis komparatif ini:

1. Lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan UNESCO memainkan peran mendasar dalam pengembangan kapasitas dan investasi infrastruktur digital. Strategi fiskal mereka biasanya berfokus pada instrumen lunak seperti hibah, pinjaman lunak, dan bantuan teknis. Misalnya, inisiatif Ekonomi Digital untuk Afrika (DE4A) Bank Dunia merupakan model komprehensif yang menggabungkan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya manusia (Bank Dunia, 2023).
2. Negara-negara maju, terutama anggota OECD, telah mengadopsi mekanisme fiskal yang canggih dan berbasis data, seperti kredit pajak R&D, voucher inovasi, dan program keringanan khusus sektor (misalnya, Keringanan Pajak Sektor Kreatif di Inggris). Perangkat-perangkat ini terintegrasi dalam ekosistem kebijakan yang kuat yang didukung oleh lembaga budaya, klaster kreatif, dan sistem pemantauan longitudinal.
3. Negara-negara berkembang, terutama negara-negara BRIC, menerapkan instrumen fiskal yang pragmatis dan berorientasi pada pertumbuhan yang bertujuan untuk memperluas pasar, membangun citra nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Meskipun seringkali



kurang transparan atau dievaluasi secara sistematis, strategi-strategi seperti *Cinema do Brasil* di Brasil dan *Startup India* di India menawarkan wawasan berharga tentang kebutuhan dan prioritas fiskal industri budaya di negara-negara berkembang.

## **6. Melampaui Pembiayaan: Kebijakan Fiskal sebagai Infrastruktur Sistemik**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi fiskal paling efektif jika dikonseptualisasikan tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari sistem inovasi dan pembangunan yang lebih luas. Hal ini mencakup koordinasi dengan kebijakan pendidikan, perdagangan, TIK, ketenagakerjaan, dan perencanaan kota. Misalnya, insentif pajak tanpa investasi yang berkesinambungan dalam pendidikan kreatif atau akses digital dapat menyebabkan pertumbuhan yang dangkal, terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan dan di antara perusahaan-perusahaan formal. Dalam hal ini, strategi fiskal yang sukses memiliki lima karakteristik sistemik. Koherensi yang selaras di seluruh sektor dan jenjang pemerintahan. Fleksibilitas yang dapat diadaptasi untuk ekonomi kreatif informal dan model bisnis hibrida. Inklusivitas memprioritaskan komunitas terpinggirkan dan tradisi budaya lokal. Transparansi mencakup kriteria kelayakan yang jelas, sistem pemantauan dan evaluasi (M&E), dan pelaporan publik. Keberlanjutan mendorong investasi jangka panjang, alih-alih berbasis proyek.

Replikasi dan adaptasi kebijakan tidak cocok untuk semua. Meskipun analisis ini mengungkap pola-pola yang sama, analisis ini juga memperingatkan agar tidak menerapkan replikasi fiskal yang cocok untuk semua. Negara-negara harus mengadaptasi instrumen fiskal dengan aset budaya, model tata kelola, dan prioritas pembangunan mereka. Misalnya, program keringanan pajak membutuhkan perekonomian yang cukup formal dan kondisi administrasi perpajakan yang efektif, yang tidak selalu tersedia di negara-negara berpenghasilan rendah. Sebaliknya, model berbasis hibah mungkin lebih cocok di negara-negara dengan tingkat informalitas tinggi dan ekosistem kreatif yang baru berkembang.

Model hibrida yang menggabungkan insentif pajak, pendanaan publik, pembiayaan mikro, dan investasi infrastruktur kreatif tampaknya paling tangguh dan adaptif. Misalnya: Korea menggabungkan keringanan pajak untuk perusahaan konten digital dengan pendanaan langsung untuk platform ekspor K-drama dan K-pop (OECD, 2019). Indonesia menerapkan gabungan hibah budaya, inkubator startup, dan insentif sponsor swasta, yang dibiayai bersama oleh kemitraan publik-swasta. Estonia menggunakan barang publik digital dan infrastruktur e-governance berbiaya rendah untuk menawarkan dukungan kepatuhan pajak secara real-time bagi para pekerja kreatif lepas (UNESCO, 2021). Pendekatan semacam itu memungkinkan pemerintah untuk menjangkau aktor formal maupun informal, sekaligus membangun fondasi negara kreatif digital.

## **7. Temuan Baru dan Tantangan yang Muncul**

Beberapa isu yang muncul memerlukan keterlibatan fiskal yang lebih mendalam dan inovasi kebijakan, seperti berikut ini.

### **1. Dominasi Platform dan Penangkapan Nilai**

Platform digital (misalnya, Spotify, YouTube, TikTok) telah membentuk kembali rantai nilai kreatif, seringkali menghasilkan pendapatan yang tidak proporsional sekaligus membatasi kewajiban pajak melalui penataan lepas pantai. Sistem fiskal nasional harus berevolusi untuk menangani perpajakan digital, memastikan remunerasi yang adil bagi kreator lokal dan menghasilkan pendapatan publik. Hal ini sejalan dengan inisiatif OECD, yaitu Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang mengupayakan kerja sama global dalam memajukan bisnis digital secara adil (OECD, 2021).

### **2. Iklim dan Keberlanjutan Budaya**

Industri kreatif semakin terdampak oleh gangguan lingkungan, mulai dari para pengrajin yang terdampak perubahan iklim hingga sifat produksi digital yang intensif energi. Instrumen fiskal dapat dialihkan menuju produksi budaya hijau, seperti fesyen berkelanjutan, desain sirkular, dan pariwisata budaya rendah karbon, melalui kredit pajak atau obligasi kreatif hijau.

### **3. Kesenjangan Data dan Tantangan Pengukuran**

Kurangnya data standar mengenai kontribusi ekonomi kreatif menghambat pembuatan kebijakan berbasis bukti. Meskipun UNESCO dan WIPO telah mengembangkan akun satelit budaya, hanya sedikit negara yang mengelolanya secara teratur. Investasi dalam infrastruktur statistik budaya, yang didukung oleh alokasi fiskal, sangat penting untuk memantau dampak, mengalokasikan sumber daya, dan menilai hasil kesetaraan.

### **4. Rekomendasi Kebijakan Strategis**

Berdasarkan analisis komparatif dan tren yang muncul ini, rekomendasi berikut diusulkan:

- **Mengadopsi Model Fiskal Hibrida:** Pemerintah harus menerapkan strategi fiskal berlapis-lapis yang menggabungkan insentif pajak (untuk perusahaan kreatif formal), pendanaan publik (untuk perusahaan kreatif yang sedang berkembang dan informal), dan hibah pengembangan kapasitas (untuk keterampilan digital, kesiapan ekspor, dan laboratorium inovasi).

- Kolaborasi Kelembagaan di Semua Tingkat: Tata kelola kebijakan fiskal kreatif yang efektif membutuhkan koordinasi antarkementerian dan antarlembaga, yang menghubungkan kementerian kebudayaan, keuangan, pendidikan, TIK, dan perdagangan. Kemitraan internasional (misalnya, Jaringan Kota Kreatif UNESCO, program dukungan Bank Dunia) dapat mendorong pembelajaran lintas sektor dan bantuan teknis.
- Investasi Jangka Panjang dalam Infrastruktur dan Keterampilan: Fondasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan adalah investasi dalam infrastruktur digital, termasuk akses pita lebar, sistem pembayaran digital, dan platform hosting konten. Kurikulum seni pendidikan kreatif, pelatihan kewirausahaan, dan jalur vokasional di bidang desain, animasi, dan penceritaan digital juga sama pentingnya.
- Integrasikan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi (M&E): Semua instrumen fiskal harus mencakup sistem M&E terintegrasi yang melacak hasil budaya, ekonomi, dan sosial, terutama di antara kelompok rentan. Kerangka kerja seperti Indikator Budaya|2030 UNESCO dan pendekatan penganggaran berbasis hasil menyediakan templat untuk integrasi.
- Pastikan Kesetaraan dan Kepekaan Gender: Kebijakan fiskal harus mengatasi hambatan interseksional yang dihadapi perempuan, kelompok adat, dan pemuda dalam ekonomi kreatif. Penganggaran yang responsif gender, kuota dalam skema hibah, dan insentif yang ditargetkan untuk usaha kreatif yang dipimpin oleh minoritas diperlukan untuk inklusivitas.

## 8. Refleksi Penutup: Dari Dukungan Fiskal Menuju Kedaulatan Fiskal

Pada dasarnya, ekonomi kreatif menantang kita untuk memikirkan kembali tata kelola fiskal itu sendiri. Hal ini menuntut kedaulatan fiskal yang berakar pada kedaulatan budaya, sebuah model di mana keuangan publik tidak hanya mendukung pertumbuhan tetapi juga demokratisasi produksi, kepemilikan, dan distribusi budaya. Di era digital, di mana konten menyebar lebih cepat daripada hukum dan budaya seringkali mendahului politik, kebijakan fiskal menjadi alat tidak hanya untuk rekayasa ekonomi tetapi juga pembaruan demokrasi. Kesimpulannya, ekonomi kreatif global berada di persimpangan antara warisan budaya, disrupti teknologi, dan inovasi ekonomi. Agar berhasil, strategi fiskal harus bergerak melampaui mekanisme pendanaan transaksional menuju kebijakan publik yang transformatif. Pemerintah, lembaga multilateral, dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk menciptakan arsitektur fiskal yang inklusif, yang mendorong vitalitas budaya, peluang ekonomi, dan keadilan digital.

## **F. Kreativitas: Masa Depan Energi Terbarukan untuk Mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Tahun 2030**

### **1. Pendahuluan**

Kita sering membayangkan masa depan tanpa benar-benar meramalkannya dari apa yang sudah terjadi. Utopia yang kita bayangkan dan rencanakan—hidup menuju keberlanjutan dan inklusivitas—tampaknya menghadapi hambatan dari kenyataan. Hal ini tercermin dalam perlambatan kemajuan yang mengkhawatirkan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menempatkan setiap poin untuk Agenda 2030 pada risiko serius. Enam tahun sebelum tanggal jatuh tempo akhirnya, menurut laporan kemajuan 2024, lintasan SDG telah keluar jalur lebih dari tujuan lain karena dampak gabungan dari COVID-19, ketegangan perdagangan, meningkatnya utang di negara-negara berkembang, dan konflik geopolitik global. Di Indonesia, hal ini jelas terlihat dalam pasar kerja yang memburuk: kualitas pekerjaan menurun, PHK skala besar telah terjadi, dan banyak pekerja terpaksa beralih dari peran penuh waktu ke paruh waktu atau dari pekerjaan formal ke informal. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan, persentase pekerjaan penuh waktu menurun sebesar 1,88%.

Mencapai tujuan global yang ambisius ini dalam jangka waktu yang ditentukan membutuhkan lebih dari sekadar inovasi konvensional, realistis, dan imajinatif. Hal ini menuntut tekad untuk mempelajari apa yang berhasil dan kelincihan untuk beradaptasi dengan informasi baru dan tren yang terus berubah. Perserikatan Bangsa-Bangsa secara eksplisit mengakui bahwa "individu, inovasi, dan tindakan membantu planet ini mewujudkan potensi dan janji SDG." Dampak kreatif telah ditargetkan sebagai pendorong untuk mencapai tujuan-tujuan ini, yang hanya dapat dicapai melalui energi kreatif kolektif.

Sejalan dengan hal ini, industri kreatif Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, mempekerjakan sekitar 24,7 juta orang dan menyumbang 8% dari PDB Indonesia secara keseluruhan. Setiap pemangku kepentingan dalam siklus ekonomi kreatif saling memengaruhi. Sebagai contoh, sebuah kedai kopi yang indah di Jakarta, yang memanen biji kopinya dari petani lokal, mempekerjakan komunitas lokal di kafe atau di pojok hiburan mereka, dan menarik minat anak muda setempat yang mungkin membawa teman-teman mereka atau tidak. Seluruh siklus kedai kopi lokal ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jika kita yakin perlu menemukan sumber energi terbarukan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal hingga nasional, ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk menumbuhkan energi baru.

Namun, industri kreatif seringkali terabaikan dan merupakan salah satu yang paling dieksploitasi, meskipun sektor ini memiliki potensi yang jauh

lebih besar untuk mendorong produksi berkelanjutan dan pembangunan ekonomi. Di masa disrupsi, kreativitas muncul sebagai bentuk keberlangsungan hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencapai 66 juta pada tahun 2023, meningkat 2% dari tahun 2020. Namun, Indonesia sendiri masih kekurangan investasi dan fokus pada ekonomi kreatif, terbukti dari rendahnya prioritasnya dalam rencana 2025, di bawah sektor ekstraktif seperti pertambangan dan pertanian. Makalah ini akan mengeksplorasi pentingnya dampak energi kreatif dengan berspekulasi secara strategis terhadap kapasitas kreatif; dengan demikian, masyarakat dapat menemukan solusi imajinatif untuk mendorong tujuan-tujuan SDGs.

## **2. Kreativitas sebagai Sumber Daya dalam Ekonomi Pengetahuan**

Kreativitas dan inovasi saling terkait dan seringkali dianggap paralel. Stanford mendefinisikan kreativitas sebagai konsep yang berlaku untuk seseorang, suatu proses atau aktivitas, atau suatu produk, yang merupakan perluasan dari definisi Cambridge sebagai kemampuan untuk menghasilkan atau menggunakan ide-ide orisinal dan unik. Kedua definisi tersebut memberikan bobot yang berbeda pada kreativitas sebagai produk ekonomi dan sebagai kecerdasan manusia. Kreativitas diyakini sebagai input utama bagi ekonomi kreatif, yang berkaitan erat dengan ekonomi pengetahuan atau ekonomi intelektual. Ekonomi kreatif mencakup industri yang bergantung pada aktivitas kreatif, yang mengubah ide, kekayaan intelektual, pengetahuan, dan teknologi menjadi barang dan jasa dengan nilai ekonomi dan tujuan pasar.

Sejalan dengan kreativitas, inovasi muncul dari proses-proses ini, memungkinkan cara-cara baru dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi hasil karya kreatif—terutama dalam konteks teknologi yang sedang berkembang seperti Revolusi Industri 4.0 dan kecerdasan buatan (AI). Namun, narasi "kebaruan" merupakan inti dari kreativitas, yang seringkali mendorong individu-individu kreatif untuk terus-menerus menciptakan dan memecahkan masalah dengan mengungkap hal-hal yang tidak biasa atau tak terduga. Dorongan untuk orisinalitas ini seringkali menghasilkan inovasi yang disruptif, yang seringkali dianggap sebagai juru selamat bagi masalah-masalah yang kompleks dan "rumit". Sebaliknya, kreativitas dapat mengurangi disruptif dengan membingkai dan membingkai ulang narasi lokal atau yang sudah ada, serta menyempurnakannya melalui kolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat adalah penggerak ekonomi pengetahuan ini; dengan memelihara dan berinvestasi pada manusia, hal ini akan berdampak pada ekonomi pengetahuan.

Kreativitas pada dasarnya bersifat spekulatif, memungkinkan individu untuk membayangkan dan memanipulasi objek dan sistem masa depan yang belum ada. Kreativitas memungkinkan "pengajuan masalah", yang melibatkan identifikasi akar penyebab masalah dan mempertimbangkan masalah dari sudut pandang baru yang transformatif, alih-alih hanya menyelesaikan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemampuan untuk meramalkan masa

depan alternatif ini penting untuk melampaui batasan saat ini dan menciptakan visi untuk dunia yang lebih baik.

### **3. Disrupsi dan Inovasi Berkelanjutan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Inovasi seringkali muncul dari disrupsi, dan kreativitas telah lama diromantisir sebagai kekuatan disruptif. Sejarah penemuan membuktikan hal ini, mulai dari lampu hingga listrik, jam matahari hingga jam tangan pintar, api hingga revolusi industri, orkestra gamelan hingga layanan streaming musik, semuanya dipicu oleh pencarian sesuatu yang baru. Berakar pada fundamental yang sama, inovasi menjadi dasar fundamental dan keseharian sebagai bentuk penemuan. Pendekatan imajinatif ini diperlukan untuk mendorong setiap poin dalam SDGs dengan berspekulasi tentang strategi yang tepat untuk skenario masa depan.

Permintaan akan solusi kreatif dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global. Industri budaya dan kreatif berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dunia, lapangan kerja, inklusi sosial, keragaman budaya, dan pembangunan manusia, sehingga krusial bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNDP & UNESCO, 2013). Jika kreativitas disalurkan dengan baik di seluruh siklus penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa, hal ini akan memungkinkan disrupsi yang manusiawi di tempat kerja dan menghadirkan empati yang mendorong pencapaian semua poin dalam SDGs.

### **4. Agenda Ekonomi Kreatif di Indonesia**

Inovasi seringkali muncul dari disrupsi, dan kreativitas telah lama diromantisasi sebagai kekuatan disruptif. Sejarah penemuan membuktikan hal ini, mulai dari lampu hingga listrik, jam matahari hingga jam tangan pintar, api hingga Revolusi Industri, dan orkestra gamelan hingga streaming musik, semuanya dipicu oleh pencarian sesuatu yang baru. Berakar pada fundamental yang sama, inovasi menjadi dasar fundamental dan keseharian sebagai bentuk penemuan. Pendekatan imajinatif ini diperlukan untuk mendorong setiap poin dalam SDGs dengan merancang strategi yang sesuai untuk skenario masa depan. Permintaan akan solusi kreatif dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global. Industri budaya dan kreatif berkontribusi signifikan terhadap ekonomi dunia, lapangan kerja, inklusi sosial, keragaman budaya, dan pembangunan manusia, sehingga krusial bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UNDP & UNESCO, 2013). Jika kreativitas disalurkan dengan baik di seluruh siklus penciptaan, produksi, dan distribusi barang dan jasa, hal ini akan memungkinkan disrupsi yang manusiawi di tempat kerja dan menghadirkan empati yang mendorong pencapaian semua poin dalam SDGs.

Ekonomi kreatif Indonesia merupakan sektor yang dinamis dan berkembang pesat, yang diakui atas kontribusinya yang substansial terhadap pembangunan nasional. Terdiri dari 17 subsektor yang berbeda, termasuk kerajinan, fesyen, kuliner, arsitektur, musik, film, animasi, dan pengembangan

gim, ekonomi kreatif memanfaatkan kreativitas manusia dan kekayaan intelektual sebagai input utama. Hal ini mendorong agenda ambisius untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai sektor potensial sejak tahun 2009.

Pada tahun 2015, agenda "kreatif inklusif" muncul di Asia Tenggara. Agenda ini mendapatkan pengakuan internasional ketika Indonesia menyelenggarakan Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif (WCCE) dan KTT Sahabat Ekonomi Kreatif (FCE), yang mempertemukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Hal ini berujung pada pengesahan resolusi pertama tentang ekonomi kreatif dan keberlanjutan oleh Majelis Umum PBB (UNGA, 2019).

Meskipun pertumbuhannya mengesankan dan kebijakan yang suportif, ekonomi kreatif Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini meliputi kesenjangan infrastruktur, terutama akses internet dan fasilitas produksi di daerah, serta kebutuhan berkelanjutan akan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih kuat untuk mendorong inovasi. Lebih lanjut, terdapat kesenjangan yang disadari antara dukungan yang diberikan oleh usaha kreatif dan sosial kepada negara dan dukungan finansial yang mereka terima, dengan banyak yang masih membiayai sendiri meskipun pasar investasi berdampak sedang berkembang. Namun, tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk intervensi yang terarah guna membuka potensi penuh sektor ini untuk pembangunan berkelanjutan.

#### Energi Kreatif sebagai Masa Depan Inovasi Sosial

Konteks energi, sebagaimana didefinisikan oleh Badan Informasi Energi AS, adalah kemampuan untuk bekerja, sedangkan konteks "melakukan" dalam energi kreatif mengacu pada kemauan dan kapasitas manusia untuk berinovasi. Seorang profesor ekologi Amerika, Charles Hall, menjelaskan prinsip utama Energi yang Dikembalikan atas Energi yang Diinvestasikan (EROEI), yaitu energi dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tidak akan tersedia – jika jumlahnya kurang atau tidak seimbang dengan investasi yang dibutuhkan. Ia juga menambahkan, "Anda tidak dapat memiliki perekonomian tanpa energi. Energilah yang melakukan pekerjaan." Peluang adalah outlet energi kreatif tempat aliran energi benar-benar didistribusikan; hal ini menciptakan harapan dan kondisi optimal. Kondisi optimal adalah kondisi mengalir, di mana tantangan dan peluang dari tugas tersebut sesuai dengan tingkat keterampilan kreatif. Ketika peluang tidak dapat diakses dan hambatan finansial terus berlanjut, energi kreatif ini menjadi tidak dapat dialihkan atau terhenti tanpa upaya yang dapat ditindaklanjuti.

Dalam lanskap kapitalis saat ini, banyak desainer dan praktisi kreatif mengalami kekecewaan. Mereka diharapkan menghasilkan inovasi konsumen yang cepat dalam sistem yang didominasi oleh ketimpangan struktural. Lingkungan ini seringkali menyebabkan kelelahan, karena para pekerja kreatif merasa karya mereka parasit, tidak optimal, kehilangan otonomi, dan terpisah dari potensi transformatifnya. Jika kita menempatkan konteks kelelahan dalam energi kreatif, ini bisa menjadi makna analogis dari kehabisan energi.

Oleh karena itu, setiap orang yang kreatif memiliki kapasitas untuk merancang yang dapat mengaktifkan, mempertahankan, dan mengarahkan proses perubahan sosial menuju keberlanjutan. Berinvestasi dalam tujuan manusia dan memfasilitasi karya kreatif merupakan cara baru untuk melibatkan pekerja kreatif dan/atau desainer ke dunia dan apa yang dapat dilakukan desain dengan dan untuk orang-orang yang hidup di dalamnya. Desain dapat menghasilkan pergeseran menuju tindakan yang memodelkan masa kini alternatif dan kemungkinan masa depan dalam bentuk material dan pengalaman. Jika kreativitas disatukan, ia akan menciptakan masa depan yang lebih progresif yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga inovasi sosial.

## 5. Metodologi

### Desain Penelitian

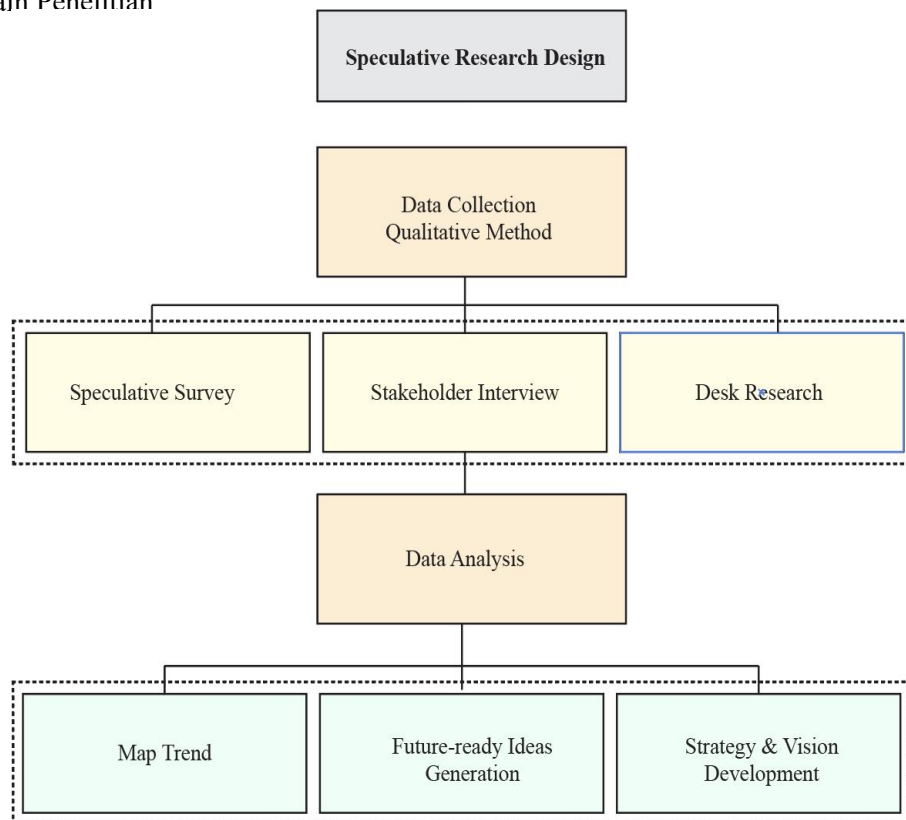


Diagram 1. Metodologi dan Metode

Studi ini mengadopsi desain penelitian metode campuran, yang didukung oleh metodologi kualitatif dan wawasan strategis. Pendekatan metodologi campuran ini cocok untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang dikonstruksi secara sosial—dalam hal ini, gagasan kreativitas sebagai



energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan—melalui wawasan mendalam dari para ahli dan masukan imajinatif dari para partisipan, yang akan dianalisis berdasarkan tingkat dampaknya. Wawasan ke depan dipilih sebagai kerangka kerja panduan karena menekankan pemahaman tentang masa depan yang masuk akal dan diinginkan, alih-alih memprediksi satu hasil tunggal.

Secara khusus, penelitian ini mengikuti kerangka kerja foresight tiga langkah yang diadaptasi, yang dikembangkan bersama oleh Arup dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk pemikiran masa depan (2022). Kerangka kerja ini menyediakan "jalur" terstruktur untuk mengeksplorasi tren yang muncul secara sistematis, menghasilkan ide-ide inovatif, merumuskan respons strategis, dan membayangkan skenario masa depan dampak kreatif dalam keberlanjutan. Metodologi ini mengintegrasikan jalur-jalur foresight ini menggunakan pengumpulan data kualitatif (wawancara pakar dan survei spekulatif) dan teknik analisis. Dengan menggabungkan perspektif pakar, imajinasi partisipatif, dan perangkat foresight, penelitian ini mampu membangun pemahaman yang kaya dan berwawasan ke depan tentang bagaimana kreativitas dan komunitas dapat mendorong keberlanjutan di Indonesia.

#### Wawancara komunitas

Pada bulan April 2025, data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pakar ekonomi kreatif Indonesia. Strategi pengambilan sampel purposif digunakan untuk merekrut partisipan dari berbagai komunitas dan kreator dengan keahlian yang relevan. Detail partisipan wawancara dijelaskan pada tabel di bawah ini:

<b>Peserta Komunitas</b>	<b>Keterangan</b>
KTTPemudaEkonomiKreatifASEAN (ACE-YS)	Sebuah inisiatif yang berfokus pada pengembangan tindakan kolektif untuk menavigasi peluang global dalam ekonomi kreatif dan digital.
Klub Lari Heir	Komunitas lari muda yang berbasis di Jakarta.
Bogor Illustration Hub (BIH)	Komunitas ilustrator kolektif di Bogor, Jawa Barat.

Momentum Sudut	Label musik independen dan pencipta musik dari Jakarta, Indonesia.
----------------	--

Tabel 2. Peserta Wawancara

Panduan wawancara berfokus pada empat topik utama: (1) Peran dan pentingnya komunitas dalam ekosistem kreatif; (2) Bagaimana komunitas mendukung ekonomi kreatif; (3) Bagaimana kreativitas dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan sosial; (4) Tren sosial, budaya, atau ekonomi yang sedang berkembang yang memengaruhi sektor kreatif; dan (5) Tantangan dalam industri kreatif. Pertanyaan terbuka mendorong para ahli untuk merefleksikan perubahan terkini, berbagi narasi atau contoh, dan berspekulasi tentang perkembangan di masa mendatang. Setiap wawancara (berdurasi sekitar 60 menit) dilakukan secara langsung atau melalui panggilan video, direkam audio dengan izin, dan ditranskripsi kata demi kata untuk dianalisis. Pendekatan ini menghasilkan wawasan kualitatif yang kaya tentang praktik terkini dan kemungkinan masa depan dari perspektif yang berpusat pada komunitas.

### Survei Spekulatif

Selain wawancara, survei spekulatif masa depan juga dilakukan secara daring (melalui Typeform) untuk menjaring masukan imajinatif dari audiens yang lebih luas. Survei ini mengundang peserta—terutama kaum muda kreatif, mahasiswa, dan pemuda yang tersebar di Indonesia hingga Inggris—untuk membayangkan sebuah "kafe kreatif" di masa depan dan mendeskripsikan fungsi sosial serta atmosfernya.

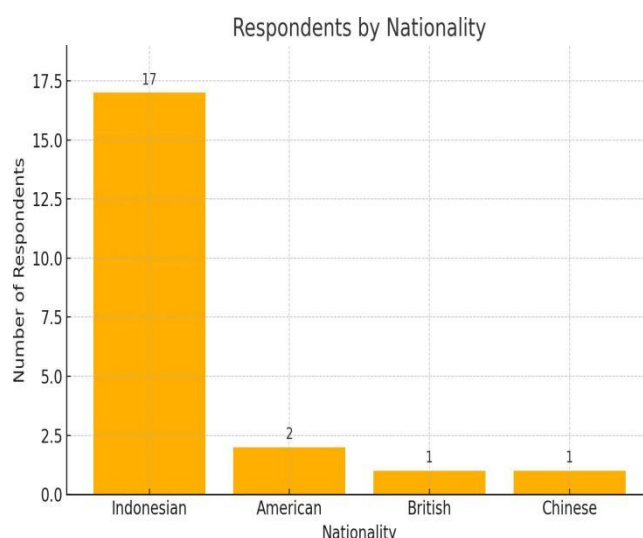


Diagram 2. Responden Berdasarkan Kebangsaan

Dorongan kreatif ini dirancang untuk memunculkan visi tentang bagaimana ruang kreatif publik dapat berkembang (misalnya berfungsi sebagai laboratorium inovasi, pusat energi komunitas, studio pendidikan, dll.). Responden memberikan deskripsi tertulis atau cerita sebagai tanggapan atas pertanyaan terbuka tentang kegiatan kafe kreatif yang dibayangkan, pemangku kepentingan, dan dampaknya terhadap masyarakat.

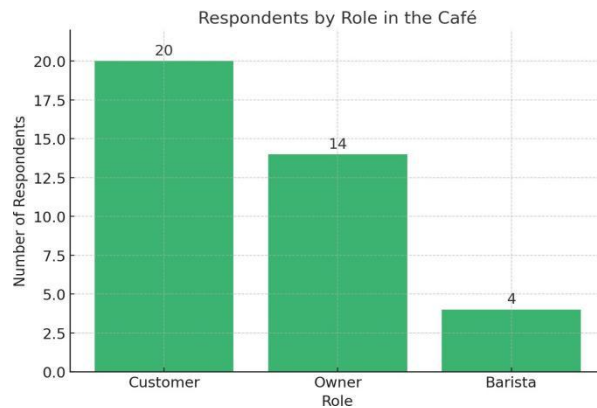


Diagram 3. Membayangkan Peran Menggunakan Roleplay

Sebanyak 50 tanggapan survei dikumpulkan selama periode dua minggu. Sifat spekulatif survei ini sejalan dengan penggunaan latihan visioning oleh Foresight untuk melibatkan peserta dalam memikirkan preferensi. Data survei ini melengkapi wawancara pakar dengan menawarkan visi kreatif akar rumput dan aspirasi sosial yang mungkin tidak muncul dalam wacana pakar.

### Tren Masa Depan

Untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang data primer, diperlukan data sekunder dari publikasi dan jurnal untuk memperluas pengetahuan yang ada dan menjembatannya dengan informasi eksternal. Data sekunder berfokus pada justifikasi data dari laporan pemerintah dan kebijakan publik, laporan lembaga riset resmi, dan publikasi dari berbagai pihak. Data sekunder akan membantu mengisi kesenjangan antara aspirasi sosial yang belum terlihat dan implementasi nyata yang ada, yang akan berkontribusi pada tren masa depan.

Dengan menggabungkan semua metode, kedua sumber data ini menyediakan fondasi kualitatif yang kuat – memadukan pengetahuan pakar dunia nyata dengan masukan skenario imajinatif – untuk analisis pandangan ke depan selanjutnya.

### Tren Peta

Tren peta ini menggunakan sinyal-sinyal yang muncul dari survei sebagai data primer yang nantinya akan divalidasi menggunakan wawasan pakar dan data yang tersedia dari riset pustaka. Tren ini akan diterjemahkan sebagai implikasi terhadap masa depan yang spekulatif. Tren ini akan menyoroti aspek sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan politik sebagai tema untuk mengeksplorasi masa depan dampak kreatif dalam inovasi sosial.

Tren	Wawasan & Sinyal	Peluang	Tantangan
Sosial			
Berkembangnya interdisipliner komunitas kreatif di Indonesia	Menurut ACE-YS, komunitas di Asia, khususnya Indonesia, memiliki kekuatan yang signifikan karena penekanan budaya pada dukungan timbal balik dan kerja kolektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komunitas yang memperkuat ikatan komunitas untuk menciptakan gerakan (ACE-YS, 2025).</li> <li>- Menurut BIH dan HeirRun Club, komunitas memberikan rasa nilai-nilai bersama dan koneksi yang terikat dalam minat yang sama.</li> <li>- Masa depan industri kreatif dan komunitasnya di Indonesia diperkirakan akan terus bertumbuh dalam jumlah komunitas seiring orang mencari ruang alternatif. (ACE-YS, 2025).</li> <li>- Survei membuktikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Representasi dan inklusivitas dari berbagai bakat dan spektrum kreatif (ACE-YS, 2025).</li> <li>- Menemukan orang-orang dengan nilai yang sama (HeirRun Club).</li> </ul>

		bahwa 26,3% orang tertarik untuk terlibat dalam acara kreasi bersama di luar angkasa.	
Menumbuhkan rasa bangga dan pengakuan budaya lokal di kalangan pemuda	Dari survei, 59,5% responden meyakini kafe mereka mempromosikan keaslian budaya; 92% ingin menjadi bagian dari komunitas yang menghidupkan kafe.	Memperkenalkan budaya dan kerajinan lokal melalui ruang ketiga; dan komunitas dapat membantu memudahkan promosi budaya lokal.	Terlepas dari mayoritas orang yang meyakini bahwa luar angkasa adalah tempat terbaik untuk mempromosikan budaya, hanya 21,1% orang yang merasa nyaman untuk sepenuhnya tenggelam dalam suasana budaya yang autentik.
Teknologi			
Penetrasi di akses internet inklusif di seluruh Indonesia	Menurut Menteri Informasi dan Teknologi, pada tahun 2024 kemajuan penetrasi akses internet di seluruh nusantara telah mencapai 79,5%.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendobrak batasan dalam berkolaborasi dengan kreator atau komunitas lain di seluruh dunia (Angular Momentum, 2025).</li> <li>- Kemudahan dalam mempromosikan karya seni atau produk menggunakan pemasaran digital yang terjangkau (Angular Momentum,</li> </ul>	Merujuk pada survei, 52,6% orang menyiratkan perlunya memiliki koneksi nyata dalam kehidupan nyata dengan menunjukkan bagaimana mereka ingin berada di tempat di mana mereka benar-benar dapat duduk dan berbicara.

		2025).	
Pemanfaatan positif tren viral media sosial	Media sosial dapat secara signifikan memperkuat gerakan komunitas dan individu kreatif, seperti fenomena "Nenengisme" dan inisiatif Motherbank, dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi. (ACE-YS, 2025).	<p>Konektivitas digital telah membuka peluang kerja dan proyek secara signifikan bagi individu kreatif di Indonesia (Angular Momentum, 2025).</p> <p>Kehadiran di Instagram telah memainkan peran besar dalam pertumbuhannya. Postingan aktivitas grup memicu minat baik dari teman maupun orang asing, menunjukkan bagaimana berbagi daring secara alami memperluas komunitas (HeirRun Club, 2025).</p>	Namun, sifat media sosial yang cepat membutuhkan strategi untuk mempertahankan keterlibatan dan diskusi jangka panjang (ACE-YS, 2025).
Munculnya penggunaan AI dalam industri kreatif	Kemajuan maju dalam AI generatif dapat membawa kebaikan dan keburukan (BIH, 2025).	AI memiliki potensi dalam membantu tahap pendefinisian dan penelitian, yang membuat hasil karya kreatif lebih elaboratif (BIH, 2025).	Kekhawatiran tentang implikasi etisnya, potensi merendahkan nilai seni ciptaan manusia, dan tantangan yang mungkin ditimbulkan AI bagi ilustrator

			baru untuk membangun diri (BIH, 2025).
Ekonomis			
Kreativitas sebagai ekonomi pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekonomi kreatif menunjukkan potensinya untuk lapangan kerja berkelanjutan selama pandemi, dengan sektor-sektor seperti permainan, film, dan platform daring berkembang pesat di Indonesia (ACE-YS, 2025).</li> <li>- Komunitas kreatif telah menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan melalui keterlibatan masyarakat, lokakarya atau acara (BIH, 2025).</li> <li>- Merek-merek lokal yang sedang naik daun telah bermunculan di banyak bazar-pop-up lokal seperti Bright-spot. Jumlah penyewa lokal meningkat dalam setahun, dari 228</li> </ul>	<p>Survei menyimpulkan bahwa 36,1% responden menunjukkan minat dalam mempelajari budaya dan kreativitas, sementara 38,9% lainnya cukup tertarik. Hal ini menyiratkan perlunya peningkatan keterampilan menuju kreativitas yang lebih tinggi.</p> <p>Acara kreatif mengundang lebih banyak orang untuk datang ke suatu acara atau ruang ketiga, hampir 52,6% responden cenderung lebih terlibat dan bersedia datang ke acara kreatif.</p> <p>Kesediaan untuk memperdagangkan nilai tak berwujud dari kekayaan intelektual dalam komunitas kreatif</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan ekonomi kreatif berpusat pada kota metropolitan, oleh karena itu, tidak tersebar merata di seluruh Indonesia (HeirRun &amp; BIH, 2025).</li> <li>- Klasifikasi kategori industri kreatif selalu berubah, dan sulit untuk menentukan kategori mana yang masih dianggap sebagai sektor kreatif atau tidak (ACE-YS, 2025).</li> <li>- Regenerasi dalam kreativitas dan kerajinan untuk ekonomi masa depan.</li> </ul>

	pada tahun 2024 menjadi 320 pada tahun 2025 (HighEnd & Femina, 2025).	seperti HeirRun dari merek yang ingin berkolaborasi untuk keterlibatan (HeirRun, 2025).	
Pekerja terampil-multimoda	<p>Kreativitas berkembang pesat di bawah krisis yang dibuktikan dengan kemampuan beradaptasinya selama ketidakpastian pandemi dan banyak orang mengalihkan karier mereka ke pekerjaan informal (ACE-YS, 2025).</p> <p>Komunitas dapat mendatangkan nilai kemasyarakatan dan ekonomi jika kesadarannya ditingkatkan (HeirRun 2025).</p>	<p>Kreativitas, jika dikaitkan dengan pentingnya pekerjaan berkualitas baik, pemasaran yang efektif (terutama di era digital), dan ketekunan, dapat menjadi faktor yang menonjol untuk keterampilan yang kuat dari latar belakang yang kurang beruntung (Angular Momentum, 2025).</p> <p>Kolaborasi digital dapat mendiversifikasi bakat dan keterampilan dalam industri kreatif (Angular Momentum, 2025).</p>	<p>Modal berbasis manusia adalah kelompok rentan yang paling mungkin dieksploitasi (Larusso, 2024).</p> <p>Mendapatkan dukungan pemerintah untuk usaha kreatif seperti pertunjukan dapat menjadi tantangan karena prosesnya rumit dan melibatkan banyak langkah serta birokrasi (Angular Momentum, 2025).</p>
Lingkungan			
Industri eksploitatif yang merusak ekologi seperti polusi	- Industri ekstraktif masih menjadi fokus utama pertumbuhan ekonomi. Industri	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2019) telah meluncurkan	Tokenisme dalam kurangnya keterlibatan komunitas kreatif dan praktisi kreatif



	<p>kreatif justru ditempatkan sebagai prioritas paling rendah dalam prospek ekonomi (Kemenkeu RI, 2025).</p> <p>- Komunitas dapat mendatangkan nilai kekeluargaan dan ekonomi jika kesadarannya ditingkatkan (HeirRun 2025).</p>	<p>berbagai program dan kebijakan untuk mendorong pariwisata berkelanjutan. Kebijakan utama meliputi pengurangan emisi karbon dan pelestarian sumber daya alam, budaya, dan tradisi lokal (JakartaPost, 2019).</p>	<p>dalam pengambilan keputusan kebijakan (ACE-YS, 2025).</p>
<p>Meningkatnya seni ekologi, bangunan hijau, dan komunitas ekologi kreatif</p>	<p>Meningkatnya komunitas interdisipliner yang melibatkan praktisi kreatif dan akademisi untuk menjembatani kesenjangan antara permasalahan dan pemangku kepentingan, terbukti dengan hadirnya komunitas seperti Design Matter Lab, Gudskul, dan Ruang Rupa sebagai kolektif seni yang menyuarakan tantangan kompleks tersebut.</p>	<p>Praktisi dan komunitas kreatif berpotensi menjadi pemungkin desain regeneratif dan masa depan regeneratif dengan menggunakan platform mereka untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan praktik berkelanjutan (ACE-YS, 2025).</p> <p>Permasalahan kolektif dan bersama dari masyarakat akar rumput yang memajukan masyarakat.</p>	<p>Pendanaan tidak didistribusikan secara merata kepada komunitas atau kreator yang kurang menguntungkan (ACE-YS, 2025).</p>
Politik			

Ekonomi kreatif sebagai mata uang politik internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Munculnya diplomasi kuliner sebagai perpanjangan pertumbuhan industri kreatif.</li> <li>- Ekonomi kreator telah terbukti menjadi kolaborator internasional yang paling efektif, terutama di era digital (Angular Momentum, 2025).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konektivitas digital dapat dengan mudah mempromosikan konten lokal dan budaya yang dapat menyentuh khalayak internasional (Angular Momentum, 2025).</li> <li>- Survei membuktikan bahwa 51,4% orang ingin melihat budaya lokal dan tradisional di ruang ketiga. Hal ini menunjukkan keinginan untuk melihat narasi lokal.</li> </ul>	Akses dan pendanaan informasi masih menjadi perjuangan untuk mencapai tingkat internasional (BIH & Angular Momentum, 2025).
Memberikan orang otonomi untuk memutuskan bagaimana mereka ingin menjalani usaha kreatif mereka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi keterbatasan dalam dukungan pemerintah di tingkat makro karena faktor politik, individu dan komunitas kreatif umumnya tangguh dan dapat bertahan hidup melalui inisiatif mereka sendiri (ACE-YS, 2025).</li> </ul>	Ekspansi dan program bagi usaha rintisan dan inkubator mulai tampak dari Kementerian Ekonomi Kreatif.	Pekerjaan informal bersifat sementara, membuat ketidakpastian menjadi lebih nyata untuk masa depan (ACE-YS, 2025).

Tabel 1. Peta Tren STEEP

Sebuah studi perbandingan akan dilakukan untuk menghubungkan tren STEEP dengan poin-poin relevan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030-an, setelah mengklasifikasikan peta tren berdasarkan sumber data. Hal

ini akan memungkinkan pemeringkatan prioritas dampak tren dari terendah (1) hingga tertinggi (5).

Kecenderungan	SDGs yang terkait	Dampak (1-5)	Ketidakpastian (1-5)
Mengembangkan komunitas kreatif interdisipliner	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 11, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8	5	2
Menumbuhkan kebanggaan budaya kaum muda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4, TPB 11	4	2
Akses internet inklusif	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 9, TPB 10	4	2
Media sosial memperkuat gerakan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 9, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 17	3	3
Munculnya AI dalam ekonomi kreatif	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, TPB 9	5	4
Kreativitas sebagai ekonomi pengetahuan	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8, TPB 9, TPB 4	5	2
Pekerja terampil multimoda	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 4, TPB 8	4	3

Industri eksploitatif merusak ekologi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 12,  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 13	5	2
Komunitas seni ramah lingkungan dan kreatif hijau	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 12,  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 13	5	3
Ekonomi kreatif sebagai mata uang politik	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 17,  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8	3	4
Otonomi dalam kehidupan kreatif	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10, TPB 16	4	5

Tabel 2. Peta Tren Dampak terhadap SDGs

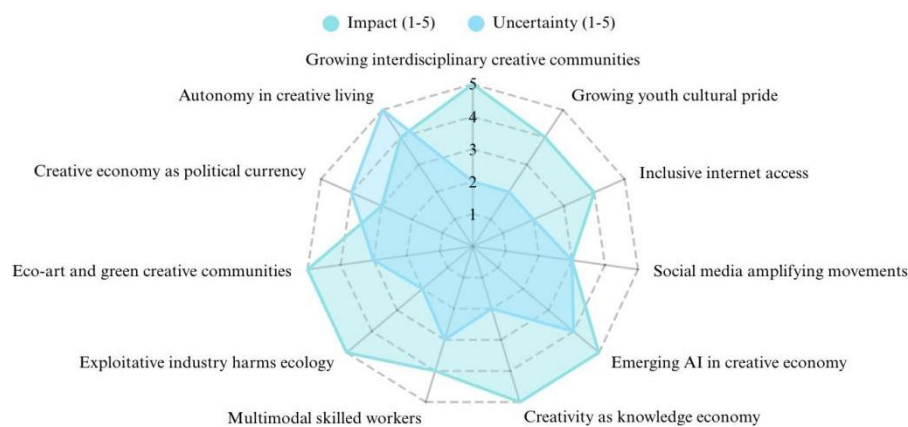


Diagram 4. Peta Radar tentang Dampak Tren dan Ketidakpastian

Dari dampak tren yang disintesis, pemetaan dapat dikategorikan berdasarkan dampak kritis dan ketidakpastian tren. Ketidakpastian mengacu pada bagaimana dampak tren dapat benar-benar dan berpotensi mengarah ke

arah masa depan, berdasarkan wacana dan sumber data yang tersedia. Oleh karena itu, ringkasan tren didefinisikan sebagai berikut:

- **Prioritas Tinggi (Dampak Tinggi, Ketidakpastian Rendah):** Tren seperti "kreativitas sebagai ekonomi berbasis pengetahuan", "industri eksploitatif yang merusak ekologi", dan "berkembangnya komunitas kreatif" harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan atau program. Hal ini dikarenakan dampaknya yang tinggi dan prediktabilitasnya yang relatif tinggi.
- **Ketidakpastian Kritis (Dampak Tinggi, Ketidakpastian Tinggi):** Munculnya "AI dalam ekonomi kreatif" dan "otonomi dalam kehidupan kreatif" menunjukkan potensi besar. Namun, keduanya memerlukan pemantauan dan pendekatan spekulatif karena tingginya tingkat ketidakpastian.
- **Spekulatif/Monitor (Dampak Rendah, Ketidakpastian Tinggi):** Misalnya, "ekonomi kreatif sebagai mata uang politik" cocok untuk strategi jangka panjang atau eksperimen skenario.

### **Generasi Ide Siap Masa Depan**

Diambil dari matriks prioritas tren masa depan, "kreativitas sebagai ekonomi pengetahuan" dan "industri eksploitatif yang merusak ekologi" merupakan tren kritis yang menuntut tindakan segera dan intervensi kebijakan yang tegas karena dampaknya yang mendalam terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). "Kreativitas sebagai ekonomi pengetahuan", yang juga didukung oleh komunitas kreatif yang terus berkembang, secara langsung mendukung SDGs seperti Pekerjaan Layak (SDGs 8), Inovasi (SDGs 9), dan Pendidikan Berkualitas (SDGs 4). Menurut data, "Industri eksploitatif merusak ekologi" melemahkan SDGs seperti Aksi Iklim (SDGs 13), dan Konsumsi Bertanggung Jawab (SDGs 12) melalui pengelolaan limbah dan polusi.

Validitas dan signifikansi tren-tren ini didukung dengan baik oleh data, penelitian, dan wawasan komunitas yang ekstensif, yang menunjukkan manfaat ekonomi dari ekonomi berbasis pengetahuan kreatif dan kerusakan lingkungan akibat industri eksploitatif. Bukti kuat ini menghilangkan spekulasi dan mendorong tindakan. Yang terpenting, tren-tren ini memiliki ketidakpastian yang rendah, sehingga memungkinkan intervensi kebijakan yang cepat dan efektif.

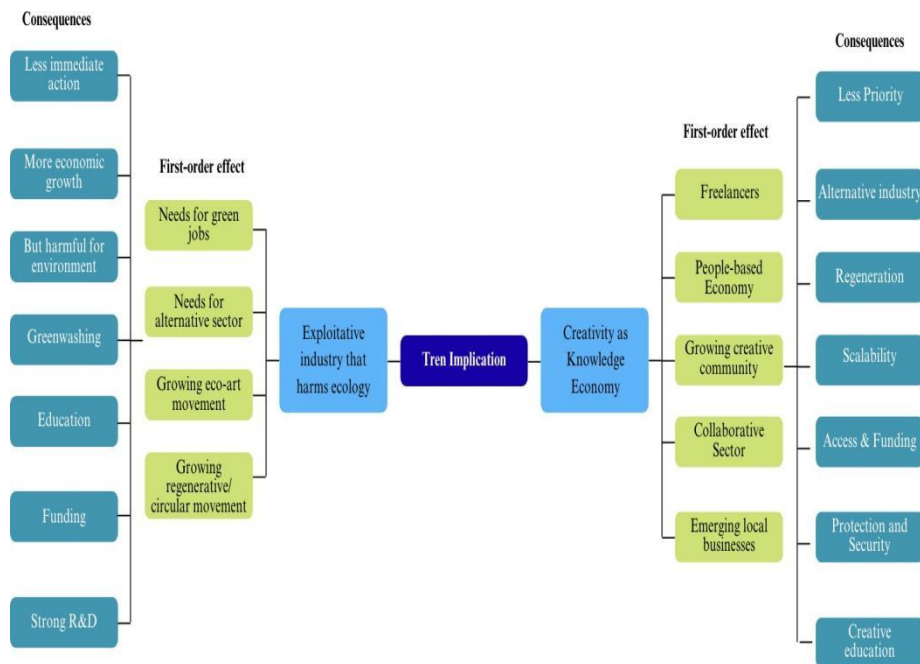


Diagram 5. Implikasi dan Konsekuensi Tren

Dengan memprioritaskan kreativitas, implikasi tren mengarah pada kreativitas sebagai pengetahuan dan alternatif bagi industri ekologi, yang menawarkan ide-ide yang siap menghadapi masa depan dan layak. Implikasinya membahas sinyal dari efek tingkat pertama dan mengekstrapolasinya menjadi kemungkinan konsekuensi yang tertanam dalam tren yang dipilih—ekonomi dan lingkungan. Kesamaan kata kunci antara tren yang dibahas pada diagram di atas adalah kemampuan kerja, sumber daya berbasis manusia, dan regeneratif yang menyiratkan efek tingkat pertama dari tren tersebut. Sementara itu, konsekuensi yang mendasarinya menyoroti bagaimana pendanaan, akses, pendidikan, dan sektor prioritas masih menjadi isu dalam industri kreatif.

## 6. Pengembangan Strategi

Untuk mempersiapkan kreativitas sebagai energi terbarukan di masa depan, pengembangan strategis akan menghasilkan skenario-skenario yang berfokus pada manusia dan lingkungan sebagai pemain kunci utama. Strategi ini dijalankan berdasarkan implikasi tersebut menggunakan kerangka kerja skenario dua sumbu. Sumbu y merepresentasikan tingkat kreativitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan, sementara sumbu x mengukur kreativitas yang mendukung manusia dan ekonomi berbasis pengetahuan. Keempat skenario yang dihasilkan didasarkan pada tren terkini dan sinyal spekulatif yang diperoleh dari wawasan masyarakat, survei, dan riset pustaka.

Setiap skenario mengeksplorasi lintasan unik yang mencerminkan potensi dampak kreatif Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan di masa depan.

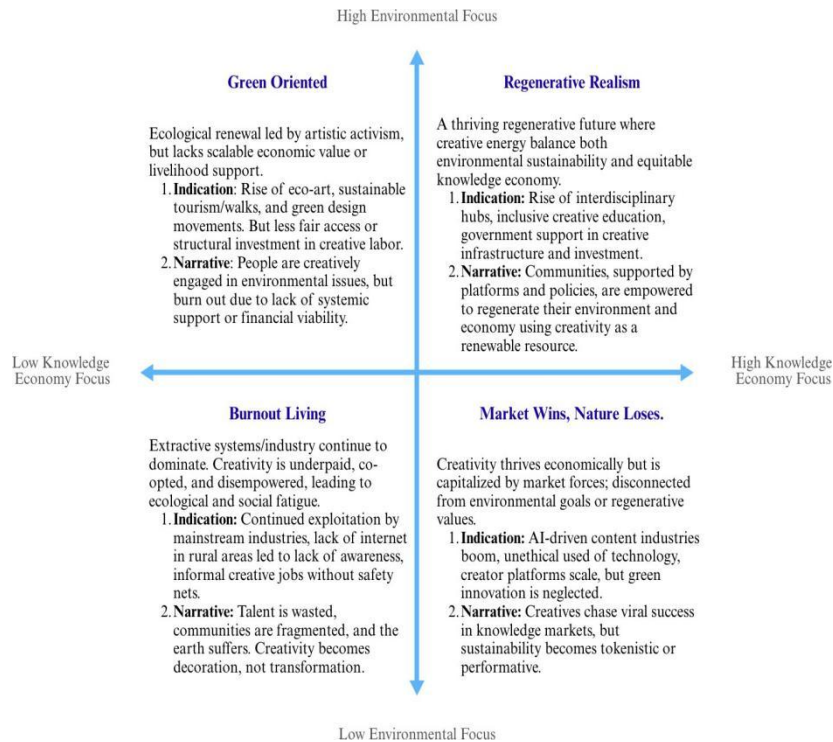


Diagram 6. Skenario Tahan Masa Depan

- Skenario 1: Berorientasi Hijau

Kreativitas tinggi untuk lingkungan, kreativitas rendah untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Di masa depan ini, komunitas kreatif, desainer, dan seniman sangat terlibat dalam restorasi ekologi, aktivisme iklim, dan desain regeneratif. Festival seni ramah lingkungan, pusat daur ulang, dan gerakan kerajinan berkelanjutan menjadi tren utama di ruang perkotaan dan pedesaan. Terlepas dari kontribusi lingkungan mereka, para pekerja kreatif masih kekurangan dana dan terputus dari pengetahuan dan sistem ekonomi yang lebih luas. Sektor kreatif berjuang dengan mata pencaharian yang tidak pasti, kurangnya investasi, dan minimnya pengakuan sebagai jalur karier yang layak. Banyak organisasi dan produk menerapkan pendekatan inovatif dan kreatif untuk mendorong masa depan yang berorientasi pada lingkungan. "The Daily Dump" di India merupakan contoh bisnis yang menata ulang hubungan manusia dengan bumi, dengan satu sama lain, dan dengan lingkungan perkotaan kita. Pada dasarnya, pekerjaan mereka berpusat pada transformasi pola pikir mengenai "sampah" dan mata pencaharian marginal.

- Skenario 2: Realisme Regeneratif

Kreativitas tinggi bagi lingkungan dan ekonomi berbasis pengetahuan. Inilah masa depan yang paling ideal dan regeneratif, di mana kreativitas menjadi mata uang baru bagi lingkungan dan sistem ekonomi. Dalam skenario ini, para kreator, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta bersama-sama merancang ekosistem kreatif yang memberdayakan individu untuk berkembang sekaligus memulihkan lingkungan. Ruang ketiga atau ruang publik seperti kafe inovasi yang dikelola komunitas, festival ekologi, dan pusat interdisipliner mendorong ekonomi sirkular dan meningkatkan keterampilan pemuda dalam kerajinan digital maupun tradisional. Karya kreatif diakui sebagai kontribusi serius bagi perekonomian, dengan pendanaan, pendidikan, dan keterlibatan publik yang memadai. Di sini, kreativitas mendorong pembangunan berkelanjutan dengan menjembatani potensi manusia dengan pengelolaan lingkungan untuk membentuk masyarakat yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi masa depan.

Ekonomi sirkular yang mengintegrasikan inovasi budaya dan praktik berkelanjutan tampaknya semakin berkembang seiring dengan meluasnya "bioekonomi", yang berakar dari G20 2024 di Brasil. Konvergensi ekonomi kreatif dan ekonomi sirkular secara alami melibatkan penggunaan kembali, pemanfaatan kembali, dan daur ulang produk limbah, di samping adopsi material alternatif. Contoh skenario ini tercermin dari organisasi Sistem Pangan Sirkular untuk Rwanda yang menunjukkan dampak yang masuk akal terhadap masa depan regeneratif yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan lingkungan berkelanjutan. Organisasi ini memiliki misi untuk mengubah sistem pangan Rwanda menjadi model sirkular yang berkelanjutan dengan mengatasi limbah pangan global dan konsumsi sumber daya yang berlebihan. Organisasi ini beroperasi berdasarkan tiga prinsip inti: mempromosikan produksi pangan regeneratif, mengurangi kehilangan dan pemborosan pangan, dan memanfaatkan sumber daya yang terbuang secara inovatif. Prinsip terakhir ini khususnya bermanfaat bagi banyak UKM di Rwanda, yang mencakup sekitar 98% dari seluruh bisnis nasional. Oleh karena itu, organisasi ini menarik kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu merek multinasional dan pemerintah.

- Skenario 3: Hidup dalam Kelelahan

Kreativitas yang rendah, baik untuk lingkungan maupun ekonomi berbasis pengetahuan. Masa depan ini ditandai dengan kekecewaan dan stagnasi. Industri ekstraktif terus mendominasi kebijakan, investasi, dan kapitalisasi pasar, mendorong tenaga kerja kreatif ke pinggir. Ketidadaan dukungan dan infrastruktur pemerintah untuk pengembangan kreatif mengakibatkan upaya-upaya yang terfragmentasi dan terisolasi yang gagal menciptakan dampak sistemik. Pekerjaan informal tersebar luas,



tetapi tidak memiliki jaminan sosial atau kelangsungan jangka panjang. Degradasi ekologis semakin intensif, karena kontribusi kreatif dikesampingkan dari wacana lingkungan. Ruang digital menjadi ruang gema, sementara kolaborasi di dunia nyata menurun. Kreativitas hanya ada sebagai estetika tingkat eksekusi. Akibatnya, praktisi kreatif dan inovator merasa terkuras secara emosional dan sosial, kehilangan tujuan dan kekuatan. Skenario ini sering terjadi di kalangan pekerja kreatif yang bekerja di bawah tekanan untuk memenuhi mesin ekonomi. Hal ini semakin dipertegas oleh "Paradoks Desain Pragmatis", di mana para desainer menghadapi ketegangan antara mengatasi masalah struktural yang "tidak dapat dipecahkan" dalam pengertian tradisional dan kebutuhan untuk menghasilkan hasil nyata dengan sumber daya yang terbatas. Selain itu, ketika dihadapkan dengan isu global seperti perubahan iklim, desainer atau seniman mungkin merasa kontribusi mereka "tidak penting dalam skema besar" dalam skenario tersebut.

- Skenario 4: Pasar Menang, Alam Kalah

Kreativitas rendah untuk lingkungan, kreativitas tinggi untuk ekonomi berbasis pengetahuan. Skenario yang paling umum dan nyata saat ini adalah pekerja kreatif berkembang pesat dalam ekonomi digital yang bergerak cepat. Terjadi lonjakan perdagangan kekayaan intelektual, pengembangan merek mikro, dan layanan berbasis pengetahuan. Namun, keberhasilan ekonomi ini tidak sejalan dengan isu lingkungan. Inisiatif ramah lingkungan cenderung dianggap sebagai tokenisme, dan ketahanan iklim terabaikan oleh tren viral dan konten yang dimonetisasi—yang dikenal sebagai pemasaran greenwashing. Kreativitas memang dihargai, tetapi terutama karena potensi komersialnya, bukan kapasitas regeneratifnya. Sementara para kreator makmur, sistem ekologi justru menderita. Komunikasi greenwashing adalah contoh bagaimana tokenisme digunakan untuk menyebut alam sebagai tren. Industri ekstraktif, seperti minyak dan pertambangan, seringkali menampilkan diri sebagai pelopor inovasi hijau, yang unggul dalam masa depan berkelanjutan. Namun, pesan ini seringkali disampaikan sementara bisnis inti mereka terus bergantung pada eksploitasi dan ekstraksi sumber daya alam.

## 7. Visi ideal untuk masa depan

Jika kita mencari skenario yang lebih baik untuk mewujudkan utopia yang realistis, skenario 2 dalam Regenerative Future memberikan visi untuk memulihkan dan meregenerasi masa depan umat manusia dan lingkungan melalui kreativitas yang dapat berdampak pada percepatan pencapaian SDGs. Masa depan yang kreatif dapat dicapai melalui aktivitas sirkular yang melibatkan kemampuan individu, gerakan kolektif, dan dampak eksternal di luar fokus pada manusia, yang mencakup lingkungan dan seluruh ekologi. Katalisator dari setiap aktivitas membutuhkan pemberdayaan dan kreasi

kolektif atau ko-kreasi, agar memungkinkan terciptanya perubahan di masa depan. Strategi tersebut akan dijelaskan pada diagram di bawah ini.

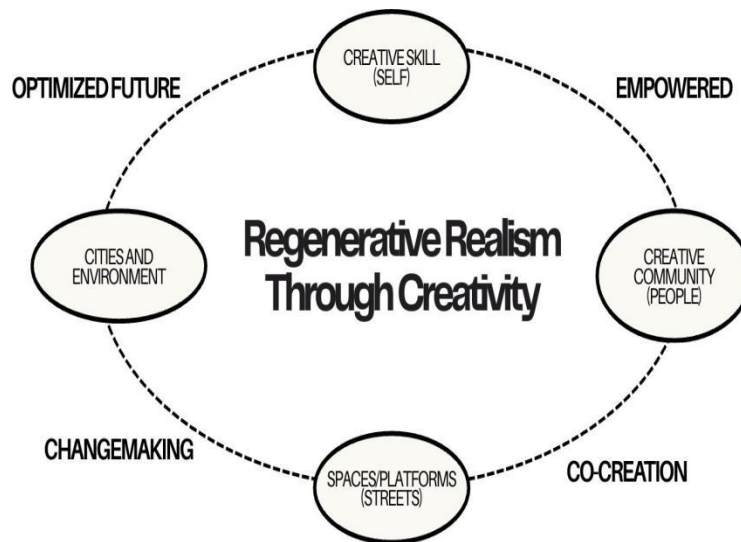


Diagram 6. Strategi Realisme Regeneratif

Diagram "Realisme Regeneratif Melalui Kreativitas" ini menggambarkan model berpikir sistem yang menata ulang kreativitas bukan hanya sebagai upaya artistik, tetapi juga sebagai sumber energi dinamis yang mampu mendorong transformasi sosial dan lingkungan. Pada intinya, model ini menghubungkan empat domain yang saling bergantung: keterampilan kreatif (diri), komunitas kreatif (manusia), ruang/platform (pusat), serta kota dan lingkungan (publik). Setiap simpul dihubungkan oleh proses-proses yang digerakkan oleh nilai, yaitu: pemberdayaan, kreasi bersama, penciptaan perubahan, dan masa depan yang optimal untuk merepresentasikan sifat siklus perubahan regeneratif.

Dimulai dari tingkat individu, keterampilan kreatif mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide dan memiliki keterampilan kreatif. Agensi diri ini kemudian berkembang melalui pemberdayaan ketika individu menjadi kontributor aktif dalam komunitas kreatif yang memiliki pemikiran serupa, membentuk nilai-nilai bersama dan ikatan sosial. Melalui kreasi bersama, komunitas-komunitas ini mengaktifkan ruang dan platform yang berfungsi sebagai wadah inovasi dan pertukaran. Pada gilirannya, ruang bersama ini dapat memengaruhi seluruh lingkungan melalui penciptaan perubahan, yang menghasilkan inovasi sosial. Ketika alur-alur ini selaras, mereka mendorong masa depan yang optimal di mana kreativitas tidak lagi ekstraktif tetapi regeneratif. Model ini mengusulkan bahwa regenerasi tidak terjadi secara terpisah tetapi membutuhkan keterkaitan antara individu, komunitas, infrastruktur, dan sistem ekologi melalui kreativitas sebagai jaringan ikat.

## **8. Manusia adalah Penggerak Utama**

Manusia adalah penggerak utama kreativitas, karena pengetahuan mereka mendorong inovasi dan penemuan. Kreativitas menjembatani kesenjangan antara tantangan kompleks dan pemangku kepentingan, bertindak sebagai media pertukaran pengetahuan. Energi kolektif manusia ini mendorong energi kreatif regeneratif, yang mempercepat penyelesaian masalah. Energi kreatif dapat memicu masa depan yang penuh harapan bagi para praktisi kreatif yang mengalami kekecewaan. Oleh karena itu, kita dapat melihat kreativitas bukan hanya sebagai hasil karya seni atau ekspresi budaya, tetapi sebagai bentuk energi terbarukan yang mampu mengatasi tantangan lingkungan dan sosial ekonomi Indonesia yang mendesak. Melalui penelitian berdasarkan desain, pandangan ke depan spekulatif, dan sumber data dari komunitas dan kreator kreatif, temuan ini menyoroti bahwa kreativitas berpotensi meregenerasi ekosistem, mengaktifkan ekonomi berbasis pengetahuan, dan memperkuat ketahanan komunal, jika didukung oleh infrastruktur, investasi, dan pengakuan publik yang menjanjikan. Karena tampaknya, hal ini telah terbukti dari komunitas dan kreator yang muncul sebagai tren masa kini yang meramalkan masa depan.

Analisis ini mengungkap dua jalur kritis: (1) kreativitas sebagai penggerak ekonomi berbasis pengetahuan; dan (2) kreativitas sebagai katalisator regenerasi lingkungan. Namun, makalah ini juga menyoroti tantangan struktural yang terus berlanjut seperti distribusi dukungan yang tidak merata, ketimpangan pendanaan di seluruh Indonesia, rendahnya apresiasi tenaga kerja kreatif, dan prioritas industri ekstraktif atas ekosistem kreatif. Latihan perencanaan skenario menawarkan empat skenario masa depan, yang menekankan bahwa lintasan energi kreatif Indonesia akan sangat bergantung pada apakah energi tersebut dikembangkan secara ekologis maupun ekonomis. Jalur yang paling masuk akal, Realisme Regeneratif, membayangkan masa depan yang terintegrasi sepenuhnya di mana manusia, planet, dan kreativitas bersinergi untuk mendorong transformasi regeneratif atau sirkular. Terakhir, agar kreativitas menjadi alat yang sah bagi pertumbuhan pembangunan nasional, kreativitas harus diperlakukan bukan sebagai barang mewah, melainkan sebagai infrastruktur; bersumber daya, dihormati, dan regeneratif. Waktunya terus berjalan untuk menata kembali energi kreatif sebagai komponen inti dalam upaya Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan seterusnya.

## **G. Memajukan Nasionalisme dan Diplomasi Pendidikan melalui Beasiswa Global**

### **1. Semua Bisa**

Belajar di luar negeri telah menjadi impian seumur hidup bagi banyak orang. Globalisasi telah menutup kesenjangan antarnegara di seluruh dunia, sehingga impian tersebut menjadi semakin mudah dijangkau oleh banyak

orang. Untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia, pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif baru untuk mengirimkan mahasiswa S1 ke luar negeri, mengikuti jejak program beasiswa S2 yang telah mapan di Indonesia dan ratusan ribu kemitraan beasiswa dengan berbagai institusi dan universitas di seluruh dunia.

Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) yang terkenal pertama kali diluncurkan sebagai program unggulan di bawah inisiatif kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada tahun 2021 untuk tingkat sarjana dan pada tahun 2022 untuk tingkat vokasi (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Yogyakarta, 2021). IISMA dianggap sebagai program saudara dari pendahulunya LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ditujukan untuk gelar magister. Awalnya, program ini dirancang bagi mahasiswa sarjana Indonesia untuk melakukan studi selama satu semester di universitas-universitas ternama di seluruh dunia sebagai salah satu langkah diplomatik yang digagas untuk meningkatkan kesadaran sosial, budaya, dan pendidikan Indonesia di dunia. Sebagai upaya untuk meningkatkan diplomasi pendidikan, program IISMA telah bermitra dengan 161 universitas tuan rumah di 30 negara, dengan pemerintah Indonesia bermitra secara langsung dengan setiap universitas tuan rumah dan membangun hubungan bilateral diplomatik yang positif melalui sarana pendidikan.

Sejak pelaksanaannya, jumlah pendaftar yang berpartisipasi terus meningkat dari 31 provinsi di Indonesia. Pada tahun pertama 2021, program ini menarik 2.546 peserta, yang kemudian meningkat tiga kali lipat menjadi 7.501 pada tahun 2022, dan akhirnya mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2023 dengan 9.116 pendaftar resmi. Salah satu kegiatan terpenting bagi para penerima beasiswa yang diterima adalah sesi Pre-Departure Briefing (PDB), yang wajib bagi penerima beasiswa IISMA dan LPDP. Sesi ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pengenalan peran dan tugas sebagai duta besar negara, pengelolaan kehidupan di luar negeri, dan informasi administratif penting lainnya. Setiap tahun, sesi PDB diawali dengan Acara Onboarding yang akbar.

Para eksekutif dan perwakilan dari Kemendikbudristek telah secara eksplisit menyatakan dan mendelegasikan para peserta mahasiswa untuk mengambil peran sebagai duta besar Indonesia yang memperkenalkan budaya Indonesia, menekankan bahwa kesempatan luar biasa tersebut juga disertai dengan tanggung jawab yang sama besarnya untuk berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat. Secara khusus, Penerima IISMA ke Universitas Yale diharuskan untuk melaksanakan penyampaian komitmen sebelum berangkat ke Amerika Serikat, yang menyatakan kesediaan dan antusiasme mereka untuk menjadi duta besar Indonesia, yang didelegasikan untuk memperkenalkan budaya Indonesia di Amerika Serikat. Bersamaan dengan persyaratan khusus untuk setiap universitas tuan rumah, setiap penerima IISMA di setiap universitas tuan rumah di seluruh dunia diamanatkan untuk menyelenggarakan Tantangan HEROES (Kemanusiaan, Keberagaman, Budaya, Melampaui Batas) untuk memperkenalkan budaya Indonesia, menunjukkan karakter mulia dan

kompetensi global di universitas tuan rumah masing-masing sebagai duta bangsa.

Demikian pula, para penerima beasiswa LPDP juga dipenuhi dengan para calon pemimpin yang berambisi membangun Indonesia setelah mereka kembali ke tanah air. Kedua hibah beasiswa tersebut didanai oleh pemerintah Indonesia, yang berarti bahwa uangnya berasal dari masyarakat pembayar pajak. Oleh karena itu, ada banyak harapan bahwa para siswa dapat menyebarkan kata-kata baik budaya Indonesia dan berbagi pengetahuan berharga yang diperoleh di luar negeri sebagai inspirasi dan kontribusi untuk membangun komunitas muda masa depan bangsa. Menjadi penerima beasiswa IISMA dan LPDP dan mempelajari perspektif baru untuk memperkuat wawasan global dianggap oleh banyak orang sebagai kesempatan emas, sebuah hak istimewa yang harus digunakan untuk berkontribusi bagi Indonesia di masa depan. Nilai utama ini juga sangat ditekankan selama sesi PDB IISMA, dengan testimoni alumni yang datang dari pulau kecil Lhokseumawe, Aceh yang mewujudkan mimpinya melalui program IISMA.

Penunjukan eksplisit penerima IISMA sebagai duta besar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh perwakilan kementerian, tetapi juga oleh universitas asal masing-masing penerima. Sebagai contoh, Direktur Pusat Pembelajaran Mandiri Universitas Indonesia (UI) secara langsung mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan, menyatakan rasa hormatnya (Kemendikbudristek, 2023). Senada dengan itu, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) menyampaikan rasa bangga dan bahagia yang sebesar-besarnya atas prestasi mahasiswa penerima IISMA UNS, mengukuhkan mereka sebagai Duta Besar UNS sekaligus Duta Besar Negara, dan berpesan kepada para mahasiswa untuk menjadi representasi yang baik di luar negeri, baik di bidang akademik maupun budaya.

Melihat banyaknya kegembiraan dan harapan bagi penerima beasiswa yang didanai pemerintah, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi penerima beasiswa lainnya. Inisiatif seperti Beasiswa Australia Awards (AAS) dan Beasiswa Chevening dari Inggris juga termasuk di antara beasiswa yang paling banyak dicari di Indonesia, dengan mantan alumni berjumlah puluhan ribu. Meskipun mereka juga memiliki pelatihan pra-keberangkatan wajib, ada perbedaan utama dalam program pra-keberangkatan yang didanai pemerintah dan yang didanai non-pemerintah dalam substansi identitas nasional. Sebagai orang Indonesia yang pada akhirnya akan meninggalkan negara itu untuk hidup sebagai diaspora di seluruh dunia, penting untuk memiliki rasa ketahanan nasional dan identitas nasional bersama sebagai panduan dalam menavigasi kehidupan di luar negeri. Namun, tidak semua program beasiswa membekali calon penerima beasiswa mereka dengan rasa identitas ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan bertujuan untuk melihat perbedaan dalam program pra-keberangkatan yang diadakan oleh beasiswa yang didanai pemerintah dibandingkan dengan beasiswa yang didanai non-pemerintah. Ke depan, perlu ada harmonisasi melalui kemitraan diplomatik untuk memastikan setiap diaspora Indonesia di masa mendatang memiliki nilai-nilai yang sama yakni ketahanan nasional dan identitas nasional.

## **2. Relevansi Budaya dan Politik**

Wacana seputar relevansi awalnya muncul seiring dengan berbagai perkembangan geopolitik internasional. Sebagai bagian dari komunitas global dan pemain utama di kawasan Asia, isu-isu global bergeser dari ancaman fisik langsung menjadi disparitas sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mengakibatkan ketegangan global yang besar. Salah satu faktor penentu dinamika geopolitik Indonesia adalah pendidikan ketahanan nasional sebagai bentuk ketahanan nasional. Rasa ketahanan nasional sangat krusial dalam membangun hubungan internasional, karena membutuhkan diplomasi melalui negosiasi dan kerja sama. Namun, dinamika politik saat ini telah bergeser. Pengaruh negara dalam membangun suatu bangsa tidak lagi relevan, karena kini terdapat unsur budaya dan daya tarik yang disebut diplomasi lunak yang digunakan untuk mempromosikan kepentingan negara dan menarik dukungan komunitas internasional di seluruh dunia. Budaya merupakan daya tarik yang sensitif dan menarik, karena biasanya mengikat masyarakat dan mencakup berbagai aspek dalam interaksi masyarakat. Oleh karena itu, budaya umum digunakan dalam diplomasi publik, terutama karena budaya Indonesia memiliki peran penting dalam membangun pencitraan bangsa. Inilah aspek utama di mana diplomasi lunak berperan, karena didefinisikan sebagai kemampuan untuk membentuk preferensi orang lain tanpa menggunakan kekuatan eksternal.

Pendidikan tinggi sangat berpengaruh dalam menciptakan diplomasi internasional, terutama melalui aspek budaya. Interaksi antar komunitas internasional, terutama melalui program beasiswa, memiliki potensi besar dalam memperkuat upaya diplomasi suatu negara. Berbagai program beasiswa yang diselenggarakan oleh lembaga internasional di seluruh dunia membuktikan praktik umum diplomasi lunak. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan mengenai dampak diplomasi lunak dalam membangun ketahanan nasional dan rasa nasionalisme yang dimiliki oleh para penerima beasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis perbedaan persiapan pra-keberangkatan antar berbagai beasiswa dan perbedaannya dalam hal substansi terkait identitas nasional.

## **3. Tingkatan Paparan Nasionalisme yang Berbeda Antara Sesi Pra-Keberangkatan Beasiswa Pemerintah dan Beasiswa Swasta**

### **Sesi Pra-Keberangkatan bagi Penerima Beasiswa LPDP**

Pembekalan pra-keberangkatan bagi para penerima beasiswa LPDP yang akan berangkat telah menjadi program wajib di setiap angkatan, yang dikenal sebagai Persiapan Keberangkatan LPDP (PK LPDP). PK LPDP wajib bagi para penerima beasiswa LPDP, dilengkapi dengan beragam tugas dan

agenda uniknya masing-masing. Meskipun tugas individu lebih berfokus pada pengembangan diri dan tujuan, seminar utama berfokus pada topik-topik terpenting terkait LPDP, yang menanamkan kesadaran nasional untuk berkontribusi menuju Indonesia yang lebih baik.

Pada bulan September 2024, sesi pra-keberangkatan untuk angkatan ke-242 dan ke-243 LPDP diadakan di LPDP Podcast Studio. Sesi ini memberikan peserta wawasan berharga tentang pentingnya mendorong perubahan yang berarti sebagai agen transformasi bahkan di lingkungan yang korup, menyoroti peran penting para penerima beasiswa untuk menumbuhkan budaya akuntabilitas dan integritas sebagai calon lulusan magister terutama ketika kembali ke Indonesia. Setahun kemudian pada bulan Januari 2025, pengarahan wajib diadakan untuk angkatan berikutnya. Angkatan ke-247 penerima beasiswa LPDP juga menerima seminar tentang antikorupsi, yang menggarisbawahi fondasi integritas bagi para calon penerima beasiswa untuk memastikan kepemimpinan yang etis yang secara langsung sejalan dengan misi LPDP untuk menciptakan penerima beasiswa yang transparan dan akuntabel yang kompetitif secara global untuk berkontribusi secara bertanggung jawab terhadap pembangunan Indonesia di masa depan.

#### Sesi Pra-Keberangkatan untuk Penerima Penghargaan IISMA

Angkatan terakhir penerima beasiswa IISMA adalah angkatan 2024. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbudristek RI juga menyelenggarakan acara pelepasan pada bulan Mei 2024 untuk secara formal dan simbiosis melepas lebih dari 1.600 mahasiswa S1 dan S2 ke program pertukaran pelajar selama satu semester. Selama dua bulan ke depan, para penerima beasiswa IISMA akan menjalani delapan rangkaian pra-keberangkatan yang berbeda. Program ini akan membekali para penerima beasiswa dengan pengetahuan penting terkait persyaratan administrasi dan bagaimana menjadi perwakilan diplomatik Indonesia yang handal di seluruh dunia (Indonesian International Student Mobility Awards Republik Indonesia, 2024).

#### Sesi Pra-Keberangkatan untuk Beasiswa Eksternal

Selain peluang beasiswa dari dana pemerintah Indonesia, ada juga banyak peluang lain yang ditawarkan dari negara-negara dan lembaga swasta di seluruh dunia. Globalisasi yang cepat dan persimpangan komunitas internasional telah membuat belajar di luar negeri lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu ketika penyebaran informasi masih terbatas. Melalui media sosial, puluhan ribu peluang belajar di luar negeri disajikan kepada jutaan orang di seluruh dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Aksesibilitas informasi tentang cara mendapatkan beasiswa di luar negeri secara langsung telah membuka peluang beasiswa untuk program master, dengan beberapa beasiswa yang lebih besar seperti Beasiswa Australia Awards (AAS), Beasiswa Chevening Inggris, Beasiswa Manaki Selandia Baru, dan Beasiswa Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Jerman, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Layanan Pertukaran Akademik Jerman. Ada juga beasiswa dan

hibah yang ditawarkan dari universitas di seluruh dunia untuk membantu siswa dalam menyelesaikan studi mereka di masing-masing negara.

Keempat contoh beasiswa yang tercantum di atas berasal dari pendanaan lembaga swasta dan pendanaan negara internasional. Karena tidak menerima dana dari pemerintah Indonesia, mereka tidak berkewajiban untuk membuat program pra-keberangkatan yang secara langsung ditujukan bagi mahasiswa Indonesia, dan jika pun mereka menyediakannya, mereka sama sekali tidak bertanggung jawab untuk menyediakan materi pembelajaran yang berfokus pada nasionalisme dan kesadaran budaya Indonesia. Meskipun tidak terikat langsung dengan pemerintah Indonesia, beberapa sesi pra-keberangkatan dari hibah beasiswa eksternal menyediakan sesi pra-keberangkatan bagi para penerima beasiswanya yang berasal dari Indonesia.

#### 1. Pengarahan Pra-Keberangkatan Beasiswa Australia Awards (AAS)

Australia Awards adalah program beasiswa magister, doktoral, dan fellowship yang didanai langsung oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT), Misi Australia untuk ASEAN, dan Pusat Penelitian Pertanian Internasional Australia (ACIAR). Beasiswa ini menyediakan kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, penelitian, dan pengembangan profesional di Australia, dengan salah satu cabang AAS-nya adalah Australia Awards in Indonesia (AAI). Sebagai salah satu pemain utama di ASEAN, AAS telah menjadi beasiswa dan kemitraan luar negeri terlama Indonesia selama lebih dari tujuh puluh tahun dengan fokus pada investasi sumber daya manusia untuk pembangunan bilateral sosial dan ekonomi antara Indonesia dan Australia (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2024).

Australia Awards in Indonesia (AAI) menyelenggarakan Pre-Departure Briefing (PDB) tahunannya pada bulan November 2024 untuk Penerima Beasiswa AAS 2025 di Bali bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). PDB dimaksudkan untuk membekali ratusan calon sarjana dengan persyaratan administratif penting seperti peraturan perizinan dan visa, hubungan bilateral Australia-Indonesia, sesi personal branding, memiliki karier yang aktif selama program, dan memupuk ketahanan dalam perjalanan akademis di masa depan (Australia Awards in Indonesia, 2024). Bersamaan dengan program PDB, komunitas Australia Awards in Indonesia juga menyediakan kegiatan keterlibatan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman dan pengembangan profesional sebelum, selama, dan setelah studi mereka di Australia (Kedutaan Besar Australia di Indonesia, 2024).

#### 2. Pemberitahuan Pra-Keberangkatan Beasiswa Chevening Inggris Raya



Chevening adalah beasiswa yang didirikan pada tahun 1983 dan didanai oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FDCO) Britania Raya. Beasiswa ini memberikan dukungan finansial penuh kepada individu dengan potensi kepemimpinan yang luar biasa dan latar belakang akademis yang kuat untuk menempuh program magister atau fellowship di universitas mana pun yang berlokasi di Britania Raya. Penerima beasiswa ini juga akan mendapatkan berbagai pengalaman akademis, profesional, dan budaya eksklusif yang disediakan oleh Yayasan Chevening. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung hubungan diplomatik antara Britania Raya dan negara-negara penerima lainnya, termasuk Indonesia.

Setiap penerima Beasiswa Chevening diminta untuk menghadiri pengarahannya pra-keberangkatan yang diselenggarakan oleh kedutaan besar Inggris dan/atau komisi tinggi negara asal masing-masing, dalam hal ini Komisi Tinggi Indonesia, sebelum keberangkatan mereka ke Inggris. Setibanya di sana, para penerima beasiswa juga diminta untuk menghadiri resepsi penyambutan dan/atau induksi oleh Sekretariat Chevening, serta sesi umpan balik mengenai kompetisi beasiswa tersebut. Komite Beasiswa Chevening juga mengamanatkan para penerima beasiswa untuk terlibat dengan Penerima Chevening lainnya dan Beasiswa Chevening Internal, dalam konteks berarti Chevening Indonesia, melalui acara dan peluang yang ditawarkan oleh Sekretariat Chevening atau universitas tuan rumah. Beasiswa tersebut juga mengamanatkan para penerima beasiswa untuk mengirimkan pemberitahuan jika tidak dapat berpartisipasi dan kegagalan untuk berpartisipasi dapat mengakibatkan kesempatan di masa mendatang ditahan.

### 3. DAAD Jerman

Indonesia memiliki tradisi bilateral yang panjang dengan Jerman dalam pendidikan tinggi, menjadi negara sasaran untuk inisiatif bersama dalam menarik mahasiswa internasional yang berkualifikasi tinggi dan peneliti yang komprehensif. Program DAAD telah mendukung mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade, menyediakan beasiswa, hibah penelitian, dan jabatan profesor tamu sejak tahun 1990 yang didanai langsung oleh pemerintah Jerman. Sebagai anggota Uni Eropa, DAAD Jerman memiliki mandat pra-keberangkatan yang unik bagi penerima beasiswanya. Salah satunya adalah persyaratan wajib untuk menghadiri kursus bahasa Jerman setidaknya 2 bulan sebelum dimulainya studi untuk mempersiapkan penerima dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, ada juga pelatihan pra-keberangkatan yang diadakan oleh DAAD Indonesia yang membekali penerima beasiswa dengan kekuatan yang diperlukan dalam memulai babak baru mereka di Jerman.

### 4. Beasiswa Manaaki Selandia Baru

Beasiswa Manaaki bertujuan untuk membangun pertumbuhan dan hubungan yang sejahtera, aman, dan berkelanjutan di negara-negara mitra, serta membina hubungan seumur hidup antara Selandia Baru dan, dalam hal ini, Indonesia (Beasiswa Manaaki Selandia Baru, 2025). Beasiswa Manaaki didanai langsung dari pemerintah Selandia Baru melalui Program Kerja Sama Pembangunan Internasional Selandia Baru dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT).

Bagi penerima Beasiswa Manaaki, terdapat dua jenis pembekalan pra-keberangkatan, yaitu pembekalan yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Selandia Baru dan pembekalan melalui IALF yang bekerja sama dengan mitra pemerintah Indonesia seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembekalan dari Kementerian Luar Negeri Selandia Baru wajib diikuti oleh setiap penerima beasiswa karena dianggap penting dalam mempersiapkan beasiswa dan kehidupan di Selandia Baru. Sementara itu, pembekalan pra-keberangkatan bagi penerima Beasiswa Manaaki dari IALF diselenggarakan setiap angkatan, dengan pembekalan terakhir pada bulan Januari 2024 yang diselesaikan dalam 6 (enam) minggu Program Pelatihan Pra-Keberangkatan, di mana para penerima beasiswa mempresentasikan rencana penelitian mereka kepada para mantan penerima beasiswa, dosen, dan calon mahasiswa.

#### **4. Urgensi Penguatan Nasionalisme dalam Diplomasi Pendidikan Melalui Kemitraan Beasiswa Luar Negeri**

Sebagai bangsa yang terbentuk melalui perjuangan bertahun-tahun dan dipupuk melalui keterlibatan masyarakat bersama, penting untuk membangun rasa Ketahanan Nasional yang dinamis yang mencakup dan mengintegrasikan semua aspek pembangunan nasional. Rasa ketahanan dapat sangat memengaruhi dampak identitas nasional bersama, karena sangat bergantung pada nilai-nilai dasar bersama yang berfungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menjadi sangat relevan ketika membahas diaspora Indonesia yang tinggal di luar Indonesia, beradaptasi dengan berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam memperkuat ketahanan nasional, ada istilah Indonesia yang dapat dengan tepat menggambarkan upaya individu yang disebut bela negara atau dapat diterjemahkan sebagai rasa bela negara. Istilah bela digunakan secara luas dan longgar untuk menggambarkan mempertahankan, mengakui, dan mempraktikkan budaya Indonesia meskipun saat ini tidak tinggal di Indonesia. Dalam menjelaskan bagaimana bela negara atau pertahanan nasional dapat secara langsung berkontribusi terhadap rasa ketahanan nasional, faktor penentunya adalah realitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh negara atau pemerintah Indonesia.

Para penerima beasiswa Indonesia pada akhirnya akan hidup sebagai diaspora di negara lain, terlibat secara sosial dan budaya dengan komunitas internasional. Interaksi sehari-hari mereka pada akhirnya akan berkontribusi untuk membentuk mereka sebagai individu melalui pembangunan jaringan komunikasi. Oleh karena itu, rasa ketahanan nasional diperlukan untuk memberikan diaspora rasa pertahanan dan keamanan. Seiring dengan terus bergesernya paradigma dunia, muncul tren diplomasi publik lunak, yang menggeser bobot diplomatik dari perwakilan negara ke partisipasi aktif masyarakat sipil dan aktor non-negara. Terdapat hubungan langsung dan jelas antara diplomasi dan kebijakan luar negeri, karena kebijakan luar negeri telah berevolusi untuk memengaruhi komunitas di tingkat nasional dan internasional. Salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan soft power dapat dilakukan melalui diplomasi publik, khususnya diplomasi pendidikan.

Salah satu elemen penting diplomasi lunak adalah keterlibatan langsung dengan masyarakat sipil, yang menciptakan citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional. Di dunia yang semakin terhubung, sangat penting untuk menunjukkan kekuatan Indonesia melalui mahasiswa diplomasi lunak Indonesia di luar negeri. Terlepas dari jalur beasiswa yang mereka tempuh, mereka adalah perwujudan aspirasi dan impian bangsa dari banyak anggota masyarakat yang, karena alasan apa pun, tidak dapat menempuh jalur yang sama dengan mereka. Dengan menyatukan pendekatan diplomasi pendidikan melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis nilai, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kehadiran globalnya, membina kemitraan internasional yang lebih kuat, dan membina generasi warga negara yang berwawasan global dan tetap berakar kuat pada identitas nasional. Masa depan diplomasi tidak hanya terletak pada negosiasi formal antarnegara, tetapi juga pada interaksi, kontribusi, dan representasi sehari-hari rakyatnya, terutama kaum mudanya, dalam komunitas global.

## **5. Pentingnya Kesadaran Dalam Melestarikan Identitas Indonesia**

Masyarakat sipil telah berkontribusi besar bagi Indonesia dalam hal menjadi perwakilan dan diplomat nasional untuk mempromosikan kesadaran dan budaya nasional. Momentum globalisasi yang semakin meningkat telah mendefinisikan ulang hakikat keterlibatan internasional, dengan pendidikan muncul sebagai saluran vital untuk proyeksi kekuatan lunak. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah terpuji dalam memanfaatkan pertukaran pendidikan dan program beasiswa sebagai alat diplomasi lunak. Beasiswa yang didanai pemerintah seperti LPDP telah memasukkan pelatihan pra-keberangkatan yang berfokus pada nasionalisme, yang bertujuan untuk menanamkan rasa kesadaran nasional yang kuat di kalangan mahasiswa Indonesia sebelum mereka terlibat dalam lingkungan akademik internasional. Para mahasiswa ini, pada gilirannya, bertindak sebagai duta informal yang melestarikan dan mewakili identitas Indonesia di panggung global.

Namun, penting untuk menjaga upaya bersama antara masyarakat dan negara dalam mewakili Indonesia melalui tujuan kebijakan yang efektif dan

kelas dalam mengidentifikasi nilai-nilai domestik dan mereformasi kebijakan strategis yang selaras dengan kepentingan Indonesia. Studi ini mengungkapkan adanya disparitas yang signifikan dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran diplomatik di kalangan mahasiswa diaspora Indonesia. Sementara penerima beasiswa yang didanai pemerintah mendapatkan manfaat dari program kesadaran nasional terstruktur yang disediakan langsung dari pemerintah, mahasiswa yang didanai swasta atau mereka yang berada di bawah skema beasiswa luar negeri seringkali tidak memiliki akses ke program nasional dan budaya yang serupa. Perbedaan ini menciptakan pandangan dan representasi yang berbeda dalam nilai-nilai internal diaspora Indonesia yang dapat mengakibatkan representasi budaya Indonesia yang berbeda di hadapan masyarakat internasional. Kondisi ini melemahkan potensi penuh pendidikan sebagai alat diplomatik yang harmonis. Tidak adanya pendekatan standar untuk menanamkan nasionalisme dan kesadaran diplomatik di antara semua mahasiswa Indonesia di luar negeri melemahkan koherensi dan kekuatan diplomasi lunak pendidikan Indonesia.

Untuk menjembatani kesenjangan ini, studi ini sangat menganjurkan harmonisasi pelatihan kesadaran nasional di semua jalur beasiswa, terlepas dari sumber pendanaannya. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan dan Luar Negeri, harus secara aktif mencari kemitraan strategis dengan penyedia beasiswa swasta dan asing untuk melembagakan program wajib pra-keberangkatan yang menekankan sejarah, budaya, identitas Indonesia, dan peran mahasiswa sebagai diplomat informal. Program-program ini harus mendidik mahasiswa tentang nilai-nilai yang mereka anut sebagai perwakilan Indonesia untuk berkontribusi secara bermakna pada bidang studi mereka masing-masing sambil tetap menjaga integritas nasional.

Lebih lanjut, pemerintah perlu memperluas kolaborasi diplomatik dengan komunitas diaspora Indonesia dengan menciptakan platform terstruktur di kedutaan dan konsulat untuk proyek-proyek yang dipimpin diaspora. Inisiatif tersebut dapat berupa acara diplomasi budaya, pelibatan komunitas, dan inovasi sosial yang dapat didukung melalui hibah mini atau bantuan logistik. Program-program semacam itu akan memungkinkan mahasiswa diaspora, terlepas dari latar belakang beasiswa mereka, untuk terlibat dalam diplomasi lunak yang aktif dan nyata, mempromosikan kepentingan dan nilai-nilai Indonesia di luar negeri. Inisiatif-inisiatif ini juga akan memberikan rasa memiliki, memberi diaspora kesempatan untuk bertindak atas nama mereka sendiri demi ketahanan nasional, alih-alih terus-menerus mengikuti tujuan wajib.

Kesimpulannya, untuk memaksimalkan potensi pendidikan sebagai alat diplomasi, Indonesia harus mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, strategis, dan terpadu. Dengan menyelaraskan program-program penyadaran nasional, melembagakan kolaborasi lintas sektor, dan memberdayakan komunitas diaspora melalui keterlibatan diplomatik yang terstruktur, Indonesia dapat memaksimalkan pengaruh soft power-nya dan memastikan representasi yang konsisten dan berbasis nilai di panggung global.

## **H. Kekuasaan Perpajakan dan Prinsip Konstitusional: Memperkuat Patriotisme Nasional melalui Kepatuhan Pajak**

Perpajakan merupakan hak kedaulatan sekaligus tanggung jawab konstitusional. Dalam masyarakat demokratis, legitimasi perpajakan tidak semata-mata berasal dari kewenangan negara untuk mengenakan pajak, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip konstitusional seperti legalitas, keadilan, dan proporsionalitas. Makalah ini mengkaji bagaimana kerangka konstitusional Turki mengatur kewenangan perpajakan dan bagaimana kerangka ini dapat menjadi alat untuk meningkatkan patriotisme fiskal. Dalam pemerintahan modern, kepatuhan pajak sukarela semakin dipandang sebagai bentuk kebajikan sipil, di mana warga negara berkontribusi terhadap barang publik bukan karena paksaan, melainkan sebagai tindakan patriotik.

Perpajakan merupakan salah satu instrumen paling fundamental dalam statecraft. Perpajakan mewujudkan kedaulatan negara sekaligus mencerminkan akuntabilitasnya terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan nilai-nilai demokrasi. Dalam negara demokrasi modern, legitimasi perpajakan tidak semata-mata bertumpu pada kewenangan negara untuk mengambil pendapatan, tetapi juga pada keselarasannya dengan doktrin-doktrin konstitusional seperti legalitas, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar cita-cita hukum, melainkan elemen-elemen fundamental yang membentuk hubungan antara negara dan warga negaranya. Ketika perpajakan dianggap adil, transparan, dan dibenarkan secara konstitusional, perpajakan menjadi lebih dari sekadar kebutuhan fiskal—ia berkembang menjadi kewajiban sipil dan perwujudan solidaritas nasional.

Dalam konteks ini, kewenangan untuk memungut pajak bukan sekadar hak prerogatif administratif atau ekonomi, melainkan mandat konstitusional yang harus dilaksanakan dalam batasan legalitas dan keadilan. Pengaturan perpajakan konstitusional memastikan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak mematuhi prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak warga negara, mencegah kesewenang-wenangan, dan menjaga integritas tatanan hukum. Para ahli hukum telah menekankan bahwa perpajakan, sebagai bentuk paksaan negara, menuntut justifikasi normatif yang setinggi-tingginya, terutama dalam masyarakat yang dibangun di atas supremasi hukum.

Türkiye menyediakan studi kasus yang menarik untuk mengkaji hubungan antara kewenangan perpajakan dan konstitusionalisme. Konstitusi Turki, khususnya Pasal 73, menegaskan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kemampuan keuangannya, dan bahwa prinsip-prinsip yang mengatur pemungutan pajak harus diatur dalam undang-undang. Ketentuan konstitusional ini menanamkan dalam struktur hukum gagasan keadilan, proporsionalitas, dan legalitas, pilar-pilar utama sistem perpajakan yang adil (Turan, 2021). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan terkait sejauh mana kebijakan dan administrasi perpajakan mencerminkan cita-cita konstitusional ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran global menuju model kepatuhan pajak sukarela telah mendefinisikan ulang keterlibatan negara dengan wajib pajaknya. Kepatuhan sukarela, di mana warga negara memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa penegakan paksaan, semakin diakui sebagai cerminan kepercayaan sipil dan kedewasaan demokratis. Model ini berasumsi bahwa wajib pajak lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan ketika mereka memandang sistem tersebut adil, transparan, dan konsisten dengan norma-norma konstitusional. Kepatuhan semacam itu bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga ekspresi patriotik dari solidaritas dan tanggung jawab terhadap negara-bangsa.

Patriotisme dalam perpajakan, sebuah dimensi yang relatif kurang dieksplorasi, menyatakan bahwa membayar pajak dapat berfungsi sebagai bentuk kebajikan sipil dan loyalitas nasional. Dalam pandangan ini, kepatuhan pajak mencerminkan lebih dari sekadar perilaku ekonomi; kepatuhan pajak merupakan bentuk kewarganegaraan konstitusional di mana individu menyatakan kesetiaan terhadap tujuan kolektif negara. Terutama di negara-negara seperti Turki, di mana legitimasi negara dan identitas sipil saling terkait erat, peningkatan koherensi konstitusional dalam tata kelola perpajakan dapat memainkan peran penting dalam menumbuhkan patriotisme fiskal.

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana prinsip-prinsip konstitusional yang mengatur kewenangan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pajak yang patriotik di Turki. Makalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis teks-teks konstitusional, yurisprudensi, dan interpretasi doktrinal, sekaligus menarik wawasan komparatif dari yurisdiksi lain untuk menyoroti praktik terbaik. Hipotesis utamanya adalah bahwa sistem perpajakan yang berlandaskan integritas konstitusional dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat persatuan nasional, dan mendorong kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Bagian berikut akan: (1) mengeksplorasi landasan teoritis dan hukum kekuasaan perpajakan; (2) mengkaji arsitektur konstitusional yang mengatur perpajakan di Turki; (3) menganalisis hubungan antara keadilan pajak konstitusional dan kepatuhan patriotik; dan (4) menawarkan rekomendasi praktis untuk menyelaraskan kebijakan pajak dengan tujuan yang lebih luas yaitu pembangunan bangsa melalui keterlibatan warga negara.

## **6. Perpajakan Konstitusional dan Loyalitas Publik Perpajakan sebagai Kekuasaan Konstitusional**

Kekuasaan perpajakan merupakan perwujudan kedaulatan negara, namun dalam masyarakat demokratis, kekuasaan tersebut harus dibatasi secara konstitusional. Di hampir semua sistem hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, legitimasi perpajakan bergantung pada landasannya dalam norma-norma konstitusional. Pasal 73 Konstitusi Turki tahun 1982

mencontohkan norma ini dengan menetapkan bahwa perpajakan, termasuk pengenaan, perubahan, atau penghapusan pajak, harus berdasarkan hukum, yang mencerminkan prinsip legalitas dan pengawasan demokratis.

Secara global, mandat legislatif ini menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas, sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem. Lebih lanjut, ketentuan perpajakan konstitusional seringkali menetapkan akuntabilitas vertikal negara dan resiprositas hukum horizontal antara negara dan warga negaranya. Perpajakan konstitusional di Turki juga memiliki fungsi moral, yaitu mengingatkan pemerintah dan rakyat bahwa keuangan publik merupakan komitmen bersama yang terikat secara hukum. Dalam hal ini, perpajakan berkembang dari sekadar mekanisme keuangan menjadi ekspresi solidaritas nasional yang terstruktur secara hukum.

#### Prinsip-Prinsip yang Mengatur Perpajakan Konstitusional

Perpajakan konstitusional berpedoman pada prinsip-prinsip yang diakui secara universal: legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan transparansi. Prinsip legalitas mengharuskan kewajiban perpajakan didefinisikan secara jelas melalui peraturan perundang-undangan, mencegah pengenaan pajak yang sewenang-wenang dan memastikan legitimasi demokratis. Proporsionalitas menyelaraskan beban pajak dengan kemampuan membayar wajib pajak, sehingga memperkuat keadilan fiskal. Prinsip keadilan mengamanatkan agar perpajakan tidak membebani masyarakat miskin secara tidak proporsional, sehingga memastikan keadilan horizontal dan vertikal (OECD, 2014). Terakhir, transparansi dalam pemungutan dan penggunaan pajak merupakan hal mendasar untuk membangun kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela.

OECD (2021) menekankan prinsip-prinsip yang sama dalam kerangka tata kelola perpajakan yang baik, dengan menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut penting bagi efisiensi dan legitimasi. Dalam konteks Turki, Üstün (2003) mengamati bahwa perpajakan konstitusional tidak hanya mengatur pendapatan publik tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan demokratis terhadap kebijakan fiskal yang sewenang-wenang, terutama krusial dalam sistem di mana keputusan presiden dapat memengaruhi tata kelola ekonomi pasca-2018.

### **7. Patriotisme Fiskal: Kepatuhan Pajak sebagai Kewajiban Nasional**

Moral pajak didefinisikan sebagai motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak, bahkan tanpa penegakan hukum yang ketat. Hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga, persepsi keadilan, nilai-nilai budaya, dan identitas nasional. Ketika pemerintah dianggap adil dan transparan, moral pajak dan akibatnya kepatuhan meningkat secara signifikan.

Di Turki, fluktuasi historis dalam legitimasi politik telah memengaruhi kepercayaan institusional dan perilaku perpajakan. Menyelaraskan administrasi perpajakan dengan jaminan konstitusional dapat membantu

membangun kembali kepercayaan tersebut dan menumbuhkan budaya kepatuhan sukarela. Perpajakan di bawah wewenang konstitusional membentuk kontrak sosial normatif. Warga negara membayar pajak bukan hanya karena mereka harus membayar, tetapi karena mereka percaya bahwa pendapatan pajak akan digunakan untuk menegakkan nilai-nilai bersama.

## **8. Identitas Nasional dan Partisipasi Warga Negara**

Kepatuhan pajak dapat dipromosikan sebagai kontribusi sipil terhadap pembangunan nasional. Membingkai wajib pajak sebagai tindakan solidaritas dan patriotisme mengubah sistem perpajakan menjadi wahana bagi keterlibatan sipil. Gagasan ini khususnya bergema di negara-negara demokrasi pasca-otoriter atau yang sedang dalam masa transisi seperti Turki, di mana lembaga-lembaga publik secara aktif membentuk kembali narasi legitimasi mereka. Persepsi tentang kemurahan hati dan keadilan pemerintah secara signifikan memengaruhi perilaku kepatuhan. Ketika warga negara melihat pajak mendanai barang publik seperti pendidikan, pertahanan, dan layanan kesehatan, kemauan mereka untuk patuh meningkat. Menanamkan gagasan-gagasan ini ke dalam wacana perpajakan dapat membingkai ulang kepatuhan bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai tugas nasional.

## **9. Kekuasaan Perpajakan dalam Praktik: Konteks Turki** **Landasan Hukum dan Kelembagaan**

Turki beroperasi dalam tradisi hukum perdata, dengan kewenangan perpajakannya didasarkan pada Konstitusi, Undang-Undang Prosedur Perpajakan (VUK), dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Namun, keseimbangan konstitusional telah bergeser setelah amandemen konstitusi tahun 2017, yang memperluas kewenangan presiden. Şahan (2019) berpendapat bahwa konsentrasi kekuasaan fiskal eksekutif ini melemahkan prediktabilitas hukum dan berisiko mempolitisasi keputusan perpajakan.

Perubahan yang sering terjadi pada peraturan perpajakan dan peraturan ad hoc menantang prinsip kepastian hukum, yang menyebabkan kebingungan publik dan melemahkan kepatuhan. Wajib pajak cenderung tidak patuh secara sukarela dalam sistem yang aturannya tidak stabil atau diterapkan secara tidak konsisten. Aktan (2017) mengusulkan "Piagam Pajak" konstitusional untuk mengabadikan prinsip-prinsip abadi yang melindungi hak-hak wajib pajak dan meningkatkan konsistensi fiskal.

Meskipun sistem perpajakan Turki menerapkan tarif pajak penghasilan progresif, dalam praktiknya, pengeluaran pajak dan inefisiensi administratif seringkali menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi. Hal ini melemahkan keadilan distributif dan mengurangi persepsi warga negara tentang keadilan. Meningkatkan keadilan horizontal dan vertikal sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan menumbuhkan patriotisme fiskal di kalangan warga berpenghasilan menengah dan rendah. Lembaga peradilan yang kuat sangat penting dalam melindungi wajib pajak dari tindakan administratif yang melampaui batas. Mahkamah Konstitusi harus



memiliki wewenang dan independensi untuk meninjau kebijakan fiskal agar sesuai dengan Konstitusi. Treynor (1961) menekankan bahwa pengawasan peradilan merupakan ciri khas tata kelola pemerintahan yang demokratis dan disiplin fiskal, sebuah posisi yang digaungkan oleh karya-karya terbaru tentang konstitusionalisme fiskal (Frey & Eichenberger, 1999).

## **10. Analisis dan Pembahasan**

Bagian ini menyajikan analisis mendalam kerangka perpajakan konstitusional Turki, yang menekankan dampaknya terhadap kepatuhan pajak sukarela dan pemupukan patriotisme fiskal. Dengan berlandaskan teori hukum normatif, studi konstitusional komparatif, dan ilmu ekonomi perilaku, empat pilar tematik utama dikaji: (1) legitimasi konstitusional kewenangan perpajakan; (2) kesetaraan dan transparansi dalam praktik perpajakan; (3) keterlibatan masyarakat sipil melalui kepatuhan pajak; dan (4) akuntabilitas kelembagaan dan upaya hukum.

## **11. Legitimasi Konstitusional dan Aturan Hukum dalam Perpajakan**

Fondasi sistem perpajakan modern terletak pada integritas konstitusionalnya. Pasal 73 Konstitusi Turki (1982) dengan jelas mengamanatkan bahwa perpajakan harus berdasarkan hukum, mematuhi prinsip-prinsip keadilan, dan mencerminkan kapasitas ekonomi individu. Ketentuan ini sejalan dengan konsensus global yang lebih luas bahwa perpajakan harus dilakukan di bawah supremasi hukum dan pengawasan demokratis (OECD, 2021). Namun, janji konstitusional di Turki seringkali dirusak dalam praktiknya. Setelah referendum konstitusi 2017, yang mengubah negara menjadi sistem presidensial, telah terjadi konsolidasi kekuasaan fiskal yang dapat diamati di dalam cabang eksekutif. Keputusan presiden sekarang memainkan peran sentral dalam membentuk kebijakan perpajakan, seringkali menghindari debat parlemen atau konsultasi publik (Şahan, 2019). Pergeseran ini menantang prinsip prediktabilitas hukum, landasan konstitusionalisme dan administrasi perpajakan yang efektif.

Para pakar hukum berpendapat bahwa dominasi eksekutif semacam itu mengikis kepercayaan publik dan melanggar norma-norma dasar demokrasi. Di negara-negara demokrasi yang mapan seperti Jerman, misalnya, Mahkamah Konstitusi Federal secara aktif meninjau undang-undang perpajakan untuk memastikan proporsionalitasnya, memastikan bahwa perpajakan legislatif mematuhi standar konstitusional (Föhrenbach, 2020). Tanpa mekanisme peradilan yang setara, Turki berisiko melembagakan tata kelola fiskal yang sewenang-wenang. Selain itu, regulasi pajak ad hoc yang sering terjadi dan pembebasan pajak sementara berkontribusi pada persepsi inkonsistensi dan favoritisme. Ketidakpastian ini tidak hanya membebani kapasitas administratif tetapi juga menghambat perencanaan ekonomi jangka panjang dan merusak kepercayaan wajib pajak. OECD (2021) merekomendasikan agar rezim perpajakan memastikan stabilitas dan kejelasan, yang keduanya tampaknya semakin absen dalam model Turki.

## **12. Keadilan dan Transparansi dalam Praktik Perpajakan Turki**

Meskipun berlandaskan konstitusional, sistem perpajakan Turki masih mengalami ketimpangan struktural. Ketergantungan yang dominan pada pajak tidak langsung, seperti PPN dan pajak konsumsi khusus (ÖTV), secara tidak proporsional berdampak pada rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, sehingga menciptakan beban pajak yang regresif (Kayalidere & Özcan, 2012). Sementara itu, pengeluaran pajak, termasuk pengecualian dan pengurangan pajak, seringkali menguntungkan perusahaan besar dan individu berpenghasilan tinggi, yang semakin memperparah ketimpangan vertikal. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif, yang merupakan inti dari legitimasi demokrasi dan teori kontrak sosial perpajakan. Menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008), persepsi keadilan pajak secara langsung memengaruhi perilaku wajib pajak: ketika keadilan dianggap rendah, kepatuhan semakin bergantung pada paksaan, alih-alih nilai-nilai kepatutan sipil.

Selain itu, transparansi fiskal masih menjadi perhatian penting. Kesadaran publik tentang alokasi penerimaan pajak masih terbatas, dan pelaporan komprehensif mengenai belanja publik seringkali tidak tersedia atau tertunda. Tanpa transparansi, wajib pajak kesulitan melihat manfaat nyata dari kontribusi mereka, yang mengakibatkan penurunan moral wajib pajak. Dalam penganggaran dan pengeluaran sangat penting untuk menjaga akuntabilitas publik dan mendorong kepatuhan sukarela.

Sebaliknya, negara-negara seperti Kanada dan Australia telah menerapkan model-model inovatif seperti Undang-Undang Hak Wajib Pajak dan portal anggaran terbuka yang secara eksplisit menunjukkan bagaimana penerimaan pajak terkait dengan layanan publik. Mekanisme-mekanisme ini mendorong resiprositas fiskal, di mana warga negara lebih cenderung patuh ketika mereka merasakan adanya pertukaran yang adil antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima.

## **13. Kepatuhan Pajak sebagai Keterlibatan Masyarakat dan Tugas Nasional**

Dalam konteks Turki, kepatuhan pajak sebagian besar dibingkai dalam paradigma legalistik dan hukuman, dengan sedikit penekanan pada kewajiban kewarganegaraan atau kewajiban patriotik. Konsepsi sempit ini gagal memanfaatkan potensi perpajakan sebagai lembaga sosial pemersatu. Penelitian menunjukkan bahwa warga negara lebih cenderung membayar pajak secara sukarela ketika sistem fiskal dianggap adil, inklusif, dan berorientasi pada tujuan nasional bersama.

Membingkai perpajakan sebagai bentuk patriotisme fiskal dapat mengubah sikap publik secara signifikan. Perpajakan di bawah batasan konstitusional berfungsi sebagai kontrak normatif: merupakan hubungan timbal balik di mana warga negara memenuhi kewajiban keuangan mereka kepada negara dengan imbalan representasi demokratis, keamanan, dan barang

publik. Menanamkan makna sosial ini ke dalam wacana perpajakan melalui kampanye pendidikan, iklan layanan masyarakat, dan kurikulum sekolah dapat memperkuat identitas kewarganegaraan dan tingkat kepatuhan.

Turki berpotensi memperoleh manfaat dari transformasi tersebut. Mengingat transisi politik yang sedang berlangsung, volatilitas ekonomi, dan tekanan regional, memperkuat kohesi nasional melalui tanggung jawab fiskal bersama merupakan keharusan praktis sekaligus simbolis. Dengan mengacu pada model OECD, Turki dapat mengintegrasikan literasi pajak dan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum nasionalnya, sehingga dapat melahirkan generasi warga negara yang bertanggung jawab secara fiskal.

Lebih lanjut, menyelaraskan perpajakan dengan narasi pembangunan nasional seperti perluasan infrastruktur, layanan kesehatan universal, atau kesiapan pertahanan dapat membingkai wajib pajak sebagai tindakan solidaritas dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Pendekatan ini mencerminkan kampanye yang sukses di negara-negara Nordik, di mana perpajakan tidak distigmatisasi melainkan dirayakan sebagai pilar kemakmuran dan kesetaraan nasional.

#### **14. Akuntabilitas Kelembagaan dan Upaya Hukum**

Sistem perpajakan yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar undang-undang yang baik, tetapi juga membutuhkan lembaga yang mampu menerapkan, meninjau, dan menegakkan undang-undang tersebut secara adil. Namun, di Turki, kelemahan kelembagaan menghambat akses wajib pajak terhadap keadilan. Pengadilan tata usaha negara seringkali terbebani, sementara proses bandingnya panjang, mahal, dan tidak transparan. Selain itu, spesialisasi personel peradilan dalam hukum perpajakan masih terbatas, sehingga menyebabkan interpretasi dan putusan yang tidak konsisten. Meskipun Mahkamah Konstitusi Turki berwenang untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, aksesibilitasnya terhambat oleh hambatan prosedural dan pengaruh politik. Hal ini melemahkan perannya sebagai penjaga hak perpajakan konstitusional. Model perbandingan menunjukkan bahwa pengadilan fiskal independen, seperti Pengadilan Keuangan Federal Jerman (Bundesfinanzhof) atau Conseil d'État Prancis, menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk perlindungan wajib pajak dan pengawasan peradilan.

Untuk mengatasi defisit ini, para akademisi mengusulkan pengenalan Piagam Wajib Pajak, yang diabadikan dalam Konstitusi atau undang-undang fiskal, untuk menguraikan hak-hak dasar wajib pajak, termasuk hak atas transparansi, perlakuan yang sama, banding, dan penyelesaian yang cepat. Hal ini akan meningkatkan integritas kelembagaan dan menumbuhkan kepercayaan publik. Selain itu, mekanisme seperti lembaga ombudsman, kerangka kerja penyelesaian sengketa alternatif (ADR), dan pengadilan pajak independen dapat menyediakan jalur yang lebih mudah diakses untuk

menyelesaikan keluhan terkait perpajakan. Studi empiris menunjukkan bahwa mekanisme tersebut meningkatkan persepsi keadilan, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

## **15. Refleksi Konstitusional Komparatif**

Mengacu pada tradisi hukum komparatif memperkaya evaluasi normatif sistem perpajakan Turki. Misalnya, Grundgesetz di Jerman mengamanatkan bahwa semua perpajakan tidak hanya harus berdasarkan undang-undang, tetapi juga harus lulus uji proporsionalitas, yang memastikan bahwa beban individu tidak melebihi manfaat kolektif. Demikian pula, di Kanada, Piagam Hak dan Kebebasan secara tidak langsung memengaruhi desain perpajakan dengan mewajibkan undang-undang untuk menghormati perlakuan yang setara dan keadilan prosedural. Sebaliknya, Turki tidak memiliki tinjauan konstitusional substantif terhadap kebijakan fiskal maupun perlindungan prosedural bagi wajib pajak. Ketidadaan mekanisme seperti klausul sunset, audit fiskal biaya-manfaat, atau konsultasi publik pra-legislatif semakin menjauhkan kebijakan perpajakan dari akuntabilitas demokratis. Menerapkan mekanisme semacam itu tidak hanya akan meningkatkan administrasi perpajakan, tetapi juga menanamkan konstitusionalisme ke dalam tata kelola fiskal sehari-hari.

Warga negara dapat menantang keputusan pajak melalui sistem yang independen, mudah diakses, dan tidak memihak. Selain itu, contoh kelembagaan dari negara-negara Skandinavia menawarkan model yang bermanfaat untuk perpajakan inklusif. Swedia dan Norwegia telah lama membangun sistem ombudsman yang memungkinkan penerapannya. Mengadaptasi struktur serupa di Turki dapat meningkatkan perlindungan wajib pajak dan menumbuhkan budaya akuntabilitas. Analisis ini dengan jelas menunjukkan bahwa Turki berada pada momen krusial, yaitu dapat melanjutkan jalur perpajakan ad hoc dan terpusat atau bergerak menuju sistem fiskal yang koheren secara konstitusional, inklusif secara sosial, dan partisipatif. Jalur yang terakhir menjanjikan tidak hanya efisiensi ekonomi tetapi juga revitalisasi kewarganegaraan demokratis melalui perpajakan.

## **16. Akhir Konstitusional Komparatif**

Kekuasaan perpajakan harus beroperasi dalam batasan konstitusional untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan publik. Di Turki, menyelaraskan perpajakan dengan prinsip-prinsip konstitusional seperti legalitas, proporsionalitas, keadilan, dan transparansi dapat mendorong kepatuhan sukarela dan memperkuat patriotisme nasional. Sistem perpajakan yang berlandaskan konstitusional, diperkuat oleh kepastian hukum dan keterlibatan warga negara, sangat penting bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan akuntabilitas demokratis. Perpajakan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan fungsi konstitusional yang merupakan inti dari legitimasi negara, akuntabilitas demokratis, dan solidaritas sipil. Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan perpajakan di Turki, meskipun berlandaskan pada ketentuan konstitusional seperti Pasal 73 konstitusi 1982,

masih menghadapi tantangan kritis dalam memastikan kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, dan proporsionalitas. Intervensi eksekutif yang sering terjadi, kurangnya perlindungan kelembagaan, dan struktur pajak yang regresif telah melemahkan kepercayaan wajib pajak dan moral publik.

Memperkuat fondasi konstitusional perpajakan sangat penting untuk memulihkan koherensi hukum dan keterlibatan masyarakat. Sistem perpajakan yang berlandaskan teguh pada prinsip-prinsip konstitusional, terutama legalitas, keadilan, dan transparansi, tidak hanya mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang, tetapi juga mendorong kepatuhan sukarela dengan memperkuat kontrak sosial normatif antara negara dan warga negaranya. Analisis komparatif lebih lanjut mengungkapkan bahwa yurisdiksi dengan hak wajib pajak yang dikodifikasi dan pengawasan peradilan yang kuat cenderung menunjukkan tingkat moral pajak dan patriotisme fiskal yang lebih tinggi, yang mendukung argumen untuk reformasi kelembagaan di Turki.

Untuk tujuan ini, studi ini menyerukan strategi reformasi multi-cabang yang meningkatkan pengawasan yudisial atas undang-undang perpajakan dan keputusan eksekutif, menetapkan Undang-Undang Hak Wajib Pajak, dan mengintegrasikan narasi patriotik sipil ke dalam pendidikan publik dan wacana fiskal. Reformasi semacam itu akan mengangkat kepatuhan pajak dari kewajiban hukum menjadi tindakan loyalitas nasional, sehingga memperkuat legitimasi negara dan ketahanan demokrasi. Kesimpulannya, rezim pajak yang berlandaskan konstitusional, transparan, dan adil tidak hanya vital bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan rasa tujuan nasional bersama. Ketika warga negara memandang perpajakan sebagai proses yang adil dan partisipatif, yang berakar pada tatanan konstitusional, mereka cenderung memenuhi kewajiban pajak mereka secara sukarela, bukan karena takut, melainkan karena kebanggaan sipil.

## **17. Implikasi Praktis dan Arah Masa Depan**

Temuan-temuan yang disajikan dalam studi ini memiliki implikasi praktis yang signifikan, terutama bagi para pembuat kebijakan, akademisi hukum, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam tata kelola perpajakan dan reformasi konstitusi di Turki. Inti dari rekomendasi-rekomendasi ini adalah perlunya menata kembali perpajakan bukan hanya sebagai kebutuhan fiskal, tetapi juga sebagai praktik demokrasi yang dibentuk oleh kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi warga negara.

Pertama, reformasi konstitusi harus diupayakan untuk secara eksplisit mendefinisikan dan melindungi hak-hak wajib pajak. Hal ini dapat berupa piagam hak wajib pajak, yang diabadikan baik melalui amandemen konstitusi maupun peraturan perundang-undangan tingkat tinggi, yang menguraikan hak warga negara atas proses hukum yang wajar, akses informasi, mekanisme banding, dan non-diskriminasi dalam perpajakan. Kodifikasi semacam itu tidak hanya akan memberdayakan wajib pajak tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan eksekutif yang sewenang-wenang.

Kedua, pengawasan yudisial terhadap kebijakan fiskal harus diperkuat secara signifikan. Amandemen konstitusi pasca-2017 telah memusatkan kewenangan perpajakan yang cukup besar di tangan cabang eksekutif, dengan pengawasan parlemen yang terbatas. Untuk menyeimbangkan hal ini, pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, harus diperlengkapi secara kelembagaan untuk melakukan tinjauan substantif terhadap undang-undang perpajakan, termasuk menilai proporsionalitas, keadilan prosedural, dan implikasi hak asasi manusia. Pengadilan fiskal atau tribunal pajak yang independen dapat menyediakan jalur hukum khusus, yang membantu menumbuhkan budaya akuntabilitas yudisial dalam tata kelola perpajakan.

Ketiga, transparansi harus menjadi landasan administrasi perpajakan di masa mendatang. Turki dapat memperoleh manfaat dari penerapan platform anggaran terbuka, yang memungkinkan warga negara memantau pengeluaran pemerintah, dan dasbor publik yang menghubungkan penerimaan pajak dengan proyek atau layanan tertentu. Transparansi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi belanja publik, tetapi juga membangun kembali hubungan krusial antara pajak yang dibayarkan dan manfaat yang diterima, sebuah hubungan yang mendasari moral pajak dan patriotisme fiskal.

Keempat, reformasi kelembagaan harus mempertimbangkan pembentukan Ombudsman Pajak atau mediator fiskal independen, yang mencontoh negara-negara Skandinavia, untuk menyelidiki pengaduan wajib pajak, mengadvokasi perlakuan yang adil, dan menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan. Hal ini akan menyediakan mekanisme penyelesaian yang mudah diakses dan semakin memperkuat kepercayaan publik.

Kelima, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan kewarganegaraan fiskal ke dalam pendidikan publik. Dengan mengajarkan prinsip-prinsip konstitusional di balik perpajakan, dan menekankan peran pajak dalam mendanai barang publik dan mempertahankan demokrasi, generasi mendatang dapat memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan patriotik dan kewarganegaraan, alih-alih kewajiban yang memberatkan. Promosi literasi pajak kewarganegaraan melalui kurikulum, kampanye media, dan dialog publik dapat membentuk kembali sikap masyarakat seiring waktu.

Terakhir, studi ini membuka pintu bagi eksplorasi yang lebih mendalam melalui riset komparatif. Meskipun analisis ini diambil dari beberapa yurisdiksi seperti Jerman, Kanada, dan negara-negara Nordik, studi lintas negara yang lebih sistematis masih diperlukan. Penelitian di masa mendatang dapat berfokus pada bagaimana berbagai model konstitusional memengaruhi moral pajak, efektivitas piagam hak wajib pajak, atau peran lembaga peradilan dalam mengekang populisme fiskal. Pendekatan komparatif global dapat membantu mengidentifikasi reformasi yang terukur dan praktik terbaik bagi Turki dan negara-negara demokrasi baru lainnya.

Singkatnya, implikasi-implikasi ini menandakan bahwa reformasi tata kelola perpajakan di Turki bukan hanya keharusan hukum dan ekonomi, tetapi juga peluang konstitusional. Dengan mendasarkan perpajakan pada kerangka hak, tanggung jawab, dan kepercayaan timbal balik, Turki dapat bergerak menuju masa depan fiskal yang lebih adil, transparan, dan demokratis.

## **I. Permainan Papan Balap Kata: Merevitalisasi Aksara Tradisional sebagai Strategi Membangun Kesadaran Nasional**

### **1. Perkenalan Budaya dan Tradisi**

Bahasa Indonesia telah lama dikenal secara global sebagai bangsa yang kaya akan warisan budaya. Hal ini terlihat dari keberagaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan artefak budaya nyata seperti candi, tarian tradisional, musik, dan bentuk-bentuk seni rakyat lainnya. Tanda-tanda kekayaan budaya ini merupakan bukti bahwa kepulauan Indonesia, atau Nusantara, pernah menjadi rumah bagi peradaban yang sangat maju. Budaya dapat dipahami sebagai sistem nilai yang terstruktur. Ia mengidentifikasi enam ranah kehidupan budaya (*Lebensformen*): (1) sains dan teori, (2) ekonomi, (3) seni, (4) agama, (5) kehidupan sosial, dan (6) politik—yang semuanya dapat ditemukan secara historis di dalam Nusantara. Kemegahan budaya ini tercermin dengan jelas pada kerajaan-kerajaan yang kuat di masa lalu, seperti Sriwijaya dan Majapahit. Secara khusus, pulau Jawa pernah memiliki kecanggihan seni dan budaya yang tinggi. Contoh utamanya adalah kalangwan atau kalangon, suatu bentuk puisi Jawa kuno yang kaya akan keindahan yang luar biasa. Membaca dan mengapresiasi karya-karya tersebut membutuhkan pengetahuan mendalam tentang konteks budaya, pandangan dunia filosofis yang terkandung di dalamnya, norma-norma estetika, dan yang terpenting, penguasaan aksara dan bahasa Jawa.

Saat ini, terdapat sekitar 80 juta penutur bahasa Jawa di seluruh Indonesia. Namun, berapa banyak dari mereka yang masih memahami cara membaca atau menulis aksara Jawa? Dengan menurunnya penggunaan dan pemahaman sistem aksara Jawa tradisional, dunia linguistik dan keahlian aksara Jawa menjadi semakin sunyi dan terisolasi.

Degradasi ini, sebagian, merupakan konsekuensi kolonialisme selama abad ke-19 di bawah kekuasaan Belanda. Pendudukan kolonial berdampak besar pada budaya Indonesia, menghapus banyak jejak tradisi lokal dan memperkenalkan bentuk-bentuk budaya baru yang terhibridisasi. Interaksi antara penjajah dan penduduk asli mengakibatkan peniruan gaya hidup dan nilai-nilai kolonial. Belanda juga menerapkan sistem klasifikasi sosial yang ketat, mengangkat kelas priyayi, bangsawan Jawa, yang kemudian disukai oleh penjajah. Kelas priyayi, khususnya, menjadi peniru utama perilaku, bahasa, dan gaya hidup Barat. Pada saat yang sama, penduduk asli menjadi bahan ejekan oleh tokoh-tokoh kolonial. Oleh karena itu, banyak aspek budaya Barat yang diadopsi oleh masyarakat Jawa saat ini dapat ditelusuri kembali ke kontak budaya ini, yang sering dijelaskan melalui lensa tujuh universal budaya: (1) bahasa, (2) alat dan teknologi, (3) mata pencaharian dan sistem ekonomi, (4) organisasi sosial, (5) seni, (6) ilmu pengetahuan, dan (7) agama.

Naskah yang rusak, menurunnya minat terhadap bentuk-bentuk sastra tertentu, runtuhnya pusat-pusat kebudayaan, dan pergeseran kekuasaan politik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kita kini hanya memiliki sedikit, jika

ada, naskah asli dari era-era awal tersebut. Setiap bangsa berupaya melestarikan budayanya, terutama bahasa dan sistem tulisnya. Indonesia pun tak terkecuali. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan perwujudan identitas, sejarah, dan kearifan yang harus dilestarikan. Bahasa Jawa, beserta aksara tradisionalnya, mencerminkan identitas, warisan, dan kedalaman filosofis masyarakat Jawa. Banyak teks sejarah dan karya sastra ditulis dalam aksara Jawa tradisional, sehingga pengetahuan tentang aksara ini penting untuk mengakses sejarah intelektual dan budaya Jawa. Kemauan dan upaya untuk mempelajari aksara Jawa itu sendiri merupakan tindakan melestarikan warisan budaya untuk generasi mendatang. Hal ini meletakkan dasar bagi rasa kepemilikan dan kebanggaan, yang pada akhirnya menumbuhkan kesadaran nasional dan kecintaan terhadap identitas budaya Indonesia yang beragam.

Konteks ini membingkai urgensi untuk merevitalisasi aksara tradisional, yang berfungsi sebagai kunci pengetahuan dan kearifan peradaban Nusantara kuno. Tanpa kemampuan membaca dan memahami aksara asli ini, naskah budaya menjadi tak lebih dari simbol bisu. Tergerak oleh keprihatinan ini, kami menciptakan perangkat pendidikan untuk memperkenalkan dan menormalkan penggunaan aksara Jawa di kalangan masyarakat umum. Solusi kami adalah permainan papan, sebuah format yang dipilih karena pembelajaran berbasis permainan, khususnya melalui permainan papan, telah terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan partisipatif. Kami mengembangkan sebuah permainan bernama Balap Kata, sebuah permainan papan yang dirancang khusus untuk memperkenalkan sistem aksara Jawa melalui dua aksara: Aksara Jawa dan Arab Pegon. Permainan ini tidak hanya sebagai bentuk hiburan tetapi juga media pendidikan interaktif yang berperan dalam merevitalisasi warisan budaya yang terlupakan. Dalam ranah literasi Jawa, terdapat dua sistem penulisan utama. Yang pertama adalah Aksara Jawa, sebuah aksara dengan akar sejarah yang dalam yang berasal dari aksara Pallawa di India Selatan. Ini berevolusi menjadi aksara Kawi sebelum disempurnakan menjadi Aksara Jawa modern. Bahasa Sunda merupakan aksara suku kata yang tersusun dari huruf-huruf dasar yang disebut aksara *nglegéna*, yaitu konsonan yang membentuk suku kata jika dipadukan dengan sandhangan (tanda vokal) dan dapat membentuk kata majemuk melalui pasangan (kata sambung konsonan).

Sistem kedua adalah Arab Pegon, yang muncul dari sintesis budaya antara masyarakat Jawa dan dunia Islam. Sistem ini menggunakan aksara Arab (Hijaiyah) yang diadaptasi agar sesuai dengan struktur fonetik bahasa Jawa. Dikenal sebagai Aksara Pegon, sistem ini melambangkan asimilasi budaya yang memperkaya literasi Jawa, terutama dalam konteks keagamaan dan pesantren. Sayangnya, dengan munculnya aksara Latin dan dominasi media modern, aksara tradisional ini semakin asing bagi generasi muda. Kurangnya sumber daya pendidikan yang menarik dan platform ekspresif telah menghambat upaya pelestarian. Di sinilah Balap Kata menawarkan solusi alternatif. Melalui mekanisme permainan papan interaktif, sistem ini mengajak pemain, baik anak-anak maupun dewasa, untuk mengeksplorasi, menyusun, dan membaca kata-kata Jawa menggunakan Aksara Jawa dan Arab Pegon. Permainan ini dirancang agar menyenangkan sekaligus memperkenalkan



secara bertahap struktur dasar Aksara Jawa (nglegéna, sandhangan, dan pasangan) serta adaptasi fonetik aksara Arab dalam sistem Pegon.

Kami percaya bahwa pelestarian budaya tidak selalu membutuhkan metode konvensional. Dengan mengadopsi pendekatan edukasi berbasis permainan, Balap Kata berfungsi sebagai jembatan antara warisan sastra tradisional dan antusiasme belajar modern. Lebih dari sekadar mempelajari huruf, permainan ini merupakan ajakan untuk menemukan kembali jati diri, memahami sejarah, dan mengobarkan kembali kecintaan terhadap bahasa dan budaya leluhur. Dalam jangka panjang, kami berharap inisiatif ini menjadi bagian dari gerakan revitalisasi budaya yang lebih luas, yang memperkuat identitas nasional dan memperkaya literasi kolektif lintas generasi.

## **2. Sistem Penulisan Bahasa Jawa: Aksara Jawa dan Arab Pegon**

Sistem penulisan tradisional di Asia Tenggara berakar kuat pada aksara Pallawa, sebuah sistem penulisan yang berasal dari India Selatan. Aksara ini mulai dikenal di Nusantara (Kepulauan Indonesia) sekitar abad ke-4, seiring dengan pengaruh kerajaan Hindu-Budha di wilayah tersebut. Sebagai salah satu aksara turunan Brahmi, Pallawa menjadi cikal bakal banyak sistem penulisan lokal yang kemudian berkembang di seluruh Asia Tenggara. Pada abad ke-8, aksara Pallawa mengalami penyederhanaan dan adaptasi, melahirkan bentuk baru yang dikenal sebagai aksara Kawi. Aksara Kawi banyak digunakan di Nusantara dan menjadi sistem penulisan utama untuk berbagai bahasa daerah seperti Jawa Kuno, Sunda Kuno, Bali, Batak, Makassar, Bugis (Lontara), dan lainnya. Keberagaman ini mencerminkan penggunaan bahasa Kawi yang luas dan fleksibel dalam membentuk literasi lokal.

Berfokus pada perkembangannya dalam konteks bahasa Jawa, aksara Kawi memainkan peran sentral sebelum berevolusi menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai aksara Aksara Jawa. Transformasi ini terjadi secara bertahap, dimulai dengan Kawi Awal (750–925 M), yang masih memiliki kemiripan signifikan dengan aksara Pallawa. Kemudian berkembang menjadi Kawi Akhir (929–1292 M), yang menampilkan lebih banyak adaptasi etnis dan daerah. Pada masa keemasan Kerajaan Majapahit (1294–1527 M), aksara ini mengalami penyempurnaan dalam struktur estetika dan grafis, yang akhirnya berevolusi menjadi aksara Aksara Jawa Carakan yang baku sekitar abad ke-18.

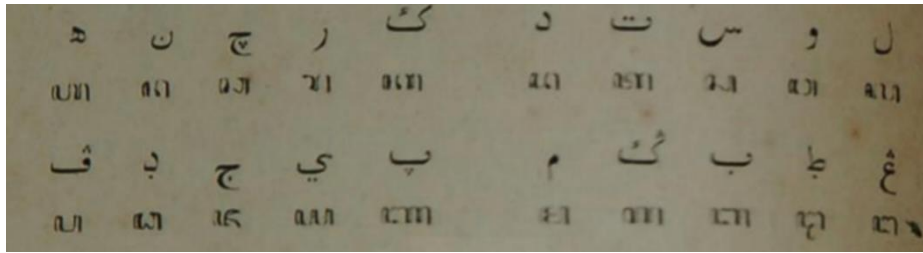


Gambar 1. Aksara Jawa Carakan

Perkembangan sistem tulis di Nusantara tidak berhenti hanya karena pengaruh India. Posisi geografisnya yang strategis di sepanjang jalur perdagangan utama menjadikannya pusat pertukaran berbagai budaya, termasuk dari Timur Tengah. Intensnya kontak dengan dunia Islam sejak akhir abad ke-13 mendorong asimilasi praktik budaya dan sastra, yang kemudian membentuk sistem tulis utama lain yang digunakan dalam bahasa Jawa.

Salah satu hasil interaksi ini adalah Arab Pegon, sebuah sistem penulisan yang mengadopsi aksara Arab (Hijaiyah) untuk menuliskan bahasa-bahasa lokal, termasuk Melayu dan Jawa. Proses ini dimulai sekitar tahun 1326 M, ketika aksara Arab pertama kali digunakan untuk menulis bahasa Melayu dalam bentuk yang disebut Jawi. Kemudian, aksara ini diadopsi oleh masyarakat Jawa, terutama pada masa pemerintahan Kesultanan Pajang (1568–1618 M), ketika Islam telah menyebar luas di seluruh Jawa dan penyebaran agama sedang marak-maraknya.

Perkembangan aksara Pegon dalam bahasa Jawa terjadi dalam dua tahap utama: adopsi dan adaptasi. Pertama, sistem aksara Arab, sebagaimana digunakan dalam bahasa Melayu (Jawi), diadopsi ke dalam bahasa Jawa. Kemudian, sistem tersebut dimodifikasi agar sesuai dengan fonologi bahasa Jawa, menghasilkan aksara yang khusus digunakan untuk menulis bahasa Jawa dengan aksara Arab, yang dikenal sebagai Pegon Arab.



Gambar 2. Adaptasi fonologis huruf Arab ke bahasa Jawa (Kartosoebroto, 1923).

Dengan demikian, evolusi sistem tulis dalam bahasa Jawa mencerminkan dinamika budaya yang kaya, lahir dari perpaduan tradisi lokal dan pengaruh asing. Aksara Jawa dan Arab Pegon mewakili dua aspek identitas sastra Jawa yang saling melengkapi—satu berasal dari timur melalui India, dan yang lainnya dari barat melalui dunia Islam. Keduanya kini menjadi warisan budaya yang tak ternilai yang menunggu untuk diperkenalkan kembali kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya dan memperkuat identitas nasional.

### 3. Permainan Papan sebagai Media Pendidikan

Media pendidikan mencakup semua bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima dalam proses pembelajaran yang efisien dan efektif (Ningtyas, 2023). Istilah "media" berasal dari kata Latin medium, yang berarti saluran atau jembatan komunikasi antara pengirim dan penerima. Dalam konteks pendidikan, media mengacu pada alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Secara sederhana, media pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mendukung proses belajar mengajar, membantu pesan atau konten yang dimaksud dipahami secara efektif oleh peserta didik. Saat ini, ada banyak bentuk media pendidikan. Salah satunya adalah permainan papan, jenis permainan yang dimainkan di papan atau permukaan datar. Permainan papan biasanya mencakup komponen-komponen seperti token, kartu, dan dadu. Permainan ini mengikuti aturan khusus dan melibatkan campuran strategi, keberuntungan, dan interaksi sosial di antara para pemain. Permainan papan pendidikan termasuk dalam kategori permainan papan yang beragam dan menawarkan keuntungan unik dari pembelajaran yang berpusat pada pemain. Mereka melibatkan pemain dalam berpikir kritis dan membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang disajikan selama permainan (Wirawan, 2024).

#### **4. Aksara Jawa dan Kebangkitan Nasionalisme**

Sistem penulisan bahasa Jawa, Aksara Jawa dan Arab Pegon, merupakan warisan budaya tak ternilai yang diwariskan dari warisan intelektual masyarakat Jawa. Lebih dari sekadar simbol grafis, aksara merupakan alat komunikasi yang memungkinkan manusia bertukar informasi, merenungkan makna, dan merekam perjalanan peradaban dan sejarah. Melalui aksara, manusia memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakatnya lintas waktu. Dengan kata lain, aksara merupakan kunci untuk memahami identitas budaya dan sejarah kolektif suatu bangsa. Hal ini menyatakan bahwa bangsa yang tidak menyadari sejarahnya sendiri akan kehilangan identitas dan karakternya. Pengetahuan sejarah bukan sekadar cabang ilmu pengetahuan, melainkan *conditio sine qua non*, syarat mutlak, bagi munculnya kesadaran nasional. Melalui kesadaran sejarah, muncul tanggung jawab moral dan sosial dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, melestarikan warisan budaya, seperti aksara tradisional, merupakan langkah vital dalam membangkitkan kembali kesadaran tersebut.

Kesadaran sejarah berkaitan erat dan tak terpisahkan dari kebangkitan kebangsaan dan nasionalisme. Kebangsaan merupakan tahap awal pembentukan negara-bangsa, sementara nasionalisme merupakan ideologi yang memperkuat fondasinya. Ideologi ini hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan jika disertai dengan pembinaan kesadaran sejarah yang berkelanjutan. Derajat integrasi nasional, menurut Siahaan, dapat dipertahankan melalui pengembangan narasi sejarah yang inklusif dan non-diskriminatif.

Dalam konteks ini, aksara bukan sekadar alat tulis, melainkan simbol peradaban dan identitas. Aksara berfungsi sebagai pengingat pencapaian intelektual di masa lalu dan inspirasi bagi perkembangan di masa depan. Ketika generasi muda diperkenalkan kembali pada Aksara Jawa dan Arab Pegon, mereka tidak hanya mempelajari bentuk-bentuk aksara, tetapi juga memulai perjalanan menelusuri identitas historis dan budaya masyarakatnya. Dengan demikian, mempelajari aksara berarti terhubung kembali dengan warisan, sejarah, dan identitas nasional seseorang.

## 5. Balap Kata: Permainan Papan Edukasi Aksara Jawa

Balap Kata adalah permainan papan edukatif inovatif yang dirancang untuk mengajarkan bahasa Jawa dengan memanfaatkan dua aksara asli Nusantara: Aksara Jawa dan Arab Pegon. Permainan ini diciptakan sebagai metode yang menyenangkan dan interaktif untuk memperkenalkan dan melestarikan aksara tradisional ini. Aturannya sederhana: pemain harus membentuk kata-kata Jawa menggunakan kartu Aksara Nglegena dan Abjad Pegon. Pemain (diwakili oleh pion) yang mencapai garis finis lebih dulu dinobatkan sebagai Nayaka Aksara, penguasa aksara.



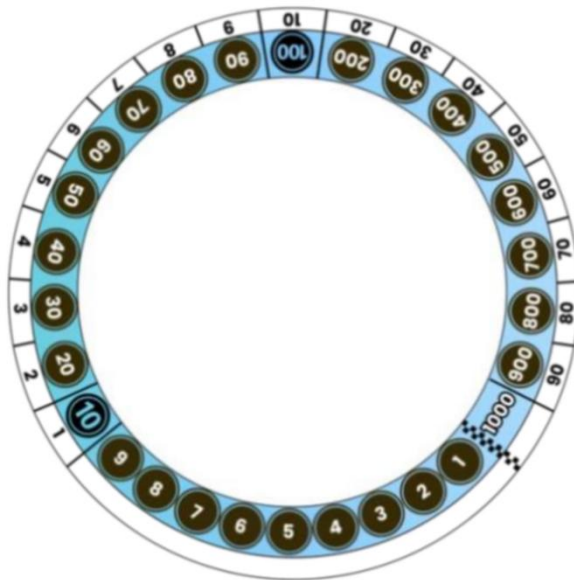
Gambar 3. Komponen Permainan Balap Kata

Dalam Balap Kata, pemain tidak hanya berkompetisi menyusun kata—mereka diajak menjelajahi kekayaan warisan linguistik dan budaya tradisi Jawa, yang semakin terpinggirkan oleh gelombang modernisasi. Permainan ini diharapkan dapat membantu pemain mengenali bentuk aksara, memperluas kosakata bahasa Jawa, dan menghargai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan aksara tersebut.

### Komponen Permainan

Balap Kata mencakup komponen-komponen berikut:

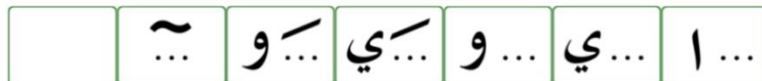
- 1 papan permainan utama (Balap Kata Board)



- 8 Papan Sandhangan, terdiri dari :
  - 4 papan Sandhangan untuk Aksara Nglegena



- 4 papan Sandhangan untuk Abjad Pegon

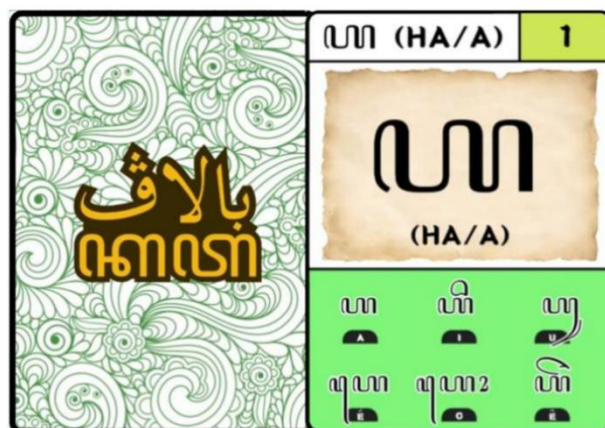


- 1 buku aturan

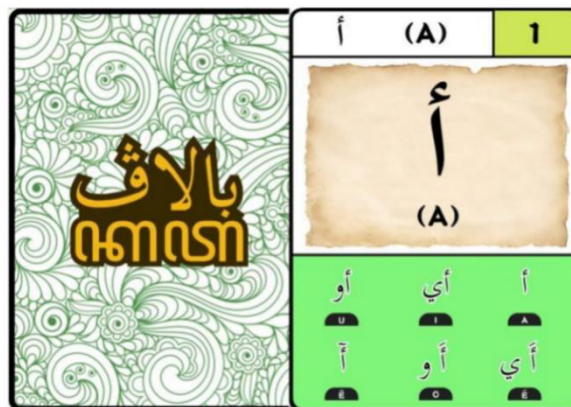
- 1 kamus kosakata bahasa Jawa
- 4 pion pemain Punokawan



- 129 kartu remi, dirinci sebagai berikut:
  - 22 Kartu Aksara Nglegena (×3 eksemplar)



- 21 kartu Abjad Pegon (×3 eksemplar)



## 6. Cara Bermain Balap Kata

Dalam Balap Kata, setiap pemain memulai petualangan menelusuri aksara Jawa dan Pegon dengan menyelesaikan tantangan menyusun kata. Ini bukan hanya permainan, tetapi juga pengalaman belajar yang mendalam di mana pemain membiasakan diri dengan bentuk, makna, dan pelafalan huruf, semuanya dalam suasana yang menyenangkan dan kompetitif. Permainan dimulai dengan membagikan enam kartu kepada setiap pemain. Setiap kartu menampilkan satu huruf dari Aksara Jawa atau Arab Pegon. Pada setiap giliran, pemain harus mengambil satu kartu baru dari tumpukan tengah dan kemudian membuang satu kartu ke dalam lingkaran buangan yang terletak di tengah papan. Putaran berlangsung searah jarum jam, dan siklus ini berlanjut sepanjang permainan.

Inti dari Balap Kata terletak pada kemampuan pemain untuk menyusun kata secara strategis menggunakan kartu huruf yang ada. Kapan pun, pemain yang yakin dapat menyusun kata Jawa yang valid dapat menempatkan kata tersebut di salah satu papan Sandhangan yang tersedia. Kata pertama yang disusun harus menggunakan huruf dari satu sistem aksara saja, baik seluruhnya dalam Aksara Jawa maupun seluruhnya dalam Aksara Arab Pegon. Misalnya, kata "jaka" dapat ditulis dalam Aksara Pegon (جَاكَا) atau Aksara Jawa (ꦗꦏꦏ).

Setelah berhasil menyusun kata pertama, giliran berikutnya memungkinkan pemain untuk mencampur huruf dari kedua sistem aksara. Setiap kartu huruf memiliki nilai poin yang tertera di sudutnya. Total nilai poin sebuah kata menentukan seberapa jauh pion Punokawan pemain dapat bergerak di sepanjang jalur permainan. Pemain dengan strategi paling efektif, mereka yang dapat menyusun kata-kata bernilai tinggi secara efisien, melaju lebih cepat menuju garis finis.

Permainan berakhir ketika seorang pemain: (1) mencapai garis finis dengan pionnya, atau (2) mengumpulkan lebih dari 1.000 poin. Pemain tersebut mendapatkan gelar kehormatan Nayaka Aksara, yang diperuntukkan bagi mereka yang mahir membaca, menyusun, dan melestarikan aksara tradisional. Melalui Balap Kata, mempelajari aksara lokal menjadi perjalanan seru yang penuh petualangan, kerja sama, dan kompetisi yang sehat, yang menghubungkan kembali generasi muda dengan warisan sastra nusantara.

Melalui pengembangan dan penerapan Balap Kata sebagai media edukasi interaktif, diharapkan masyarakat—terutama generasi muda—dapat kembali terlibat, memahami, dan mengamalkan aksara tradisional seperti Aksara Jawa dan Arab Pegon. Tujuan utama kami adalah agar permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun kembali kesadaran budaya, memperkuat identitas lokal, dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap warisan leluhur.



## **7. Implementasi Permainan Papan Balap Kata dalam Revitalisasi Aksara Tradisional**

Permainan Balap Kata ini ditujukan bagi anak-anak (dan dewasa) yang ingin mempelajari aksara Jawa (Aksara Basa Jawa) dengan cara yang tidak monoton dan menyenangkan melalui permainan. Pada prinsipnya, manusia sendiri adalah *homo ludens*, yaitu makhluk yang hidup di bumi dan gemar bermain. Bahkan beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan bermain sangat penting bagi perkembangan potensi anak, karena melalui bermain, anak-anak secara tidak langsung memperoleh pengetahuan baru dalam permainan.

Terdapat tiga gaya belajar yang dimiliki setiap individu, yaitu gaya belajar motorik, gaya belajar visual, dan gaya belajar motorik dan visual (Wirawan, 2024). Gaya belajar yang menggunakan permainan edukatif merupakan gaya belajar yang memanfaatkan aspek motorik dan visual. Penggunaan desain visual dalam permainan dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi pembelajaran positif tentang suatu hal kepada anak. Selain itu, gaya belajar ini juga dapat merangsang daya ingat manusia.

Menurut hasil penelitian National Training Laboratories tahun 2020 tentang retensi memori rata-rata manusia setelah menjalani proses pembelajaran dalam kurun waktu 24 jam, memberikan dampak yang signifikan terhadap daya ingat setiap individu. Tingkatan ini disusun berdasarkan dampak terendah hingga tertinggi, yaitu: ceramah yang hanya memberikan dampak 5% dari keseluruhan materi yang disampaikan, buku yang hanya memberikan dampak 10% dari ilmu yang diserap setelah 24 jam, audio visual yang memberikan dampak 20% dan dapat terserap lebih lama dalam memori siswa, demonstrasi yang memberikan dampak 30% dalam kurun waktu 24 jam, diskusi kelompok yang memberikan dampak 50% setelah 24 jam, praktikum memberikan dampak 75% terhadap kemampuan memori, Peer Teaching memberikan dampak 90% karena adanya permintaan untuk berperan sebagai asisten dosen atau mentor.

Hal-hal tersebut difasilitasi dalam satu media permainan, yaitu board game. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan yang semakin memantapkan langkah kami untuk terus mengembangkan permainan Balap Kata. Dimana board game kami saat ini masih dalam tahap prototipe dengan tingkat kesiapan mencapai kurang lebih 85%. Komponen-komponen permainan telah dikembangkan secara lengkap. Di dalamnya terdapat kartu aksara (Aksara Nglegena dan Abjad Pegon) yang berisi huruf-huruf dasar beserta transliterasi dan kosakatanya; papan balap yang menjadi arena utama permainan; papan Sandhangan (Aksara Nglegena dan Abjad Pegon) yang berfungsi untuk memodifikasi huruf dan kata; serta pion permainan berupa tokoh Punokawan, tokoh ikonik dalam budaya pewayangan Jawa, yang digunakan sebagai penanda giliran dan kemajuan bagi pemain. Dari segi mekanika, permainan ini sudah memiliki alur giliran yang jelas, sistem pembentukan kata berbasis huruf, dan skema perhitungan poin.

Meskipun demikian, kami telah mencoba menerapkan dan menguji coba permainan ini di beberapa komunitas, seperti komunitas permainan papan dan siswa sekolah. Kami melakukan uji coba untuk memeriksa mekanisme permainan bersama komunitas permainan papan Surabaya dalam acara Pasar Permainan Papan Surabaya (Subogama). Subogama dipilih karena menjadi wadah berkumpulnya para master permainan papan dari seluruh Indonesia.



Gambar 4: Playtest Balap Kata pada event Subogama

Berbagai saran dan masukan kami terima dari para peserta yang memainkan Balap Kata. Peserta uji coba Balap Kata berasal dari berbagai rentang usia, mulai dari remaja, dewasa muda, hingga orang tua. Banyak pemain yang memuji Balap Kata karena membangkitkan kembali ingatan mereka tentang Aksara Jawa, sekaligus dapat langsung mengaplikasikannya dalam permainan. Namun, banyak pula pemain yang awalnya belum mengenal atau mengenali bentuk Aksara Jawa dan Arab Pegon, sehingga bermain Balap Kata menjadi semacam rekreasi pengetahuan, karena dapat mempelajari hal-hal baru. Bahwa bahasa Jawa yang sering digunakan ternyata memiliki bentuk sistem penulisan yang mulai terlupakan.

Dalam uji coba yang kami lakukan di Subogama, sebenarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana respons masyarakat terhadap media pembelajaran aksara tradisional yang dikemas dalam bentuk permainan. Meskipun durasi dan alur permainan bergantung pada pengetahuan pemain tentang Aksara Basa Jawa, semua sepakat bahwa Balap Kata merupakan media yang dapat menjadi titik awal pengenalan bentuk-bentuk aksara tradisional. Mereka menyusun kata, memahami fungsi Sandhangan, dan mengaitkan kata yang terbentuk dengan konteks budaya setempat. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis permainan dapat menurunkan ambang kesulitan dalam mempelajari hal-hal yang sebelumnya dianggap asing atau sulit. Selain komunitas permainan papan di Subogama, Surabaya, kami juga mengimplementasikan permainan Balap Kata di lingkungan sekolah, tepatnya di SMA Institut Indonesia Semarang, sebagai ajang uji coba dalam konteks pendidikan formal.



Gambar 5: Siswa SMA Institut Indonesia Semarang bermain Balap Kata

Implementasi ini dilakukan di sela-sela pelajaran dan saat istirahat siswa. Berdasarkan pengamatan kami, anak-anak cukup menikmati proses merangkai kata-kata Jawa menggunakan Aksara Nglegena dan Abjad Pegon. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa dari mereka awalnya mengalami kesulitan karena belum familiar dengan bentuk hurufnya. Bagi siswa yang sudah paham dan familiar, mereka dapat menyesuaikan tempo permainan dengan lancar, tetapi bagi yang belum, mereka cenderung mencoba memahami bentuk huruf pada kartu terlebih dahulu, sehingga permainan berjalan lebih lambat. Meskipun demikian, semua siswa sepakat bahwa Balap Kata merupakan permainan yang menyenangkan untuk mengenal Aksara Basa Jawa dibandingkan dengan pembelajaran melalui materi ajar di kelas.

Berdasarkan pengamatan kami, para siswa menunjukkan minat dan antusiasme yang tinggi, terlihat dari intensitas permainan dan bagaimana para pemain begitu asyik bermain Balap Kata. Bahkan, siswa yang sebelumnya kurang aktif dalam pelajaran bahasa daerah menjadi lebih terlibat selama sesi permainan. Oleh karena itu, pada dasarnya Balap Kata memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai media pembelajaran tambahan dalam mata pelajaran muatan lokal bahasa Jawa.

Secara keseluruhan, hasil implementasi awal ini menunjukkan bahwa Balap Kata bukan sekadar permainan, tetapi juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan tradisional dan metode pembelajaran kontemporer. Melalui proses yang menyenangkan, pemain belajar mengenali bentuk huruf, aturan pembentukan kata, dan memahami konteks budaya yang melekat pada bahasa Jawa. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pengembangan permainan ini, yaitu membangkitkan kembali budaya literasi lokal melalui pendekatan kreatif dan partisipatif.

Ke depannya, tim pengembang gim (baca: kami) berencana menyempurnakan prototipe berdasarkan hasil pengujian, misalnya dengan menambahkan teknologi digital berbasis Realitas Virtual (VR) pada setiap kartu dengan menambahkan kotak kode QR. Harapannya, pemain dapat mengeksplorasi pengalaman visual yang lebih mendalam, mulai dari sejarah aksara hingga konteks budayanya dalam kehidupan sehari-hari, langsung dari perangkat mereka. Dengan menggabungkan aspek edukasi, budaya, dan teknologi, Balap Kata dapat menjadi media pembelajaran yang tidak hanya fungsional tetapi juga inspiratif dalam melestarikan warisan budaya bangsa.

### Balap Kata dan Perannya dalam Kesadaran Nasional

Selain sebagai media pembelajaran, permainan papan Balap Kata juga berperan sebagai upaya strategis untuk membangkitkan kembali akar-akar kesadaran budaya yang menjadi fondasi kesadaran berbangsa. Dari serangkaian uji coba bermain Balap Kata yang telah dilakukan, nyatanya banyak pemain merasa terbantu dalam mengenali sistem aksara bahasa yang sering mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Balap Kata juga menjadi sarana latihan untuk mengingat kembali memori linguistik yang selama ini jarang digunakan dan terlupakan. Kami sampaikan, permainan Balap Kata merupakan salah satu bentuk revitalisasi kearifan lokal, khususnya bahasa Jawa, melalui pendekatan yang menyenangkan dan partisipatif. Dengan mengajak pemain mengenali dan merangkai Aksara Jawa dan Arab Pegon, Balap Kata tidak hanya memperkenalkan sistem aksara yang telah terlupakan, tetapi juga membangun hubungan emosional antara pemain dengan warisan budaya leluhur mereka.

Bagaimanapun, pengetahuan tentang aksara dapat menjadi gerbang untuk mengenali identitas peradaban kita. Melalui aksara, kita dituntun untuk mengenali dan memahami sejarah peradaban manusia masa lalu. Sejarah, sebagai pengalaman masa lalu, memungkinkan manusia untuk belajar dan menelaah agar menjadi lebih bijak. Manusia harus mampu mengambil nilai-nilai sebagai pedoman hidup dan inspirasi untuk masa depan. Ungkapan *historia magistra vitae* atau "Sejarah adalah guru kehidupan" menjadi relevan. Jargon-jargon seperti "Jangan pernah meninggalkan sejarah", "Sejarah bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kesadaran", dan "Belajar dari sejarah" telah mengakar kuat.

Melalui aksara, kita dapat mempelajari bagaimana sejarah bangsa kita dahulu terbentang. Hal ini penting, mengingat kesadaran identitas nasional tidak dapat tumbuh tanpa kesadaran akan identitas lokal. Aksara, sebagai simbol peradaban dan pengetahuan, menyimpan nilai-nilai, pandangan dunia, dan filosofi masyarakat masa lalu. Ketika aksara menghilang dari kehidupan sehari-hari, perlahan ingatan kolektif kita sebagai bangsa yang besar pun akan ikut menghilang. Dengan Balap Kata, proses pembelajaran budaya tidak lagi monoton dan membosankan. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa diajak untuk merasakan langsung, melalui permainan, bagaimana menulis dalam aksara leluhur mereka. Proses ini menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan, dan keinginan untuk melestarikan. Ketiga hal inilah yang menjadi benih-benih nasionalisme berbasis budaya.

Nasionalisme berbasis budaya, menurut definisinya, adalah suatu bentuk kesadaran nasional yang tumbuh dari kecintaan dan keterikatan terhadap warisan budaya sendiri. Jadi, nasionalisme bukanlah sekadar dibangun oleh batas-batas teritorial, simbol negara, atau konstitusi, melainkan oleh perasaan, nilai, dan cara hidup bersama yang diwariskan turun-temurun dalam suatu komunitas nasional. Dalam jenis nasionalisme ini, budaya berfungsi sebagai fondasi utama pembentukan identitas nasional, yang mengikat masyarakat dalam rasa kebersamaan yang kuat, bahkan lintas keragaman geografis dan etnis. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme berbasis budaya menjadi sangat relevan. Bangsa ini lahir dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah, namun mampu memupuk semangat persatuan karena satu faktor pemersatu: kesadaran akan kekayaan dan keunikan budayanya. Bahasa daerah, adat istiadat, kesenian tradisional, hingga sistem aksara kuno seperti Aksara Jawa dan Arab Pegon, merupakan wujud nyata identitas budaya yang membentuk karakter bangsa.

Bahasa dan aksara, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wadah nilai-nilai, cara berpikir, bahkan cara pandang hidup suatu masyarakat. Ketika seseorang mempelajari aksara leluhurnya, sesungguhnya ia sedang terhubung kembali dengan sejarah, dengan nilai-nilai yang pernah hidup, dan dengan akar identitas yang membentuk mereka sebagai bagian dari bangsa ini. Di sinilah letak pentingnya pelestarian budaya: karena tanpa budaya, suatu bangsa kehilangan ingatan kolektifnya, kehilangan narasi tentang siapa dirinya, dan akhirnya kehilangan arah dalam membangun masa depan. Lebih dari itu, nasionalisme berbasis budaya yang kami wujudkan dalam bentuk yang kreatif dan adaptif melalui Balap Kata menjanjikan sebuah konsep budaya yang bukan sekadar sesuatu yang ditampilkan atau diingat, tetapi dihidupkan kembali dan dijadikan bagian dari praktik kehidupan modern. Hingga terbangun rasa kepemilikan dan kebanggaan. Dan dari rasa itulah, tumbuh benih-benih nasionalisme sejati. Dengan demikian, Balap Kata bukan sekadar alat pembelajaran, tetapi juga media untuk membentuk karakter dan identitas bangsa.

## **8. Implementasi Teknologi Digital**

Permainan papan Balap Kata telah terbukti menjadi media pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan partisipatif untuk memperkenalkan kembali aksara tradisional, khususnya Aksara Jawa dan Arab Pegon. Melalui pendekatan berbasis permainan, para pemain, baik anak-anak maupun dewasa, terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang tidak hanya merangsang daya ingat tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Hasil implementasi di berbagai kelompok menunjukkan bahwa Balap Kata berhasil menjembatani kesenjangan antara metode pembelajaran konvensional dan kebutuhan generasi masa kini yang lebih responsif terhadap bentuk pembelajaran interaktif dan visual. Lebih dari sekadar alat pendidikan, Balap Kata berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan kebanggaan akan identitas lokal sebagai bagian inti dari kesadaran nasional. Dengan pengembangan lebih lanjut, termasuk integrasi teknologi digital, permainan ini memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang menjadi media yang relevan dan inspiratif bagi pelestarian budaya di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (2012). *Pembinaan Kesadaran dan Penjernihan Sejarah*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adesina, OS (2017). Kebijakan luar negeri di era diplomasi digital. *Cogent Social Sciences*, <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1297175>
- Agung, A., & Intentilia, M. (2022). Presidensi G20 Indonesia 2022: Menghubungkan Soft Power dan Praktik Diplomasi Digital di Instagram. Dalam *Perspektif Indonesia* (Vol. 7, Edisi 2).
- Aktan, CC (2017). Anayasa iktisat dan vergilemede hukuki güvenlik ilkesi. *Hukuk dan İktisat Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 101–116.
- Aktan, CC (2017). Anayasası Vergi: Hukukun üstünlüğü dan mali demokrasi açısından bir zorunluluk. *Maliye Dergisi*, 172, 23–35.
- Aktan, CC, Dileyici, D., & Şen, H. (2019). Transparansi fiskal dan kepastian hukum di Turki: Sebuah analisis kelembagaan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Eropa*, 47(2), 155–176. <https://doi.org/10.1007/s10657-018-9617-6>
- Aktan, CC, Gencel, U., & Yay, S. (2019). Ingin reformasimu? Yoksa vergi deformu mu? *Yönetim Bilim Dergisi*, 17(33), 165–186.
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Perbedaan budaya dan moral pajak di Amerika Serikat dan Eropa. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 27(2), 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002>
- Alzahrani, S. (2023). Dampak Manajemen Proyek Agile yang Seimbang terhadap Kinerja Perusahaan melalui Kelincahan Proses Bisnis sebagai Mediator di Sektor TI Kerajaan Saudi
- Ang, I., Isar, YR, & Mar, P. (2015). Diplomasi budaya: Melampaui kepentingan nasional? *Jurnal Internasional Kebijakan Budaya*, 21(4), 365–381. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042474>
- Ang, I., Isar, YR, & Mar, P. (2015). Diplomasi Budaya: Melampaui Kepentingan Nasional? *Jurnal Internasional Kebijakan Budaya*, 21(4), 365–381. <https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042474>
- Anholt, S. (2020). *Persamaan Negara yang Baik: Bagaimana Kita Dapat Memperbaiki Dunia dalam Satu Generasi* (edisi ke-1). Berrett-Koehler Publishers, Incorporated.

- Anindia, A. (2022). DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN MELUI KOREA CULTURAL CENTER DALAM PROGRAM HANBOK EXPERIENCE. HUBUNGAN INTERNASIONAL JURNAL MOESTOPO, 2(1), 63–76.<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/2032/927>
- Aquino, MG, & Estrella, EO (2022). Keterampilan Manajemen Agile Pelatih Olahraga: Penilaian Mendalam. Jurnal Internasional Studi Multidisiplin Lanjutan, II(7).
- Arab. Jurnal Internasional Manajemen Kinerja Bisnis, 1(1), 1.<https://doi.org/10.1504/ijbpm.2023.10051535>
- ASEAN. (2016). Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2025. Sekretariat ASEAN. Caballero-Anthony, M. (2016). Pengantar Studi Keamanan Non-Tradisional: Pendekatan Transnasional. SAGE Publications Ltd.<https://doi.org/10.4135/9781473972308>
- Aswan, R., & Nachrawi, G. (2025). Kepastian Hukum dan Implementasi Program Kemitraan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. FOKUS, 6(1), 155–160.<https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1872>
- Ateke, B., & Stella Nwulu, C. (2021). Kemampuan Pemasaran Dinamis dan Adaptasi Perusahaan Perhotelan di Negara Bagian Rivers. Jurnal Ilmu Manajemen Nigeria, 22(1), 165–179.<https://www.researchgate.net/publikasi/350133541>
- Atthaisong, J., Boonthad Karoonyasiri, N., & Bangpradonk, K. (2022). Penerapan Lean Canvas untuk Manajemen Operasional dan Pemasaran. Dalam Jurnal Bisnis Digital dan Ilmu Sosial (Vol. 8, Edisi 2).
- Azhiin, AU, Tirtoadisuryo, D., Arief, S., Utomo, JD, & Kasmin. (2025). Pola Pikir Kewirausahaan: Kunci Sukses di Dunia Bisnis. Jurnal Ekonomi Keuangan Internasional (IJEFE), 4, 86–95.
- Bangsu, MNA, & Al-Fadhat, F. (2023). STRATEGI DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KERJASAMA INDONESIA TURKI: STUDI KASUS RUMAH BUDAYA INDONESIA. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, 12(2), 267–277.
- Bentley, D. (2007). Hak-hak Wajib Pajak: Teori, Asal-usul, dan Implementasi. Kluwer Law International.
- Bergman, M. (2009). Penggelapan pajak dan supremasi hukum di Amerika Latin: Budaya politik kecurangan dan kepatuhan di Argentina dan Chili. Penn State University Press.

- Bird, RM (2015). Keadilan dalam Perpajakan: Menggali Peran Keadilan dalam Kebijakan Perpajakan Modern. *Jurnal Perpajakan Kanada*.
- Bird, RM, & Zolt, EM (2008). Kebijakan pajak di negara-negara berkembang. *Lingkungan dan Perencanaan C: Pemerintahan dan Kebijakan*, 26(1), 73–86.<https://doi.org/10.1068/c17s>
- Bjola, C., & Kornprobst, M. (2018). *Memahami Diplomasi Internasional (Kedua)*. Routledge.
- Bombum, OD, Emmanuel, EG, & Ishaku, K. (2024). Mengkaji Dampak Manajemen Pendidikan Kewirausahaan terhadap Pengurangan Pengangguran di Kalangan Lulusan Perguruan Tinggi di Negara Bagian Cross River, Nigeria. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen SSR (SSRJEBM)*, 1(2).
- Boyatzis, RE (1998). *Transformasi informasi kualitatif: Analisis tematik dan pengembangan kode*. Sage Publications.
- Braithwaite, V. (2005). Regulasi dan perpajakan yang responsif: Pendahuluan. *Hukum & Kebijakan*, 27(1), 1–11.<https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2005.00191.x>
- Busyra, AL, Penulis, B., Akbari, TT, Bayuni, E., Muchie, S., Sahlu, S., Gebrehiwot, D., Yusina, I., Anwar, |, Ephrem, K., Gonfa, T., Busyra Basnur, A., & Assefa, A. (2024). *Media dan Diplomasi Publik untuk Konektivitas Internasional*. Paramedia Komunikatama.
- Byrne, D. (2022). Contoh nyata pendekatan Braun dan Clarke terhadap analisis tematik reflektif. *Kualitas dan Kuantitas*, 56(3), 1391–1412.<https://doi.org/10.1007/s11135-02101182-y>
- Cavusgil, ST, & Knight, G. (2015). Perusahaan global yang lahir: Perspektif kewirausahaan dan kapabilitas terhadap internasionalisasi dini dan cepat. Dalam *Jurnal Studi Bisnis Internasional* (Vol. 46, Edisi 1, hlm. 3–16). Palgrave Macmillan.<https://doi.org/10.1057/jibs.2014.62>
- Cevik, S., & Padilha, T. (2024). *Mengukur Kekuatan Lunak: Indeks Global Baru (WP/24/212)*.
- Chen, MH, & Tseng, M. (2021). Kreativitas artistik dan kewaspadaan kewirausahaan wirausahawan kreatif: perspektif jaringan guanxi. *Jurnal Internasional Perilaku dan Penelitian Wirausaha*, 27(4), 1082–1102.<https://doi.org/10.1108/IJEBr-05-2020-0306>
- Chynoweth, P. (2008). Penelitian hukum. Dalam A. Knight & L. Ruddock (Eds.), *Metode penelitian lanjutan dalam lingkungan binaan* (hlm. 28–38). Wiley-Blackwell.



- Cordeiro, CM, & Sindhøj, E. (2024). Mengadaptasi Model Bisnis Internasional untuk Proyek Uni Eropa: Fondasi Makro dan Mikro Model Uppsala dalam Kolaborasi Multinasional. *Bisnis*, 4(4), 509–530. <https://doi.org/10.3390/businesses4040031>
- Cortes, AF, & Lee, Y. (2021). Kewirausahaan sosial di UKM: catatan tentang tiga pertanyaan penting. *Jurnal Kewirausahaan New England*, 24(2), 62–78. <https://doi.org/10.1108/NEJE-03-2021-0014>
- Creswell, JW (2009). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran: Vol. Ketiga*. SAGE Publications.
- Creswell, JW, & Creswell, JD (2018). *Desain penelitian: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran (Kelima)*. SAGE.
- Cribb, R., & Ford, M. (Eds.). (2009). *Indonesia di Balik Tepian Air: Mengelola Negara Kepulauan*. ISEAS–Yusof Ishak Institute. [www.cambridge.org/core/books/indonesia-beyond-the-waters-edge/2ACEAEE9E0392E79DA3867AA576E89BE](http://www.cambridge.org/core/books/indonesia-beyond-the-waters-edge/2ACEAEE9E0392E79DA3867AA576E89BE)
- Cummings, MC (2003). *Diplomasi Budaya dan Pemerintah Amerika Serikat: Sebuah Survei*. Pusat Seni dan Budaya.
- Damoah, OOB, Adei Ashie, AA, & Elias, KK (2017). Memahami Hambatan yang Membatasi Kapasitas UKM untuk Berpartisipasi dalam Pelatihan Formal: Perspektif dari Pasar Berkembang. *Jurnal Manajemen Bisnis Pan-Afrika*, 1(1), 2017.
- Darma, ES, & Handoyo, SFL (2022). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil dan Pembinaan Usaha terhadap Pengembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pedagang Mikro di Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 23(2), 379–397. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.15462>
- Daryanto. (2016). *Media Pembelajaran*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Dellyana, D., Arina, N., & Fauzan, TR (2023). Tata Kelola Inovatif Digital Ekonomi Kreatif Indonesia: Perspektif Pemerintah. *Sustainability (Swiss)*, 15(23). <https://doi.org/10.3390/su152316234>
- Demirbag, M., Tatoglu, E., & Wood, G. (2024). Membangun praktik perusahaan bernilai tambah tinggi dalam konteks yang menantang: Jaringan formal dan manajemen talenta di Turki. *Hubungan Manusia*. <https://doi.org/10.1177/00187267241249815>
- Deyshappriya, NPR, & Maduwanthi, BCH (2021). Dampak Rantai Nilai Global terhadap Kinerja UKM di Sri Lanka: Bukti dari Sri Lanka. Rantai Nilai Global dan UKM: Konsep dan Definisi. Dalam S. Urata (Ed.), *Meningkatkan Partisipasi UKM dalam Rantai Nilai Global*:

- Determinan, Tantangan, dan Rekomendasi Kebijakan (hlm. 299–335).<https://www.researchgate.net/publikasi/351618713>
- Dirjen Kebudayaan RI. (2020). RENCANA STRATEGIS Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024.<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Renstra-Ditjen- Kebudayaan-2020-2024.pdf>
- do Thi, HT, Pasztor, T., Fozzer, D., Manenti, F., & Toth, AJ (2021). Perbandingan teknologi desalinasi menggunakan sumber energi terbarukan dengan analisis siklus hidup, pestle, dan keputusan multikriteria. *Water* (Swiss), 13(21).<https://doi.org/10.3390/w13213023>
- Donaldson, A. (2018). Nilai Hubungan Budaya. British Council.[www.britishcouncil.org/wawasan-penelitian/hubungan-nilai-budaya](http://www.britishcouncil.org/wawasan-penelitian/hubungan-nilai-budaya)
- eh, Ü. S.(2003). Vergi hukuku ile ilgili anayasal ilkeler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 251–271.
- Enaim, R., & Amine El Alamy, Y. (2023). Jurnal Internasional Linguistik, Sastra, dan Penerjemahan: Efektivitas Diplomasi Budaya dalam Meningkatkan Pemahaman Bersama.<https://doi.org/10.32996/ijllt>
- Ervanni, OW, Aravik, H., Noviani, D., & High Sharia Economics and Business Indo Global Mandiri, S. (2025). Analisis Komunikasi Internal Bisnis dalam Meningkatkan Motivasi Kerja. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(1).
- Etnolog. (2023). Bahasa-bahasa di Dunia. Etnolog.[https://www.ethnologue.com/Statistik Bagus. \(2024\). 7 Negara dengan Jumlah Lembaga BIPA Terbanyak di Dunia. Statistik Bagus.https://goodstats.id/article/7-negara-dengan-jumlah-lembaga-bipa-terbanyak-di-dunia-k0E1W](https://www.ethnologue.com/Statistik Bagus. (2024). 7 Negara dengan Jumlah Lembaga BIPA Terbanyak di Dunia. Statistik Bagus.https://goodstats.id/article/7-negara-dengan-jumlah-lembaga-bipa-terbanyak-di-dunia-k0E1W)
- Ferdiansyah, R. (2025). Analisis Pengaruh Industri Kreatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Perkotaan Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Regional*, 1(1).
- Ferkoul, F. (2024). Praktik dan peluang. *Jurnal Internasional Perspektif Ekonomi*, 18(10), 1896–1907.
- Firat, Ş. (2024). Pengembangan Bisnis – Proses, Metode dan Alat. *Gazdaság És Társadalom*, 17(1), 123–129.<https://doi.org/10.21637/GT.2024.1.07>
- Föhrenbach, C. (2020). Prinsip konstitusional proporsionalitas dan perpajakan dalam hukum Jerman. *Intertax*, 48(7/8), 664–676.

- Frey, BS, & Torgler, B. (2007). Moral pajak dan kerja sama bersyarat. *Jurnal Ekonomi Komparatif*, 35(1), 136–159. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2006.10.006>
- Frey, C. (2024). Diplomasi Digital: Dampak Teknologi terhadap Diplomasi Modern dan Kebijakan Luar Negeri. Realitas Saat Ini dan Prospek Masa Depan. Dalam *JURNAL RUMANIA TENTANG URUSAN EROPA* (Vol. 24, Edisi 1).
- Games, D., Albatati, B., & Sari, D. (2024). Strategi bisnis industri kreatif selama krisis: wawasan dari usaha rintisan usaha kecil yang diinkubasi. Pandangan ke depan. <https://doi.org/10.1108/FS-11-2022-0159>
- Gregson, G. (2025). Beranda UGM. Diperoleh dari [ugm.ac.id:https://ugm.ac.id/berita/jumlah-penutur-bahasa-jawa-mencapai-lebih-dari-80-juta-jiwa](https://ugm.ac.id/berita/jumlah-penutur-bahasa-jawa-mencapai-lebih-dari-80-juta-jiwa)
- Griffin, M. (2009). Narasi, Budaya, dan Diplomasi. *Jurnal Manajemen Seni, Hukum, dan Masyarakat*, 38(4), 258–269.
- Grincheva, N. (2024). Diplomasi Budaya Digital: Dari Penyedia Konten hingga Pembuat Opini. Dalam C. Bjola & I. Manor (Eds.), *The Oxford Handbook of Digital Diplomacy* (edisi ke-1, hlm. 194–211). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192859198.013.11>
- Gustafsson, C., & Lazzaro, E. (2021). Respons inovatif industri budaya dan kreatif terhadap tantangan sosial utama Eropa: Menuju basis pengetahuan dan kompetensi. *Keberlanjutan* (Swiss), 13(23). <https://doi.org/10.3390/su132313267>
- Heilmaier, J., & Ling, M. (2021). UKM dan PT: Observasi dari Brunei Darussalam dan Jerman. *Industri dan Pendidikan Tinggi*, 35(3), 244–251. <https://doi.org/10.1177/0950422220944749>
- Heryanto, A. (Ed.). (2008). *Budaya Populer di Indonesia* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203895627>
- Hikmah, H., Ratnawati, AT, & Darmanto, S. (2023). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Kapabilitas Dinamis terhadap Kinerja Bisnis di Industri Kreatif: Peran Mediasi Keunggulan Produk Inovatif. *Global Business and Finance Review*, 28(2), 17–33. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.2.17>
- Holmes, S. (2010). *Anatomi antiliberalisme*. Harvard University Press.
- Holsti, KJ (1978). Politik Internasional Baru? Diplomasi dalam Interdependensi Kompleks [Tinjauan Kekuasaan dan Interdependensi: Politik Dunia dalam Transisi, oleh RO Keohane & JS Nye]. *Organisasi Internasional*, 32(2), 513–530.



- Kabwe, FK, & Kabubi, M. (2025). Analisis Determinan Pengembangan Bisnis. Dalam jurnal Int. adv. multidisc. res. stud (Vol. 5, Edisi 2).[www.multiresearchjournal.com](http://www.multiresearchjournal.com)
- Kennedy, SI, Zadeh, AA, Choi, J., & Alborz, S. (2025). Praktik Agile dan Kesejahteraan Tim Pengembangan TI: Mengungkap Jalan Menuju Pengiriman Proyek yang Sukses. EMJ (Jurnal Manajemen Rekayasa), 37.<https://doi.org/10.1080/10429247.2024.2413710>
- Karakoç, M. (2004). Vergi hukukunda anayasal ilkeler. Universitas Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi, 53(1), 47–65.
- Kartosoebroto, M. (1923). Kitab Tjarakan Djawi-Arob. Semarang.
- Kasemsarn, K., & Nickpour, F. (2025). Penceritaan Digital dalam Pariwisata Budaya dan Warisan Budaya: Tinjauan Kerangka Kerja Integrasi Media Sosial dan Keterlibatan Pemuda. Heritage, 8(6), 200.<https://doi.org/10.3390/warisan8060200>
- Kayalidere, G., & Özcan, PM (2012). Periksa apakah akan ada analisis yang buruk. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1), 341–366.
- Kayalidere, K., & Özcan, K. (2012). Vergi harcamalarının gelir dağılımı üzerindeki etkileri. Maliye Dergisi, 163, 123–138.
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). DASAWARSA DIPLOMASI BATIK INDONESIA: REKAM JEJAK PERAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2008-2019 (1st ed.). Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2015). RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015—2019.<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RenstraKemdikbud2015-2019.pdf>
- Khairunnisa, BW (2024). Keterlibatan Indonesia dalam Diplomasi Budaya Membentuk Citra Internasionalnya. Jurnal Internasional Ilmu Sosial dan Penelitian Manusia, 7(05).<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i05-86>
- Khan, MSU, Mumtaz, S., Ali, Z., & Hussain, R. (2025). Diplomasi Budaya sebagai Alat Kekuatan Lunak: Analisis Komparatif Pakistan dan Arab Saudi. Jurnal Internasional Buletin Ilmu Sosial, 3(3).<https://doi.org/10.5281/ZENODO.15043508>

- Khunarsa, K. (2024). Kebijakan untuk mendorong soft power menuju pengembangan ekonomi kreatif. Sejarah soft power. *Jurnal Isu Publik dan Swasta: JPPI*, 1(1), 13–20.
- Kim, Y. (Ed.). (2013). *Gelombang Korea: Media Korea Mendunia*. Routledge.<https://doi.org/10.4324/9781315859064>
- Kirchler, E. (2007). *Psikologi ekonomi perilaku pajak*. Cambridge University Press.<https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Kepatuhan pajak yang dipaksakan versus sukarela: Kerangka kerja “slippery slope”. *Jurnal Psikologi Ekonomi*, 29(2), 210–225.<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kitchens, B., Johnson, SL, & Gray, P. (2020). Memahami Ruang Gema dan Gelembung Filter: Dampak Media Sosial terhadap Diversifikasi dan Pergeseran Partisan dalam Konsumsi Berita. *MIS Quarterly: Sistem Informasi Manajemen*, 44(4), 1987–2011.<https://doi.org/10.25300/MISQ/2020/16371>
- Knight, GA, & Cavusgil, ST (2004). Inovasi, kapabilitas organisasi, dan perusahaan yang lahir secara global. *Jurnal Studi Bisnis Internasional*, 35(2), 124–141.<https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400071>
- Koch, F., Hoellen, M., Konrad, ED, & Kock, A. (2023). Inovasi dalam industri kreatif: Menghubungkan orientasi kreatif dan bisnis pendiri dengan hasil inovasi. *Manajemen Kreativitas dan Inovasi*, 32(2), 281–297.<https://doi.org/10.1111/caim.12554>
- Koentjaraningrat. (1983). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Angkasa Baru.
- Koudriachov, C., Tam, C., & Aparicio, M. (2025). Sukses dengan Manajemen Proyek Agile: Melihat ke Belakang dan Masa Depan. *Jurnal Sistem dan Perangkat Lunak*, 226.<https://doi.org/10.1016/j.jss.2025.112428>
- Kumar, GS (2025). Sebuah bangsa yang bergerak: Jejak global Indonesia meluas dengan kemenangan budaya dan momentum ekonomi. *Brand Finance*.<https://brandfinance.com/press-releases/dari-pertumbuhan-ke-tata-kelola-malaysia-meningkatnya-pengaruh-global-2>
- Kumar, L., & Sharma, RK (2024). Menelaah interdependensi antardimensi solusi untuk pembangunan berkelanjutan di UKM berdasarkan konsep Industri 4.0. *Kybernetes*.<https://doi.org/10.1108/K-09-2023-1674>
- Kumari, S., & Kaur, M. (2024). Kekuatan Lunak India: Diplomasi Budaya, Diaspora, dan Kepemimpinan Global. *Jurnal Riset Multidisiplin Internasional Gurukul*.<https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2410III02V12P0002>

- Kusmantini, T., Sutiono, HT, Budhidarma, S., Salleh, F., & Darwish, S. (2024). Pengaruh Anteseden Strategi Bisnis Hijau dan Kemampuan Inovasi terhadap Kinerja UKM Fesyen Kreatif di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi Manajemen Asia-Pasifik*, 19(3).<http://dx.doi.org/10.59631/sbr.v1i2.39>
- Kusumaningrum, DN (2024). Ekonomi Kreatif: Meninjau Narasi Politik Global. *Jurnal Dunia dan Politik Islam*, 8(1), 46–61.<https://doi.org/10.18196/jiwp.v8i1.79>
- Lang, M. (1998). Pengantar hukum konvensi perpajakan berganda. Linde Verlag. Lang, PJ (1998). Vergi adaletinin anayasal temelleri.
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Diplomasi Publik. Pusat Kebijakan Luar Negeri.
- Loiro, C., Castro, H., Ávila, P., Cruz-Cunha, MM, Putnik, GD, & Ferreira, L. (2019). Manajemen Proyek Agile: Proposal Alur Kerja Komunikasi. *Ilmu Komputer Procedia*, 164, 485–490.<https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.12.210>
- Luckyardi, S., & Apriliani, DA (2022). Pemasaran Kuliner Indonesia Berbasis Digital Marketing sebagai Sarana Gastro Diplomasi. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Asia*, 16(2), 282–291.<https://doi.org/10.32812/jibeka.v16i2.968>
- Luttmer, EFP, & Singhal, M. (2014). Moral pajak. *Jurnal Perspektif Ekonomi*, 28(4), 149–168.
- Magash, T., & Hashimito, S. (2024). Persinggungan Budaya dan Hubungan Internasional. Dalam Artikel di Crime Media Culture, *Jurnal Internasional*. <https://www.researchgate.net/publikasi/385074519>
- Mammadova, E., & Abdullayev, A. (2025). Industri Budaya dan Daya Saing Ekonomi Nasional: Perspektif Global. *Porta Universorum*, 1(3), 322–344.<https://doi.org/10.69760/portuni.010326>.
- Manor, I. (2018). Digitalisasi Diplomasi: Menuju Klarifikasi Terminologi yang Terpecah-pecah (2; Oxford Digital Diplomacy Research Group).<http://www.qeh.ox.ac.uk/sites/www.odid.ox.ac.uk/files/DigDipIoROxWP2.pdf>
- Manor, I., & Huang, ZA (2022). Digitalisasi diplomasi publik: Konsep, tren, dan tantangan. *Komunikasi dan Publik*, 7(4), 167–175.<https://doi.org/10.1177/20570473221138401>
- Mark, S. (2009). Peran Diplomasi Budaya yang Lebih Besar.<http://researchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/2943>
- McAslan, D., Najar Arevalo, F., King, DA, & Miller, TR (2021). Proyek percontohan purgatory? Menilai proyek percontohan kendaraan

otomatis di kota-kota AS. *Komunikasi Humaniora dan Ilmu Sosial*, 8(1).<https://doi.org/10.1057/s41599-021-01006-2>

McCrudden, C. (2006). Penelitian hukum dan ilmu sosial. *Law Quarterly Review*, 122, 632–656.

Melissen, J. (2005). Diplomasi Publik Baru: Antara Teori dan Praktik. Dalam J. Melissen (Ed.), *Diplomasi Publik Baru, Kekuatan Lunak dalam Hubungan Internasional*. Palgrave Macmillan, AS.

Melissen, J. (2005). *Diplomasi Publik Baru: Kekuatan Lunak dalam Hubungan Internasional*. Palgrave Macmillan.

Monteiro, GFA (2021). Penggunaan desain dalam strategi bisnis: Apa yang ada di balik permukaan? *Isu Desain*, 37(3), 78–88.[https://doi.org/10.1162/desi\\_a\\_00649](https://doi.org/10.1162/desi_a_00649)

Moon, MD (2019). Triangulasi: Sebuah Metode untuk Meningkatkan Validitas, Reliabilitas, dan Legitimasi dalam Penelitian Klinis. *Jurnal Keperawatan Gawat Darurat*, 45(1).

Muhlas, ERD, Prihatiningtyas, S., & Hasbullah, KAW (2021). Strategi Pemasaran UKM Kreatif dalam Memasuki Pasar Ekspor (Studi Kasus di Asosiasi Mitra Kreatif IKM Mandiri). *INCOME: Studi Manajemen dan Pengembangan Inovasi*, 1(1), 16–21

Mulya, A. (30 Desember 2024). Industri Pariwisata di Indonesia: Prospek dan Peluang. *InvestinAsia*.<https://investinasia.id/blog/industri-pariwisata-di-indonesia/>

Musgrave, RA, & Musgrave, PB (1989). *Keuangan publik dalam teori dan praktik* (edisi ke-5). McGraw-Hill.

Musoni, M., Karkare, P., Teevan, C., & Domingo, E. (2023). Pendekatan global terhadap kedaulatan digital: Definisi yang bersaing dan kebijakan yang kontras.

Nashier, LA, & Heryanto, D. (2023). Implementasi Puzzle Game pada Media Pembelajaran Aksara Sunda. *Jurnal Algoritma*, 259-269.

Natasha, C., & Martha, J. (2023). Kontribusi Diplomasi Gamelan dalam Memulihkan Hubungan Bilateral Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 45–56.<https://doi.org/10.18196/jhi.v12i2.18630>

Nawaksara, D. (2021). *Kawi, Induk Aksara di Nusantara*. Kediri : Nawaksara.

Nawaksara, D. (2022). *AKSARA sejarah dan perkembangannya dari media tulis kuno hingga media digital*. Yogyakarta: Nawaksara.



- Nawaksara, D. (2024). *Aksara Pegon: Sejarah, Eksistensi, dan Masa Depan* di Era Digital. Lamongan: Nawaksara.
- Ngatno, N., Dewi, RS, & Warsono, H. (2024). Kinerja Inovasi UKM Berbasis Pembelajaran Organisasi, Orientasi Kewirausahaan, dan Modal Pelanggan, Studi Kasus Industri Kreatif di Jawa Tengah. *Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Riset Lanjutan dalam Ilmu Sosial dan Ekonomi (ICARSE 2023)*, 225–234. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-247-7\\_26](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-247-7_26)
- Ningtyas, SI (2023). Penggunaan Board Game Sebagai Media Pembelajaran Untuk Melatih Berpikir Kreatif Siswa. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 871-880.
- Nugroho, BT, & Adi, AN (2024). Analisis Sentimen untuk Mengetahui Persepsi Publik terhadap Komunikasi Publik Bea dan Cukai Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Internasional Sinergi*, 1(2).
- Nurisnaeny, PS, Kaprisma, H., & Suwedi. (2024). DIPLOMASI BUDAYA DAN TANTANGAN GLOBAL DI G20 INDONESIA 2022. *Tinjauan Internasional Studi Humaniora*, 9(1), 14–32. <https://doi.org/10.7454/irhs.v9i1.1269>
- Nye, JS (2008). Diplomasi Publik dan Kekuatan Lunak. *ANNALS Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika*, 616(1), 94–109. <https://doi.org/10.1177/0002716207311699>
- Nye, JS (2009). *Soft Power: Jalan Menuju Kesuksesan dalam Politik Dunia*. PublicAffairs.
- Oats, L. (2012). *Perpajakan: Kebijakan dan Praktik* (edisi ke-19). Fiscal Publications.
- OECD. (2021). *Administrasi Perpajakan 2021: Informasi Komparatif tentang OECD dan Negara-negara Ekonomi Maju dan Berkembang Lainnya*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/2fea2fce-id>
- Örücü, E. (2007). Pengayaan bahasa hukum dan metode hukum: Hukum perbandingan. *Forum Hukum Eropa*, 5(6), 285–289.
- Otmazgin, NK (2012). Geopolitik dan Kekuatan Lunak: Kebijakan Budaya dan Diplomasi Budaya Jepang di Asia. *Asia-Pacific Review*, 19(1), 37–61. <https://doi.org/10.1080/13439006.2012.678629>
- P, PHI, Supriadi, I., N, EH, & Sari, Y. (2024). Identitas Budaya Indonesia dalam Jejaring Media Sosial: Analisis Wacana Kritis Instagram Pengguna Gen Z. *MSJ: Majority Science Journal*, 2(1), 171–177. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i1.76>
- Pacagnella, AC, & da Silva, VR (2023). 20 Tahun Manifesto Agile: Tinjauan Pustaka tentang Manajemen Proyek Agile. *Tinjauan Manajemen dan*

Rekayasa Produksi, 14(2), 37–48.  
<https://doi.org/10.24425/mper.2023.146021>

Padmosoekotjo, S. (1984). Wewaton Panulise Basa Jawa Nganggo Aksara Jawa. Surabaya : PT Citra Jaya Murti.

Parnell, JA, Long, Z., & Lester, D. (2015). Strategi bersaing, kapabilitas, dan ketidakpastian pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Tiongkok dan Amerika Serikat. *Keputusan Manajemen*, 53(2), hlm. 402–431.  
<https://doi.org/10.1108/MD-04-2014-0222>

Parveen, K., & Daud, M. (2021). Transformasi Digital Cepat Menggunakan Metodologi Agile untuk Proyek Pengembangan Perangkat Lunak. *Jurnal Riset Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi*, Universitas Garrison Lahore, 5(3), hlm. 54–64.  
<http://dx.doi.org/10.54692/lgurjcsit.2021.0503218>

Pavliuk, S. (2023). Peran industri kreatif dalam pembangunan ekonomi lokal. *Ilmu Agraria Wilayah Laut Hitam Ukraina*, 27(1).  
<https://doi.org/10.56407/bs.agraria/1.2023.74>

Pemberton, J. (1995). Tentang “Java” (cetakan ke-2). Cornell University Press.

Peñarroya-Farell, M., Miralles, F., & Vaziri, M. (2023). Inovasi model bisnis yang terbuka dan berkelanjutan: Perspektif berbasis niat dari perusahaan budaya Spanyol. *Jurnal Inovasi Terbuka: Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas*, 9(2).  
<https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100036>

Perdani, MK, Afandi, R., Lusa, S., Sensuse, DI, Putro, PAW, & Indriasari, S. (2024). Media Sosial sebagai Instrumen Diplomasi Publik di Era Digital: Tinjauan Literatur yang Sistematis. *Tinjauan Kebijakan & Tata Kelola*, 8(2), 284–302.  
<https://doi.org/10.30589/pgr>

Plaza, B., & Haarich, SN (2017). Seni, budaya, dan kreativitas sebagai pendorong pembangunan wilayah, inovasi, dan daya saing. Dalam *Meningkatkan Partisipasi dalam Seni di Uni Eropa: Tantangan dan Metode* (hlm. 371–388). Springer International Publishing  
<https://doi.org/10.1007/978-3-319-09096-225>

Pohan, S., Pohan, H., & Savitri, IN (2017). Diplomasi Digital - Memaksimalkan Media Sosial dalam Diplomasi Ekonomi dan Budaya Indonesia. *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, 81, 372–390.

Prasetyo, SAYA, & Roderico, B. (2024). Perancangan Desain Board Game Pengenalan Budaya Wayang Punakawan Yogyakarta Untuk Anak. *Gestalt: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 105-120.

- Prica, F., & Bjelic, N. (2025). Meningkatkan Efisiensi Proyek: Peran Manajemen Proyek Agile dalam Lanskap Korporat yang Dinamis. Dalam JPO (Vol. 8, Edisi 1).
- Prichard, W. (2015). Perpajakan, responsivitas, dan akuntabilitas di Afrika Sub-Sahara: Dinamika tawar-menawar pajak. Cambridge University Press.
- Priya, D., Roney Varghese, G., Kant Sharma, S., Vaidya, V., Bharat, V., Khan, D., & Singh Yadav, H. (2025). Manajemen Perubahan dalam Organisasi: Strategi untuk Implementasi yang Sukses dan Mitigasi Resistensi. *Questiones de Fisioterapia*, 54(3), 4788–4797. <https://doi.org/https://doi.org/10.48047/dgp89662>
- Purna, IM, & Dwikayana, K. (2019). BETUTU BALI : MENUJU KULINER DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 11(2), 265. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v11i2.478>
- Rachmawati, IK, Bahri, S., Bukhori, M., & Hidayatullah, S. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dan Model Implementasi Kebijakan Jones Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupaten Malang Studi Pada (Desa Kebobang Kecamatan Lopawon) Gunung Kawi Kabupaten Malang. *Konferensi Internasional Studi Perhotelan dan Pariwisata (ICONHOSTS) 2021*, 1(1), 212–222.
- Ramadhan, IRM, & Nur, N. (2025). Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan Properti B&B. *PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 22(1), 53–71. <https://doi.org/10.29313/perfor>
- Ramadilla, HS, Surbakti, H., & Hartati, R. (2024). Etika dalam Penerjemahan Lintas Budaya: Memahami Sensitivitas Budaya dalam Pekerjaan Penerjemahan. *Sintaksis: Publikasi Ahli Bahasa dan Sastra Inggris*, 3(1), 28–38. [doi.org/10.61132/sintaksis.v3i1.1248](https://doi.org/10.61132/sintaksis.v3i1.1248)
- Ravindranath, M., & Cohn, AC (2014). Bisakah suatu bahasa dengan jutaan penutur terancam punah? <http://hdl.handle.net/1885/11968>
- Reynaldi, HA (2021). MENGEMBANGKAN FUNGSI DIPLOMATIK PRODUK KERAJINAN LOKAL: PELAJARAN DARI STRATEGI PEMIMPIN LOKAL DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT SELATAN TERHADAP BATIK TAHUN 2021. *Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik Membangun Industri Kerajinan dan Batik yang Tangguh di Masa Pandem*, 1–15.
- Reza, TR (2022). Ekspor yang Didorong Hallyu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan—Pendekatan Diplomasi Budaya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 20–36. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33230>

- Rimbano, D., Susanto, Y., & Suwarno, B. (2024). Peluang Dan Strategi Usaha Produk Baru (Studi Produk Mahasiswa Universitas Widyatama). SABAJAAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2.
- Riordan, S. (2003). Diplomasi Baru. Polity Press bekerja sama dengan Blackwell Pub. Didistribusikan di Amerika Serikat oleh Blackwell Publishers.
- Rosser, LA (2023). Menerapkan Kelincahan untuk Keamanan Berkelanjutan. INSIGHT, 26(2), 45–52. <https://doi.org/10.1002/inst.12445>.
- Saahan, M. (2019). Türk vergi sisteminde anayasal denetim mekanizmaları. Universitas İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, 77(2), 313–336.
- Saahan, Ö. (2019). Cumhurbaşkanının vergi ile ilgili düzenleme yapma yetkisi dan yetkisinin sınırları. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(2), 693–711.
- Salder, J. (2020). Bisnis kreatif: pengembangan usaha dalam industri kreatif berbasis seni. Jurnal Industri Kreatif, hlm. 1–18. <https://doi.org/10.1080/17510694.2020.1789414>
- Sangwa, S. (2021). Penilaian kontribusi berbagai faktor dalam pengembangan usaha yang dipimpin pemuda di distrik Nyanza, Rwanda. Dalam Open Journal of Business (Vol. 1, Edisi 3). [www.openchristian.education](http://www.openchristian.education)
- Sari, DS (2022). Pengaruh Teknologi dan Persaingan terhadap Pengembangan Usaha (Studi Kasus Pusat Layanan Bisnis Terpadu KUMKM Sumatera Utara). Seminar dan Konferensi Internasional Studi Islam (ISCIS) ke-1, 2022.
- Sari, FK (2018). Makna Filosofis dan Kearifan Lokal dalam Aksara Jawa Serta Pemanfaatannya Sebagai Materi Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sassa, AC, Alves De Almeida, I., Nakagomi, T., Pereira, F., & Silva De Oliveira, M. (2023). Scrum: Tinjauan Literatur yang Sistematis. IJACSA) Jurnal Internasional Ilmu dan Aplikasi Komputer Tingkat Lanjut, 14(4), 2023. [www.ijacsa.thesai.org](http://www.ijacsa.thesai.org)
- Schaetz, N., Gagrčin, E., Toth, R., & Emmer, M. (2023). Ketergantungan algoritma dalam penggunaan berita berbasis platform. Media Baru dan Masyarakat. <https://doi.org/10.1177/14614448231193093>
- Schneider, CP (2003). DIPLOMASI YANG BERHASIL: “PRAKTIK TERBAIK” DALAM DIPLOMASI BUDAYA. [www.americansforthearts.org/sites/default/files/Schneider.pdf](http://www.americansforthearts.org/sites/default/files/Schneider.pdf)

- Schneider, CP (2005). Budaya Berkomunikasi: Diplomasi AS yang Berhasil. Dalam J. Melissen (Ed.), *Diplomasi Publik Baru, Kekuatan Lunak dalam Hubungan Internasional*. Palgrave Macmillan, AS.
- Setyaningrum, RP, Kholid, MN, & Susilo, P. (2023). Kinerja UKM Berkelanjutan dan Keunggulan Kompetitif Hijau: Peran Kreativitas Hijau, Kemandirian Bisnis, dan Pemberdayaan TI Hijau. *Sustainability (Swiss)*, 15(15).<https://doi.org/10.3390/su151512096>
- Shore, C. (2014). Paradoks 'diplomasi publik': Perspektif etnografis terhadap delegasi Uni Eropa di antipoda. *Jurnal Antropologi Australia*.
- Siahaan, H. (2001). *Nasionalitas, Nasionalisme, dan Kesadaran Sejarah*. Bandung: Setya Historika.
- Sibiya, A., Sibiya, B., Jordaan, J., & Mahosi, BN (2023). Meningkatkan Manajemen Proyek untuk UKM: Pendekatan Hibrida. *Jurnal Penelitian Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 106–122.<https://doi.org/10.34001/jmer.2023.12.04.2-42>
- Sigarlaki, KI, Wibisono, IW, & Suwartiningsih, S. (2025). Strategi Diplomasi Publik Indonesia melalui Program Malam Budaya Indonesia dalam Meningkatkan Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand. *Jurnal Internasional Pemahaman Multikultural dan Multiagama*, 12(6).<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v12i6.6895>
- Soekiman, D. (2011). *Kebudayaan Indis: dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Some, RK, & Anyieni, A. (2024). Nomor artikel AJEFM.1701 Artikel Penelitian Asli Some dan Anyieni. Dalam *Asian J. Econ. Fin. Manage* (Vol. 6, Edisi 1).<https://prh.globalpresshub.com/ulasan-sejarah/1701>
- Spranger, E. (2002). *Kultur dan Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze*. Jerman: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Stevenson, R., Burnell, D., & Fisher, G. (2024). Produk Minimum yang Layak (MVP): Teori dan Praktik. *Jurnal Manajemen*.<https://doi.org/10.1177/01492063241227154>
- Stinson, C. (2022). Algoritma tidak netral. *AI dan Etika*, 2(4), 763–770.<https://doi.org/10.1007/s43681-022-00136-w>
- Supriadi, Helmi, TA, Tarigan, NMR, & Bangun, MS (2023). Transformasi Ekonomi Kota Medan: Peran Manajemen dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif. *Regresi: Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 3(3), 193–198.<https://doi.org/10.57251/reg.v3i3.1525>

- Supriyanto, EE, Suparto, D., Rachmawati, M., & Saputra, J. (2024). Kolaborasi multipihak dalam model bantuan terpadu bagi UMKM kreatif di sektor pariwisata. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 1(1), 29–45. <https://doi.org/10.69812/itj.v1i1.16>
- Tahalea, SP, & Azhari, SN (2019). Identifikasi Aktor Sentral Kelompok Kejahatan Menggunakan Analisis Jaringan Sosial Semantik. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia (IJIS)*, 2(1).
- Taherizadeh, A., & Beaudry, C. (2023). Teori dasar yang muncul tentang transformasi digital berbasis AI: Perspektif UKM Kanada. *Industri dan Inovasi*, 30(9), 1244–1273. <https://doi.org/10.1080/13662716.2023.2242285>
- Teufer, B., & Grabner-Kräuter, S. (2023). Bagaimana jaringan konsumen berkontribusi pada konsumsi sadar dan kesejahteraan yang berkelanjutan. *Jurnal Urusan Konsumen*, 57(2), 757–784. <https://doi.org/10.1111/joca.12536>
- Thuronyi, V. (Ed.). (1996). Perancangan dan Penyusunan Undang-Undang Pajak (Vol. I). Dana Moneter Internasional. <https://www.imf.org/external/pubs/nft/1996/tlaw/eng/index.htm>
- Tibererwa, E. (2025). Diplomasi Budaya: Seni sebagai Alat Hubungan Internasional. *Jurnal Eksperimen Eurasia Humaniora dan Ilmu Sosial (EEJHSS)*, 7(1). [www.eejournals.org/](http://www.eejournals.org/)
- Toprak, E., & Genc-Kumtepe, E. (2014). Komunikasi dan Kolaborasi Lintas Budaya: Kasus Proyek e-Learning Internasional. *Jurnal Eropa Pembelajaran Terbuka, Jarak Jauh, dan E-Learning*, 17(1), 134–146. <https://doi.org/10.2478/eurodl-2014-0009>
- Torgler, B. (2007). Kepatuhan pajak dan moral pajak: Analisis teoretis dan empiris. Edward Elgar Publishing.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2009). Dampak patriotisme terhadap moral dan kepatuhan pajak: Analisis empiris lintas negara. *Analisis Ekonomi & Kebijakan*, 39(1), 1–17.
- Torres, ECM, & de Picado-Santos, LG (2025). Analisis Sentimen dan Pemodelan Topik dalam Transportasi: Tinjauan Pustaka. *Jurnal Ilmu Terapan (Swiss)* (Vol. 15, Edisi 12). Institut Penerbitan Digital Multidisiplin (MDPI). <https://doi.org/10.3390/aplikasi15126576>
- Tran My, L., Trinh, HHH, & Thai, HCV (2023). Latar belakang pribadi kewirausahaan berpotensi tinggi di Vietnam. *Jurnal Pengembangan Sains & Teknologi - Ekonomi - Hukum dan Manajemen*. <https://doi.org/10.32508/stdjelm.v7i4.1260>

- Treynor, J. (1961). Negara, perpajakan, dan supremasi hukum. *Public Finance Review*, 9(3), 312–327.
- Treynor, JL (1961). Saya yakin itu akan menjadi masalah besar bagi Anda. *TBB Dergisi*, 35(13), 84–85.
- Triwibowo, A. (2023). Prospek dan Keterbatasan Diplomasi Digital: Kasus Indonesia. *Jurnal Diplomasi Den Haag*, 19(1), 224–269.
- Turan, M. (2021). Asas legalitas dalam hukum pajak Turki dan implikasi konstitusionalnya. *Ankara Law Review*, 18(2), 105–124. [doi.org/10.21153/alr2021vol18no2art1024](https://doi.org/10.21153/alr2021vol18no2art1024)
- UNESCO. (nd). Daftar Warisan Budaya Takbenda. Diakses tanggal 29 Juni 2025, dari <https://ich.unesco.org/id/daftar>
- Usman, M., Vanhaverbeke, W., & Roijakkers, N. (2023). Bagaimana inovasi terbuka dapat membantu wirausahawan dalam merasakan dan memanfaatkan peluang kewirausahaan di UKM. *Jurnal Internasional Perilaku dan Penelitian Kewirausahaan*, 29(9–10), 2065–2090. <https://doi.org/10.1108/IJEBr-11-2022-1019>
- Vami, FS, Faraswacyen, D., & Gaol, L. (2020). Strategi Bekraf terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional. *BALKO: Jurnal Diplomasi Kontemporer Budi Luhur*, 4(1), 93–102
- Varotsis, N. (2022). Kewirausahaan Digital dan Industri Kreatif dalam Pariwisata: Agenda Penelitian. *Jurnal Ekonomi* (Vol. 10, Edisi 7). MDPI. <https://doi.org/10.3390/ekonomi10070167>
- Viartasiwi, N., Trihartono, A., & Hara, AE (2020). Membongkar Diplomasi Budaya Indonesia: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Internasional Masa Depan Berkelanjutan untuk Keamanan Manusia*, 7(2), 25–51. [dx.doi.org/10.2490/jsustain/7.2/2331](https://doi.org/10.2490/jsustain/7.2/2331)
- Viartasiwi, N., Trihartono, A., & Hara, E. (2021). Membongkar Diplomasi Budaya Indonesia: Potensi dan Tantangan. 7, 23–31. <https://doi.org/10.2490/jsustain/7.2/2331>
- Wang, Z., Ma, Y., Song, Y., Huang, Y., Liang, G., & Zhong, X. (2024). Pemanfaatan Pemrosesan Bahasa Alami untuk Menganalisis Data Media Sosial dalam Penelitian Keperawatan: Tinjauan Cakupan. Dalam *Jurnal Manajemen Keperawatan* (Vol. 2024, hlm. 2857–497). <https://doi.org/10.1155/ionm/2857497>
- Wei, YM, & Lin, HM (2024). Meninjau kembali pengembangan bisnis: tinjauan, rekonseptualisasi, dan kerangka kerja yang diusulkan. Dalam *Cogent Business and Management* (Vol. 11, Edisi 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2351475>
- Widiyanarti, T., Rahmah, A., Faiha, NA, Kusuma, SA, Zaqia, N., Nugrah, PC, & Santoso, MH (2024). Media Digital dan Perannya dalam Diplomasi

- Budaya. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 331–334. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14015607>
- Wilding, D., Fray, P., Molitorisz, S., & Mckewon, E. (2018). *Pusat Transisi Media*, New South Wales.
- Wirawan, A. (2024). *Yuk Bikin Board Game Edukasi*. Surabaya: Mekanima
- Inspira Nagara. Kartodirjo, S. (2017). *Pendekatan Ilmu sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Xia, P. (2024). Dampak Diplomasi Budaya Jepang terhadap Konstruksi Kekuatan Lunak Budaya Tradisional Jepang. *Sorotan dalam Bisnis, Ekonomi, dan Manajemen*, 35, 21–30. <https://doi.org/10.54097/zvh93w50>
- Xiang, G., Peng, M., Tang, F., & Liu, Y. (2024). Mengungkap dampak pembelajaran kewirausahaan terhadap inovasi model bisnis di perusahaan rintisan internet: Peran mediasi kapabilitas digital. *Teknologi dalam Masyarakat*, 77. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102578>
- Xing, X., Zhu, C., Lin, Y., & Liu, T. (2024). Dapatkah platform digital memberdayakan inovasi terbuka inbound dan outbound? Dari perspektif ekosistem inovasi. *Humaniora dan Ilmu Sosial Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03523-2>
- Yongliang, S., & Sharon, CPY (2022). Menjelajahi Dampak Praktik Manajemen Proyek Agile terhadap Ketahanan dan Keberlanjutan Rantai Pasok: Studi Kasus Industri Manufaktur. *Jurnal Manajemen Proyek Modern*, 10(1), 300–319. <https://doi.org/10.19255/JMPM029020>
- Yousaf, M., & Abbas, Z. (2024). Evolusi Diplomasi di Era Digital: Peluang dan Tantangan. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16396.42889>
- Zamanli, E. (2022). Siklus Intensifikasi dalam Diplomasi Digital. *KnE Ilmu Sosial*, 70–86. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i2.10278>
- Zhou, J. (2022). Peran British Council dalam Diplomasi Budaya Inggris. *Jurnal Terbuka Ilmu Politik*, 12(04), 612–625. <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124033>
- Zhou, J., Barnes, P., & Gustafsson, MS (2022). Perkembangan Peran Diplomasi Budaya dalam Soft Power? - Studi Kasus Promosi Budaya Jepang [Universitas Linköping]. [www.liu.se](http://www.liu.se)
- Zoetmulder, P. (1983). *Kalangwan. Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Djambatan.
- Zweigert, K., & Kötz, H. (1998). *Pengantar Hukum Perbandingan* (T. Weir, Trans., edisi ke-3). Oxford University Press



### "Membangun Harmoni Global:

#### Sinergi Budaya, Kebangsaan, dan Ekonomi Kreatif Nusantara"

menguraikan peran penting diplomasi budaya dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Dalam era digital dan multipolar, kekuatan suatu bangsa tidak lagi ditentukan semata oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan membangun pengaruh melalui budaya—sebagai bentuk soft power yang menumbuhkan daya tarik, kepercayaan, dan kerja sama. Melalui pembahasan yang mendalam tentang diplomasi budaya digital, penelitian berbasis data, dan studi kasus implementatif, buku ini menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana Indonesia dapat mengubah kekayaan budayanya menjadi kekuatan strategis di ranah global.

Lebih jauh, buku ini menyoroti bagaimana elemen-elemen budaya seperti batik, gamelan, dan kuliner tradisional tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas, tetapi juga sebagai instrumen diplomasi yang berdaya saing global. Dengan membandingkan praktik diplomasi budaya Indonesia dengan model keberhasilan Jepang dan Korea Selatan, buku ini menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan budaya, ekonomi kreatif, dan strategi komunikasi digital. Selain menampilkan keberhasilan Indonesia dalam pengakuan budaya takbenda oleh UNESCO, penulis juga mengkaji kesenjangan konseptual dan strategis dalam diplomasi budaya yang selama ini bersifat simbolis dan belum terukur secara empiris.

Pada akhirnya, "Membangun Harmoni Global" bukan sekadar kajian akademik, tetapi juga seruan reflektif bagi bangsa Indonesia untuk menempatkan budaya sebagai poros pembangunan dan diplomasi masa depan. Buku ini menegaskan bahwa harmoni global hanya dapat terwujud apabila diplomasi budaya dijalankan secara inklusif, berbasis nilai, dan didukung oleh inovasi digital serta partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan yang kritis dan solutif, karya ini mengajak pembaca untuk memahami bahwa kebudayaan bukan sekadar warisan, melainkan kekuatan hidup yang mampu menjembatani perbedaan, memperkuat identitas nasional, dan membawa Indonesia berperan aktif dalam membangun dunia yang damai, setara, dan berkeadaban.

**ZAHIRA** MEDIA  
Book Publisher

Penerbit Zahira Media

📍 Ruko Mega Legenda G-2 No.19

☎ 0857-6009-6621

✉ zahiramedia81230@gmail.com